



20

25

DIREKTORAT JENDERAL
INFRASTRUKTUR DIGITAL

LAPORAN KINERJA

Balai Monitor Spektrum Frekuensi
Radio Kelas I Pekanbaru



LAPORAN KINERJA

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU

RINGKASAN EKSEKUTIF



Unit Pelaksana Teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru yang selanjutnya di tulis UPT Balmon SFR Kelas I Pekanbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Insfratraktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Balmon SFR Kelas I Pekanbaru berperan sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di wilayah Propinsi Riau.

Dalam struktur Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio bertindak sebagai unit pelaksana teknis di lapangan yang memastikan kebijakan yang dirumuskan di pusat dapat terimplementasi secara efektif. Sesuai dengan Permenkominfo 1 Tahun 2022 (sampai dengan berlakunya Permenkomdigi 1 Tahun 2025 pada 10 Januari 2025 sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Permenkomdigi 1 Tahun 2025, tidak terdapat norma yang menyatakan bahwa Permenkominfo 1 Tahun 2022 dicabut atau diganti oleh suatu peraturan lain yang sederajat, sehingga secara asas *lex posterior* dan asas khusus pelaksana Permenkominfo 1 tahun 2022 masih berlaku), adapun Tugas UPT Balmon SFR Kelas I Pekanbaru adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dengan melaksanakan tugas tersebut, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran Renstra Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029. Peran Balmon SFR tidak hanya memastikan tertibnya pengelolaan spektrum frekuensi radio, tetapi juga menjadi wujud kehadiran negara dalam menjamin layanan telekomunikasi yang andal, aman, dan berkualitas bagi masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Riau dan sekitarnya.

Laporankinerja Balmon SFR Kelas I Pekanbaru tahun 2025 ini disusun untuk melengkapi laporan kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Laporan ini merupakan gambaran capaian kinerja yang telah dicapai oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru yang sebelumnya telah disepakati oleh Kepala Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dengan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Dibawah ini merupakan tabel capaian kinerja Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Tahun 2025.

Berikut ini akan dijelaskan secara garis besar terkait capaian Balmon Pekanbaru selama tahun 2025, penjelasan lebih rinci akan dijelaskan pada Bab III.

Tabel 1. Capaian Kinerja Balmon Pekanbaru 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
IK.1.1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%	100%	125%
IK.1.2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
IK.1.3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105,26%
IK.1.4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133,33%
IK.1.5 Persentase % Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85%	100%	117,65%
IK.1.6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	125%
IK.1.7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
IK.1.8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS IKRAN)	100%	100%	100%
IK.1.9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
IK.1.10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
IK.1.11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%	100%
IK.1.12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%	100%
IK.1.13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%
IK.2.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru Tahun 2025	86.95 (Nilai)	84.58 (Nilai)	97,27%
IK.2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97.00 (Nilai)	100.00 (Nilai)	103,09%



BENCHMARKING 2025

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dan Balmon SFR Kelas I Medan memiliki peran strategis dalam pengawasan, pengendalian, serta pelayanan publik terkait spektrum frekuensi radio. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Ditjen Infrastruktur Digital, kedua Balmon ini bertanggung jawab dalam memastikan tertib penggunaan frekuensi, penanganan gangguan, serta optimalisasi layanan komunikasi.

Laporan ini menyajikan perbandingan capaian kinerja antara Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dan Balmon SFR Kelas I Medan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

Tabel 2. Perbandingan Kinerja

Indikator Kinerja	Balmon SFR Kelas I Pekanbaru	Balmon SFR Kelas I Medan	Analisis Perbandingan
Jumlah SDM	43 orang	67 orang	Balmon Pekanbaru memiliki lebih sedikit personil dibandingkan Balmon Medan
Luas Wilayah Kerja (BPS 2025)	89.935,90 km ²	72.981 km ²	Balmon Pekanbaru Memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan Balmon Medan
Perangkat Monitoring	6 stasiun tetap, 2 transportable, 1 mobile unit	4 Stasiun Monitor Tetap/Transportable, 2 Stasiun Bergerak	Balmon Medan Memiliki lebih banyak perangkat transportable dan mobile unit
Total Anggaran Tahun 2025	Rp8.876.634.000	Rp. 8.816.667.000	Balmon Pekanbaru Memiliki anggaran lebih besar dibandingkan Balmon Medan
Realisasi Anggaran Tahun 2025	Rp7.866.263.601	Rp7.943.850.468	Balmon Medan Memiliki realisasi anggaran lebih tinggi dibandingkan Balmon Pekanbaru

Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	125.00% Kab/Kota termonitor	125% Kab/Kota termonitor	Kedua Balmon mencapai target penuh dalam pemantauan Spektrum Frekuensi Radio
Pemeriksaan Stasiun Radio	100% dari target	100% dari target	Kedua Balmon mencapai target penuh dalam pemantauan Pemeriksaan Stasiun Radio
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	105.26% dari target	105,26% dari target	Kedua Balmon mencapai target penuh dalam Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio
Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	133.33% dari target	149,77 % dari target	Balmon Medan memiliki Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital lebih tinggi dibandingkan Balmon Pekanbaru
Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	117.65% dari target	110,59 % dari target	Balmon Pekanbaru Memiliki Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT lebih besar dibandingkan Balmon Medan
Penanganan Sanksi Denda Administratif	125.00% dari target	121.88 % dari target	Balmon Pekanbaru Memiliki Penanganan Sanksi Denda Administratif lebih besar dibandingkan Balmon Medan

Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100 % dari target	100 % dari target	Kedua Balmon mencapai target penuh dalam Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan
Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS IKRAN)	100 % dari target	100 % dari target	Kedua Balmon mencapai target penuh dalam Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS IKRAN)
Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100 % dari target	100 % dari target	Kedua Balmon mencapai target penuh dalam Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio
Sosialisasi Pelayanan Publik	100 % dari target	100 % dari target	Kedua Balmon mencapai target penuh dalam Sosialisasi Pelayanan Publik
Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100 % dari target	100 % dari target	Kedua Balmon mencapai target penuh dalam Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)
Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100 % dari target	100 % dari target	Kedua Balmon mencapai target penuh dalam Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100 % dari target	100 % dari target	Kedua Balmon mencapai target penuh dalam Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)
Nilai Kinerja Anggaran	84,58 dari target	86,76 dari target	Balmon Medan memiliki Nilai Kinerja Anggaran lebih tinggi dibandingkan Balmon Pekanbaru
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	103.09% dari target	100 % dari target	Balmon Pekanbaru Memiliki Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA lebih tinggi dibandingkan Balmon Medan

KATA PENGANTAR



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

(Balmon SFR Kelas I Pekanbaru) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio di Provinsi Riau.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki peran utama memberikan pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat.

Laporan kinerja Balmon SFR Kelas I Pekanbaru tahun 2025 ini disusun untuk melengkapi laporan kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Laporan ini merupakan gambaran capaian kinerja yang telah dicapai oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru yang sebelumnya telah disepakati oleh Kepala Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dengan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Harapan kami semoga laporan ini juga bermanfaat bagi stakeholder terkait serta dapat menjadi acuan dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio di masa mendatang.

Pekanbaru, 20 Februari 2026
Plt. Kepala Balmon SFR Kelas I Pekanbaru,

Toninotito, S.T., M.T




DAFTAR ISI

02 Ringkasan Eksekutif

09 Kata Pengantar

10 Daftar Isi

15 PENDAHULUAN

Latar Belakang	16
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	19
Potensi dan permasalahan Strategis	22
Sistematika Pelaporan	23



24 PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis	25
Perjanjian Kinerja	28

30 AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran kegiatan I	31
Sasaran Kegiatan II	115

145 PENUTUP

148 LAMPIRAN DOKUMENTASI



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Provinsi Riau	18
Gambar 1.2 Sistematika Penulisan	23
Gambar 3.1 Target Monitoring Perbatasan	35
Gambar 3.2 Jumlah ISR Monitoring	37
Gambar 3.3 Rekapitulasi ISR Monitoring	37
Gambar 3.4 Hasil Pemeriksaan MW Link metode Remote site	42
Gambar 3.5 Hasil Pemeriksaan MW Link metode Open Shelter	43
Gambar 3.6 Hasil Pengukuran Radio Siaran FM dan Televisi Digital	43
Gambar 3.7 Jadwal Pelaksanaan Penertiban	54
Gambar 3.8 Sebaran Pengukuran QOS	69
Gambar 3.9 Dashboard NK Perencana dan Pelaksanaan	115
Gambar 3.10 Capaian Bulanan Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Balmon Pekanbaru 2025	03
Tabel 2. Perbandingan Kinerja	05
Tabel 2.1 Sasaran Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 3.1 Target Monitoring SFR	32
Tabel 3.2 Detail Parameter SMFR Tetap	33
Tabel 3.3 Detai Parameter SMFR Jinjing/bergerak	33
Tabel 3.4 Rincian target ISR termonitor	36
Tabel 3.5 Laporan Gangguan SFR	48
Tabel 3.6 Metode pemantauan standar kualitas layanan static test	68
Tabel 3.7 Metode pemantauan standar kualitas layanan Drive Test	68
Tabel 3.8 Pendistribusian SPP dan ST UPT Pekanbaru Tahun 2025	74
Tabel 3.9 Rekapitulasi kegiatan pencegahan dan penanganan piutang	75
Tabel 3.10 Rekapitulasi kegiatan PPNTU UPT Pekanbaru	76
Tabel 3.11 Indeks kategori survey IKM/IPKP	87
Tabel 3.12 Nilai Indeks Hasil Survey	93
Tabel 3.13 Jumlah Peserta UNAR Tahun 2025	100
Tabel 3.14 Pencapaian Kegiatan Maritime on the spot (MOTS) 2025	101
Tabel 3.15 Target tindak lanjut verifikasi per-triwulan	110
Tabel 3.16 Nilai Kinerja anggaran tahun 2025	116

Tabel 3.17 Perbandingan nilai kinerja anggaran 2021 - 2025	116
Tabel 3.18 Nilai kinerja pelaksanaan Anggaran Balmon SFR Kelas I Pekanbaru	116
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran (dalam ribu)	117
Tabel 3.20 Revisi DIPA SOTK lama nomor SP DIPA-059.03.2.613441/2025	118
Tabel 3.21 Revisi DIPA SOTK baru nomor SP DIPA-059.09.2.694700/2025	118
Tabel 3.22 Posisi Barang milik Negara di Neraca Aset tahun 2025	119
Tabel 3.23 Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa tahun 2025 sesuai DIPA Nomor SP DIPA-059.03.2.613441/2025	120
Tabel 3.24 Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa tahun 2025 sesuai DIPA Nomor SP DIPA-059.09.2.694700/2025	121
Tabel 3.25 Perpindahan Pegawai ke dalam jabatan fungsional	122
Tabel 3.26 Daftar Pegawai ASN(PNS dan PPPK) Balmon SFR Kelas I Pekanbaru tahun 2025	123
Tabel 3.27 Data Pengembangan Kompetensi Pegawai	125
Tabel 3.28 Pengelolaan surat masuk, keluar dan nota dinas tahun 2025	132
Tabel 3.29 Daftar arsip inaktif selama tahun 2025	133
Tabel 3.30 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	139

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan target dan realisasi monitoring ISR	38
Grafik 3.2 Perbandingan Capaian di periode sebelumnya	48
Grafik 3.3 Kondisi Perangkat Monitoring dan Alat Ukur SMFR	58
Grafik 3.4 Capaian Kinerja Berfungsinya Perangkat pendukung SMFR	59
Grafik 3.5 Invoice Penanganan Denda Administratif	63
Grafik 3.6 Total penanganan denda administratif	64
Grafik 3.7 Perbandingan Capaian di periode sebelumnya	76
Grafik 3.8 Perbandingan Capaian di periode sebelumnya	82
Grafik 3.9 Rincian Responden SKM	86
Grafik 3.10 Responden berdasarkan layanan	87
Grafik 3.11 Perbandingan hasil survei kepuasan pelayanan publik (IKM/PKP)	88
Grafik 3.12 Perbandingan hasil survei integritas pelayanan publik (IIPP/IPAK)	93
Grafik 3.13 Jumlah peserta UNAR tahun 2025	100
Grafik 3.14 Persentase Jumlah Peserta UNAR Tahun 2025	101
Grafik 3.15 Capaian sosialisasi dan bimbingan SRC/LRC dan IKRAN	102
Grafik 3.16 Realisasi tindak lanjut verifikasi	111
Grafik 3.17 Nilai kinerja perencanaan Balmon SFR kelas I Pekanbaru	117
Grafik 3.18 Perbandingan persentase PNS, CPNS dan PPPK	122



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Di era transformasi digital, ketika teknologi diadopsi dan dimanfaatkan secara luas untuk memperbaiki, mengubah, dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan—baik dalam sektor pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun masyarakat secara umum—transformasi digital menjadi suatu keniscayaan yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Meskipun transformasi digital memberikan berbagai peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik, proses ini juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan transformasi digital di Indonesia. DJID berperan penting dalam pengelolaan infrastruktur telekomunikasi, penyusunan regulasi, standarisasi perangkat, serta perumusan kebijakan yang mendorong percepatan pemerataan akses digital. Melalui peran tersebut, DJID menjadi salah satu pilar utama dalam mempercepat transisi Indonesia menuju era digital, mendorong inovasi, meningkatkan daya saing global, serta mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Infrastruktur telekomunikasi yang andal, termasuk juga jaringan internet dan spektrum frekuensi radio, merupakan fondasi utama dalam mendukung transformasi digital. DJID bertanggung jawab dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio serta pengawasan perangkat telekomunikasi guna memastikan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai bagi pertumbuhan layanan digital.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Sebagai unit yang memiliki fokus yaitu pada pengelolaan dan pengawasan spektrum frekuensi radio. Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memegang peran yang strategis dalam mendukung transformasi digital, khususnya dalam menjaga keteraturan, keandalan, dan keberlanjutan penggunaan spektrum frekuensi radio yang menjadi tulang punggung komunikasi digital dan berbagai layanan teknologi lainnya.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru berperan utama dalam memberikan pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio. Seluruh layanan tersebut dilaksanakan guna mendukung tersedianya layanan telekomunikasi yang berkualitas, andal, dan berkesinambungan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

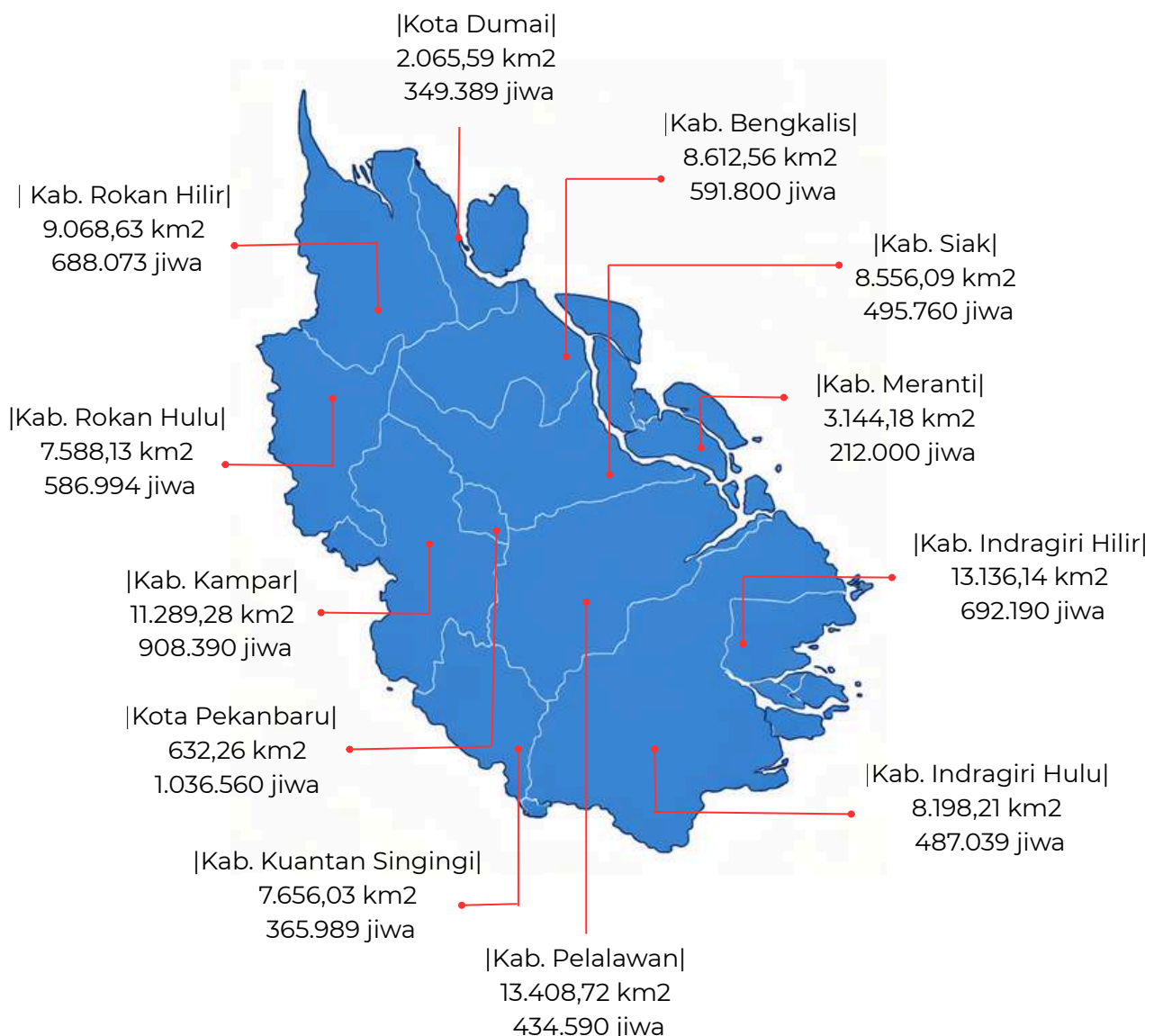
Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Balmon SFR I Pekanbaru berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat capaian sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja, sekaligus sebagai instrumen evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan capaian kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui laporan ini, kinerja pemerintah dapat diukur dan dievaluasi secara objektif, memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber daya publik dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, serta menjadi dasar dalam perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, laporan capaian kinerja turut berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.



PROFIL PROVINSI RIAU

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatra bagian tengah. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Provinsi Riau memiliki 10 Kabupaten dan 2 Kota. Ibu kota sekaligus kota terbesarnya adalah Pekanbaru, dan kota besar lainnya setelah Pekanbaru adalah kota Dumai. Provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik Riau pada tahun 2025 memiliki luas wilayah 89.935,90 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 6.848.774 jiwa penduduk (data yang dirilis 28 Februari 2025) serta kepadatan penduduk sekitar 75 jiwa/km² (data tahun 2025). Menurut sumber data yang sama, Provinsi Riau memiliki 144 Pulau, 172 Kecamatan serta 1.865 Desa/Kelurahan.



Gambar 1.1 Peta Provinsi Riau

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Balmon SFR Kelas I Pekanbaru diatur dalam Peraturan Menteri dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Secara administratif Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dibina oleh Sekretariat Ditjen Infrastruktur Digital (DJID), sedangkan secara teknis, pembinaan dilakukan oleh Direktorat Pengendalian DJID dan Direktorat Operasi Sumber Daya. Balmon SFR Kelas I Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT ini menyelenggarakan fungsi:

01	Penyusunan rencana dan program;
02	Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frkeuensi radio
03	Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
04	Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
05	Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
06	Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
07	Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
08	Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
09	Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan Hubungan Masyarakat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.



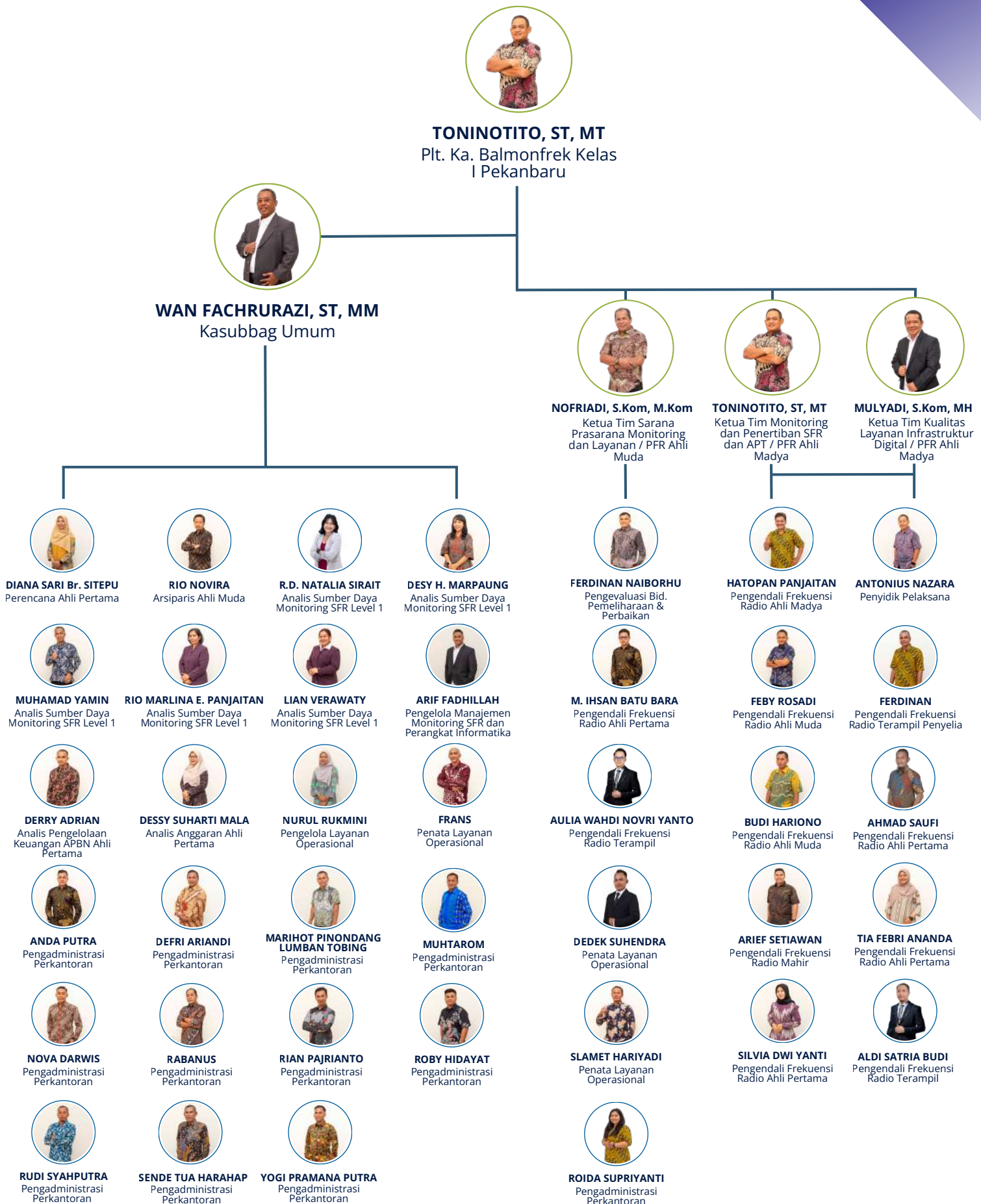
SUB BAGIAN UMUM

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja

PENGGORGANISASIAN UNIT KERJA DAN SDM



POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi yang tertib, efisien, dan bebas dari segala interferensi yang merugikan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru perlu mengimplementasikan sistem pengendalian dan pengawasan yang profesional sesuai dengan perkembangan teknologi telekomunikasi.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam hal mengelola dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada spektrum frekuensi radio, antara lain :



- 1 Masih banyaknya pengguna frekuensi ilegal yang membahayakan keselamatan maritim dan penerbangan
- 2 Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR);
- 3 Gangguan layanan operator seluler akibat pemakaian repeater seluler dan jammer seluler;
- 4 Kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa penggunaan frekuensi harus disertai dengan Izin Stasiun Radio (ISR);
- 5 Banyaknya piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang belum tertagih diakibatkan dari perpindahan alamat yang tidak dilaporkan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balmon SFR Kelas I Pekanbaru berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara garis besar Laporan Kinerja tahun 2025 ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:



Gambar 1.2 Sistematika Penulisan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Transformasi digital nasional yang terus berkembang menempatkan infrastruktur digital sebagai fondasi utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029, mempunyai Visi Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita. Pembangunan infrastruktur digital diarahkan untuk mewujudkan konektivitas yang merata, andal, dan berkelanjutan sebagai prasyarat terciptanya ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing. Infrastruktur telekomunikasi, khususnya pengelolaan spektrum frekuensi radio, memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya layanan digital yang berkualitas dan tertib secara nasional.

Sejalan dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang merupakan salah satu Ditjen dibawah Kementerian Komunikasi dan digital yang memegang peran kunci dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan di bidang infrastruktur digital. Fokus Renstra Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada periode 2025–2029 ini diarahkan pada pemerataan sekaligus juga pada peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi, optimalisasi pemanfaatan

spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas, serta penguatan tata kelola pembangunan infrastruktur digital nasional. Upaya tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur digital dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara efektif. Hal ini sesuai dengan tugas Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang tertuang Permen Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 yaitu Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur digital.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital.
3. Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur digital.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada pemangku kepentingan terkait.
5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital.
6. Penyelenggaraan dukungan manajemen dan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mempunyai visi “Terwujudnya Infrastruktur Digital Nasional yang Inklusif, berkualitas, efektif dan efisien serta Berkelanjutan untuk Mendukung Transformasi Digital dalam rangka mewujudkan Asta Cita” Dan memiliki misi sebagai berikut :

1. Mendukung percepatan konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau termasuk ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan
2. Mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dalam mempercepat tersedianya konektivitas digital
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam rangka mengurangi gangguan, marabahaya serta peredaran perangkat digital yang ilegal.
4. Meningkatkan profesionalitas dan kapasitas SDM Ditjen Infrastruktur Digital dalam kerangka

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka disusunlah beberapa Sasaran Program Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, yaitu sebagai berikut

1. Meningkatnya coverage Broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia
2. Meningkatnya Penetrasi dan Utilisasi (Take-Up) Internet Broadband
3. Meningkatnya Kualitas Internet Broadband Nasional
4. Meningkatnya Pertumbuhan Industri telekomunikasi dan Data Center yang berkelanjutan
5. Meningkatnya pengembangan industri perangkat dalam negeri yang aman dan terstandarisasi
6. Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus secara nasional
7. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNBK Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital
8. Terwujudnya Transformasi Internal Manajemen Ditjen Infrastruktur Digital yang adaptif dan resilien



Untuk mencapai sasaran program tersebut, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) melaksanakan rencana kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan Unit Pelaksana Teknis di seluruh wilayah Indonesia, antara lain melalui kegiatan – kegiatan berikut,;

1. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan spektrum frekuensi radio, guna menjamin pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio, termasuk kegiatan penegakan hukum di bidang spektrum frekuensi radio, dalam rangka menjaga kualitas dan keandalan layanan telekomunikasi.
3. Pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kualitas layanan telekomunikasi, sebagai dasar pengendalian teknis dan peningkatan mutu penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi.
4. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio, termasuk pelayanan perizinan, informasi, dan layanan teknis lainnya sesuai dengan kewenangan UPT.
5. Pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian data serta informasi teknis, sebagai bahan perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi program Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.
7. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait, guna mendukung implementasi kebijakan dan program pembangunan infrastruktur digital di daerah.
8. Penyelenggaraan dukungan manajemen dan administrasi UPT, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

Tabel 2.1 Sasaran Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target
IK-1 : Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	80%
IK-2 : Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
IK-3 : Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
IK-4 : Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat telekomunikasi	75%
IK-5 : Persentase % Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor	85%
IK-6 : Persentase (%)Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
IK-7 : Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
IK-8 : Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio	100%
IK-9 : Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
IK-10 : Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
IK-11 : Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
IK-12 : Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%
IK-13 : Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja	Target
IK-2.1 : Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru Tahun 2025	86,95%
IK-2.2 : Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran	97%





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja 1

Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

LATAR BELAKANG

Penggunaan spektrum frekuensi radio mencakup berbagai aplikasi dan layanan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Frekuensi radio digunakan untuk transmisi data, suara, dan gambar melalui gelombang radio di berbagai rentang frekuensi. Di sisi lain, sumber daya spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang terbatas yang memerlukan pengelolaan yang hati-hati agar tidak terjadi interferensi atau konflik antara pengguna yang berbeda. Peran dan kondisi spektrum frekuensi radio tersebut tentunya menuntut pengelolaan dan monitoring terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang lebih baik dan intensif. Hal ini tentunya untuk memastikan agar penggunaan SFR tepat peruntukkan dan penggunaannya serta optimal dalam ketersediaan sehingga dapat menunjang semua kebutuhan layanan komunikasi.

Pada tahun 2025, perjanjian kinerja Balmon SFR Kelas I Pekanbaru untuk monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota dengan target 100% Kabupaten/Kota termonitor

Dalam melakukan kegiatan monitoring penggunaan SFR di Kabupaten/Kota, terdapat 3 komponen parameter manual pengukurannya, antara lain : Okupansi sesuai pita penugasan, ISR yang termonitor dan Hasil Monitor SFR Teridentifikasi.

Pelaksanaan monitoring okupansi merupakan salah satu dari kegiatan monitoring yang dimaksudkan untuk memantau dan mengidentifikasi penggunaan spektrum frekuensi pada pita sub-service tertentu di wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan sarana perangkat monitor baik itu jinjing/bergerak maupun stasiun tetap monitoring spektrum frekuensi radio yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.



CAPAIAN KINERJA

Target Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Tabel 3.1 Target Monitoring SFR

No	Subservice	Pita Frekuensi (MHz)
1	Radio FM, DRM *INS04	87 - 108
2	Penerbangan VHF *INS36	108 - 137
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 - 174
4	DRM, DAB *INS05	174 - 230
5	Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS0D, Marabahaya *INS36	300 - 430
6	Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 - 460
7	Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 - 470
8	Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 - 806
9	Trunking *INS14, Downlink Seluler 800 *INS15	806 - 880
10	Downlink Seluler 900 *INS16	925 - 960
11	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A	1427 - 1518
12	Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 - 1880
13	Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 - 2170
14	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22	2170 - 2200
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	2300 - 2400

Adapun observasi dan identifikasi frekuensi radio dilakukan minimal terhadap 15 subservice/pita frekuensi yang mengacu pada Tabel 2.1 Target Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kab/Kota. Lebih lanjut, apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan pengenaan sanksi secara kumulatif dan bersamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait detail dan metode pengambilan data terhadap masing – masing pita frekuensi radio dari berbagai macam perangkat SMFR yang digunakan mengacu pada Tabel 2.2. Detail Parameter Pengambilan Data Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota.

Detail Parameter Pengambilan Data Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota.

I. Detail dan Parameter SMFR Tetap/Transportable

Tabel 3.2 Detail Parameter SMFR Tetap/Transportable

No	Subservice	Pita Frekuensi (MHz)	Stepwidth			Durasi
			R&S	TCI	LS Telcom	
1	Radio FM, DRM *INS04	87 - 108	50 kHz	50 kHz	4.88 kHz	4 Jam
2	Penerbangan VHF *INS36	108 - 137	6.25 kHz	6.25 kHz		
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 - 174	12.5 kHz	12.5 kHz		
4	DRM, DAB *INS05	174 - 230	50 kHz	50 kHz		
5	Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS00, Marabahaya *INS36	300 - 430	6.25 kHz	6.25 kHz		
6	Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 - 460	6.25 kHz	6.25 kHz		
7	Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 - 470	50 kHz	50 kHz		
8	Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 - 806	100 kHz	100 kHz		
9	Trunking *INS14, Downlink Seluler 800 *INS15	806 - 880	6.25 kHz	6.25 kHz		
10	Downlink Seluler 900 *INS16	925 - 960	100 kHz	100 kHz	78.125 kHz	30 Menit
11	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A	1427 - 1518				
12	Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 - 1880				
13	Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 - 2170				
14	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22	2170 - 2200				
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	2300 - 2400				

II. Detail dan Parameter SMFR Jinjing/Bergerak

Tabel 3.3 Detail Parameter SMFR Jinjing/Bergerak

No	Subservice	Pita Frekuensi (MHz)	Stepwidth		Measurement Time	Durasi
			R&S (Maks. Data Sampling 200.000)	R&S (Maks. Data Sampling 65.000)		
1	Radio FM, DRM *INS04	87 - 108	6.25 kHz	6.25 kHz	1 s	2 Jam
2	Penerbangan VHF *INS36	108 - 137				
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 - 174				
4	DRM, DAB *INS05	174 - 230				
5	Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS00, Marabahaya *INS36	300 - 430				
6	Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 - 460				
7	Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 - 470				
8	Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 - 806		6.25 kHz		
9	Trunking *INS14, Downlink Seluler 800 *INS15	806 - 880				
10	Downlink Seluler 900 *INS16	925 - 960	100 kHz	100 kHz	1 s	10 Menit
11	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A	1427 - 1518				
12	Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 - 1880				
13	Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 - 2170				
14	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22	2170 - 2200				
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	2300 - 2400				

Informasi target dan pelaporan dapat dilihat sebagaimana berikut:

Formula :

$$\frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota Termonitor}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota Wil. Kerja UPT}}$$

Syarat Kab/Kota Termonitor:

1. 15 Pita Frekuensi Termonitor;
2. ISR Termonitor;
3. Hasil Monitor Teridentifikasi;
4. Pengenaan Sanksi Terhadap Temuan Pelanggaran dari Hasil Monitor Teridentifikasi.

Target :

- 100 % hasil SFR termonitor dari 80% Kabupaten/Kota di wilayah kerja UPT;
- 15 pita frekuensi radio sesuai pada Tabel. 1 di atas, dilakukan observasi dan diidentifikasi dengan data SIMS di masing – masing wilayah kerja UPT dan data referensi lainnya pada tautan:
(<https://s.komdigi.go.id/UYAix>);
- Memonitor 60% dari ISR yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Aplikasi Report Online (ROL);
- Monitor SFR yang dilakukan pada point c diatas diprioritaskan pada pengguna yang memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Terkait daftar penyelenggara izin telsus dapat dilihat pada tautan :
(<https://s.komdigi.go.id/Y2P20>);
- Hasil monitor SFR harus teridentifikasi;

Pelaporan :

Monitoring pita frekuensi radio dan pengenaan sanksi di Kab/Kota dilaporkan melalui Aplikasi Report Online (ROL);





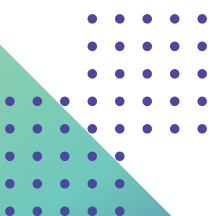
Gambar 3.1 Target Monitoring Perbatasan

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki wilayah kerja yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Oleh sebab itu kegiatan monitoring perbatasan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga merupakan hal yang wajib dilaksanakan guna mendapatkan data referensi dan bahan koordinasi frekuensi antara Indonesia dengan Negara lain baik Bilateral, Trilateral, Regional maupun Internasional. Adapun tujuan dari pelaksanaan Monitoring dan Observasi Spektrum Frekuensi Radio di daerah perbatasan negara (borderland) adalah untuk mengetahui kualitas jangkauan penerimaan stasiun radio (coverage) di daerah perbatasan, sehingga pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang ada dapat lebih optimal bagi kedua negara.

Target monitoring perbatasan terhadap beberapa dinas penyelenggara seperti; Dinas Siaran (Televisi Siaran Digital dan Radio Siaran FM) serta Layanan Selular.

Target :

- 100% Hasil monitor SFR teridentifikasi yang berasal dari negara lain;
- Hasil identifikasi yang bersumber dari Negara lain minimal dapat berupa subservice dari pancaran yang termonitor;
- Monitoring wilayah perbatasan dilakukan di seluruh Kab/Kota pada titik lokasi yang merepresentasikan pengguna spektrum frekuensi radio kedua negara; dan
- Target monitoring adalah dinas siaran (televisi dan radio) serta layanan selular.





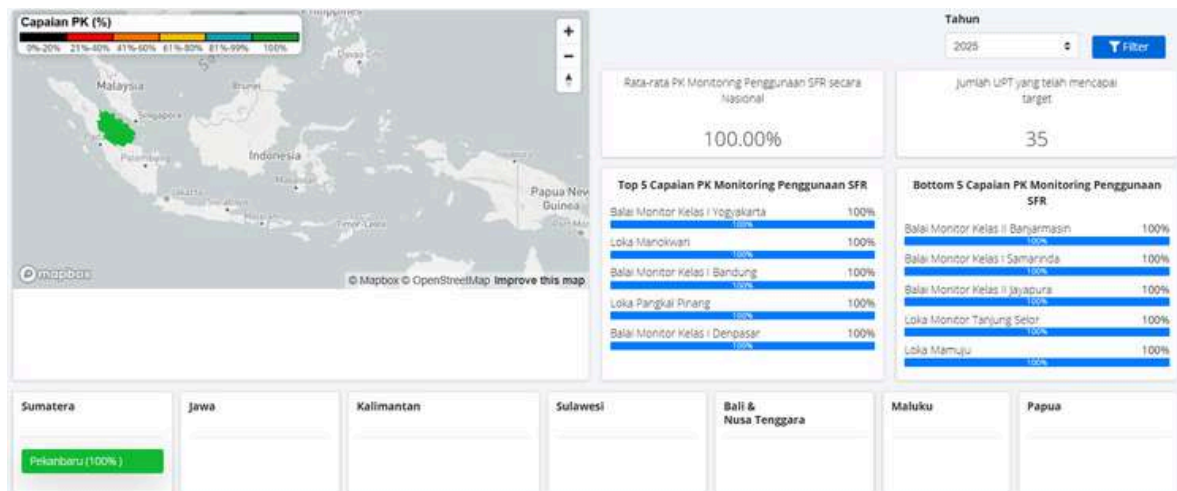
ANALISA

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatra bagian tengah. Provinsi Riau memiliki luas wilayah 87.023,66 km², yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Wilayah administratifnya terbagi atas 12 Kabupaten/Kota. Dalam mencapai target kinerja Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru harus melakukan monitoring penggunaan SFR terhadap 12 Kabupaten/Kota (100% termonitor).

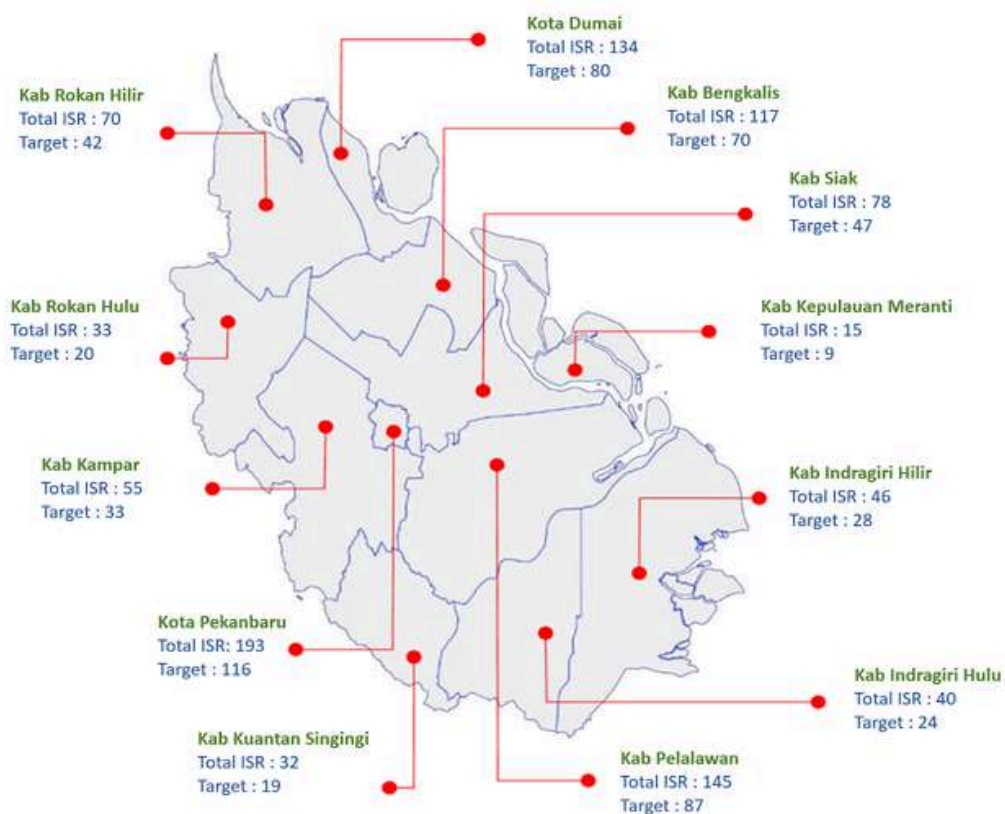
Balmon SFR Kelas I Pekanbaru mampu menyelesaikan komponen dalam capaian kinerja pada Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya di tahun 2025, sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Kelas I Pekanbaru mampu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu Jumlah ISR dari 12 Kabupaten/Kota sebanyak 958 ISR dengan target ISR termonitor sebanyak 575 ISR dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Detail Parameter SMFR Jinjing/Bergerak

Kabupaten/Kota	ISR Total	Target 60%	Teridentifikasi
INDRAGIRI HILIR	46	28	32
INDRAGIRI HULU	40	24	25
BENGKALIS	117	70	66
KAMPAR	55	33	54
KEPULAUAN MERANTI	15	9	14
KOTA DUMAI	134	80	128
KOTA PEKANBARU	193	116	191
KUANTAN SINGINGI	32	19	25
PELALAWAN	145	87	91
ROKAN HILIR	70	42	55
ROKAN HULU	33	20	33
SIAK	78	47	70
TOTAL	958	575	784

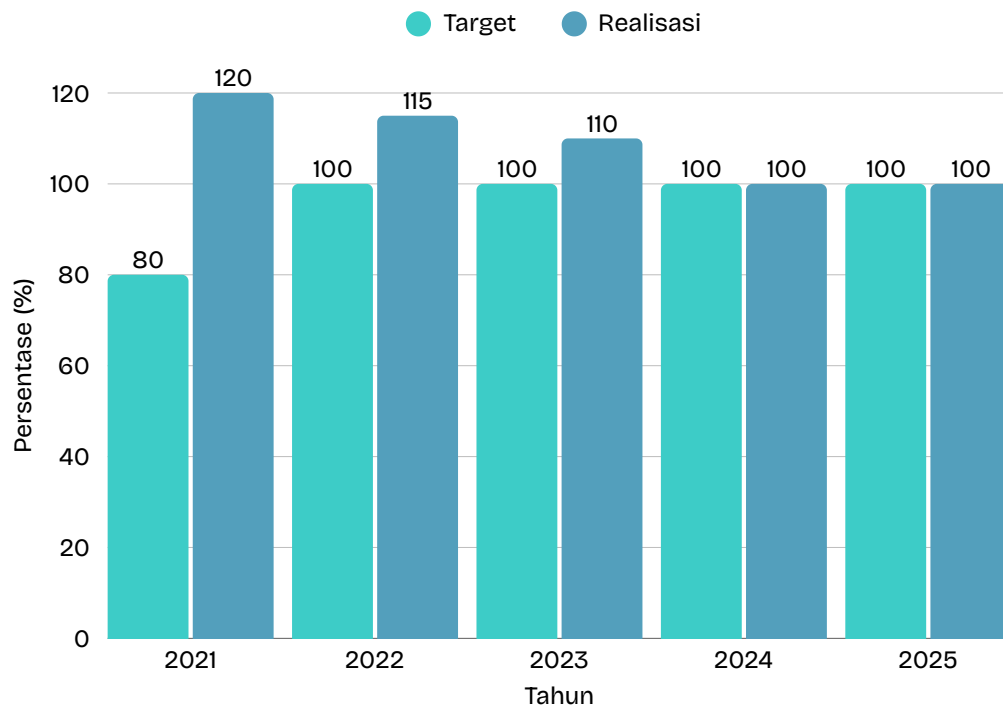


Gambar 3.2 Jumlah ISR Monitoring



Gambar 3.3 Rekapitulasi ISR Monitoring

Dalam mendukung tercapainya target Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 273.780.000,-. Sampai akhir pelaksanaan kegiatan Monitoring anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 250.096.975,- (91,35%). Dan dengan penggunaan anggaran tersebut Balmon SFR Kelas I Pekanbaru mampu melebihi target yang ditetapkan. Penggunaan anggaran tersebut selain untuk memenuhi target Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio juga digunakan untuk pelaksanaan Pengukuran Kualitas Layanan karena di tahun 2025 anggaran pengukuran kualitas layanan belum tersedia.



Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi

DAMPAK

Pelaksanaan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio memiliki peran strategis dalam menjaga keteraturan dan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi di Kabupaten/Kota. Sebagai bagian dari tugas Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, kegiatan ini menjadi garda terdepan dalam memastikan spektrum digunakan sebagaimana mestinya, tanpa gangguan yang dapat menghambat komunikasi publik maupun industri.

Dalam pengawasannya, monitoring spektrum frekuensi bertujuan untuk menertibkan penggunaan ilegal yang berpotensi menimbulkan interferensi dan merugikan pengguna yang sah. Dengan langkah-langkah yang terstruktur, pengawasan ini memungkinkan terciptanya ekosistem komunikasi yang lebih stabil dan terpercaya.

TINDAK LANJUT

Hasil pelaksanaan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio tentunya perlu ditindaklanjuti guna memastikan bahwa penggunaan frekuensi radio sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyebabkan interferensi antar layanan. Adapun tindaklanjut yang dilakukan antara lain: identifikasi jika terjadi penyimpangan penggunaan, pemberitahuan kepada pelaku penyimpangan, tindakan perbaikan atau mereduksi gangguan yang ditimbulkan terhadap penyimpangan penggunaan SFR, penjatuhan sanksi atau tindak hukum (jika diperlukan) serta koordinasi dengan pihak atau stakeholder terkait. Keseluruhan tindaklanjut tersebut dilakukan sematamata untuk menjaga dan memastikan penggunaan dan pemanfaatan SFR dapat berjalan efisien dan teratur sesuai peruntukannya.

REKOMENDASI

Pelaksanaan monitoring pengguna spektrum frekuensi radio ditujukan salah satunya untuk meningkatkan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang efisien dan optimal sehingga masyarakat serta stakeholder terkait dapat menikmati dan menggunakan sumber daya yang sifatnya terbatas ini secara maksimal dan berkualitas. Agar monitoring pengguna spektrum frekuensi radio ini dapat berjalan baik dan mencapai target kinerja, tentu saja dibutuhkan peningkatan kualitas dari prasarana, sarana dan SDM pendukungnya. Kualitas perangkat monitoring yang mumpuni yang sejalan dengan perkembangan teknologi serta kompetensi SDM yang harus terus ditingkatkan kompetensinya merupakan salah satu rekomendasi yang perlu terus dijaga kedepannya agar Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dapat terus dapat berkinerja baik.

EFISIENSI

Dalam rangka melaksanakan dan memenuhi target kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru tetap mengedepankan prinsip efisiensi. Efisiensi dalam pelaksanaan monitoring penggunaan SFR dilakukan dengan cara memberikan pelatihan terus menerus terhadap SDM pelaksana kegiatan, hal ini dilakukan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terkini tentang teknologi baru dan perubahan dalam regulasi. Disamping itu, dari sisi pelaporan tentunya juga memanfaatkan aplikasi Report On Line (ROL) Spektrum Frekuensi Nasional, sehingga data yang didapatkan bisa diolah seoptimal mungkin yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu data dukung dalam proses pengambilan keputusan baik ditingkat UPT maupun pusat.



Berorientasi Pelayanan : para ASN Balmon SFR Kelas I Pekanbaru telah berusaha menerapkan perilaku untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yakni ketertiban di dalam penggunaan frekuensi radio dan alat/perangkat Telekomunikasi yang tersertifikasi sehingga tidak merugikan pihak-pihak lainnya;

Akuntabel : pelaksanaan kegiatan penertiban frekuensi radio dan alat/perangkat Telekomunikasi dilakukan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kompeten : Para ASN harus senantiasa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab perubahan teknologi di bidang spektrum frekuensi radio, sehingga dapat melaksanakan monitoring spektrum frekuensi radio dengan kualitas terbaik;

Harmonis : dalam pelaksanaan kinerja tersebut perlu didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama secara sinergis.

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Loyal : Seluruh ASN dalam melaksanakan tugas harus tetap memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;

Adaptif : dalam pelaksanaan kegiatan, tim harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif agar kegiatan monitoring dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya;

Kolaboratif : pelaksanaan kegiatan senantiasa dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan pihak lain baik internal maupun eksternal seperti Korwas PPNS, TNI, KPID, Perhubungan Laut, APJII, ORARI, RAPI, Operator Seluler dan lainnya.



Indikator Kinerja 2

Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio



LATAR BELAKANG

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan yaitu; pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut maka perlu dilakukan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (inspeksi).

Kegiatan pemeriksaan tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub kegiatan seperti; Pemeriksaan (inspeksi) Microwave Link dengan metode Remote Site dan metode Open Shelter, Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran (Radio FM dan Televisi Digital Terrestrial). Target Pemeriksaan Stasiun Radio (inspeksi) yang telah ditetapkan oleh DJID pada tahun 2025 adalah 4767 target data yang dilakukan pemeriksaan Microwave Link metode Remote Site dan 309 target data yang dilakukan pemeriksaan metode Open Shelter.

Pada Layanan Penyiaran, khususnya subservice Radio Siaran FM dan TV Siaran Digital target pemeriksaan adalah seluruh stasiun telah terukur dengan rincian 53 (lima puluh tiga) Stasiun Radio Siaran FM dan 10 (sepuluh) Stasiun TV Siaran Digital.

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) merupakan salah satu jenis kegiatan dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna frekuensi radio yang telah dilakukan monitoring spektrum frekuensi radio sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengguna frekuensi radio telah mempunyai Izin Stasiun Radio (ISR), menggunakan Alat/Perangkat Telekomunikasi yang telah bersertifikat dan memastikan data teknis dan dokumen ISR sesuai dengan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga tercipta penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efektif, sesuai dengan peruntukannya dan terhindar dari gangguan yang merugikan.

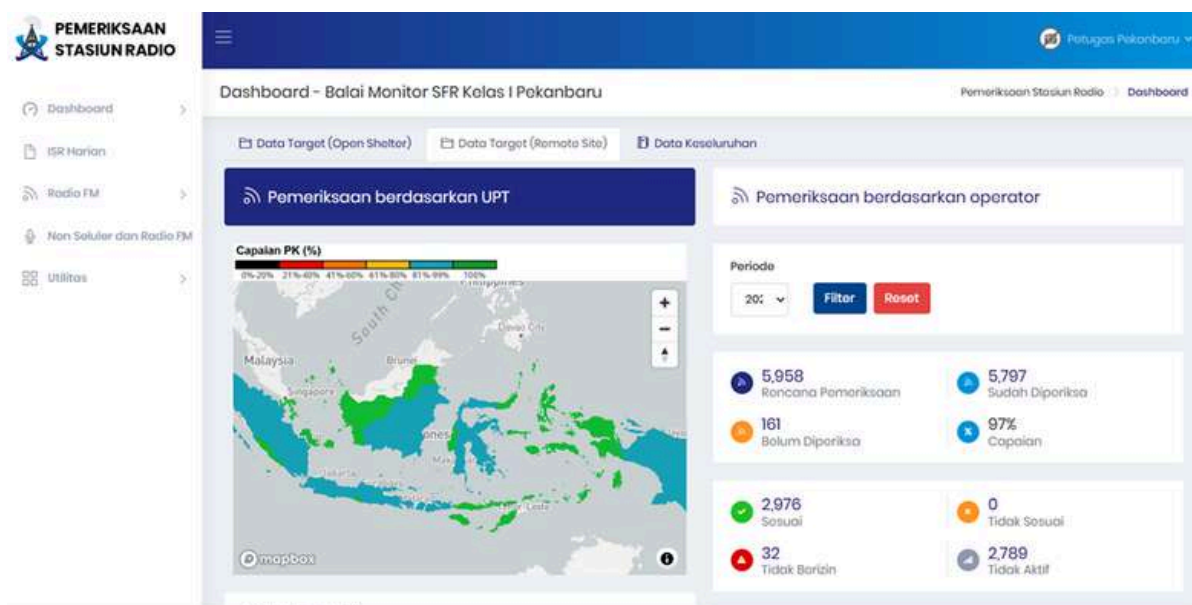
Berikut ini merupakan sasaran kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru selama tahun 2025 dengan target capaian kinerja yaitu 100% (Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 Pada Tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur Digital dan Penjelasan terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025).

1. Melaksanakan pemeriksaan Microwave Link sekurang-kurangnya 80% dari 5958 yaitu 4767 target data ISR melalui kegiatan metode Remote Site.
2. Melaksanakan pemeriksaan Microwave Link sekurang-kurangnya 60% dari 515 yaitu 309 target data ISR melalui kegiatan inspeksi metode Open Shelter.
3. Mengukur parameter teknis subservice radio siaran FM dan TV Siaran Digital sebanyak 63 penyelenggara yang ber-ISR dengan rincian 53 ISR penyelenggara radio siaran FM dan 10 ISR penyelenggara televisi siaran digital di Provinsi Riau.

CAPAIAN KINERJA

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru mampu menyelesaikan 5797 target pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) tahun 2025, sehingga capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Pekanbaru mampu mencapai >100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 4767 data ISR dengan rincian sebagai berikut:

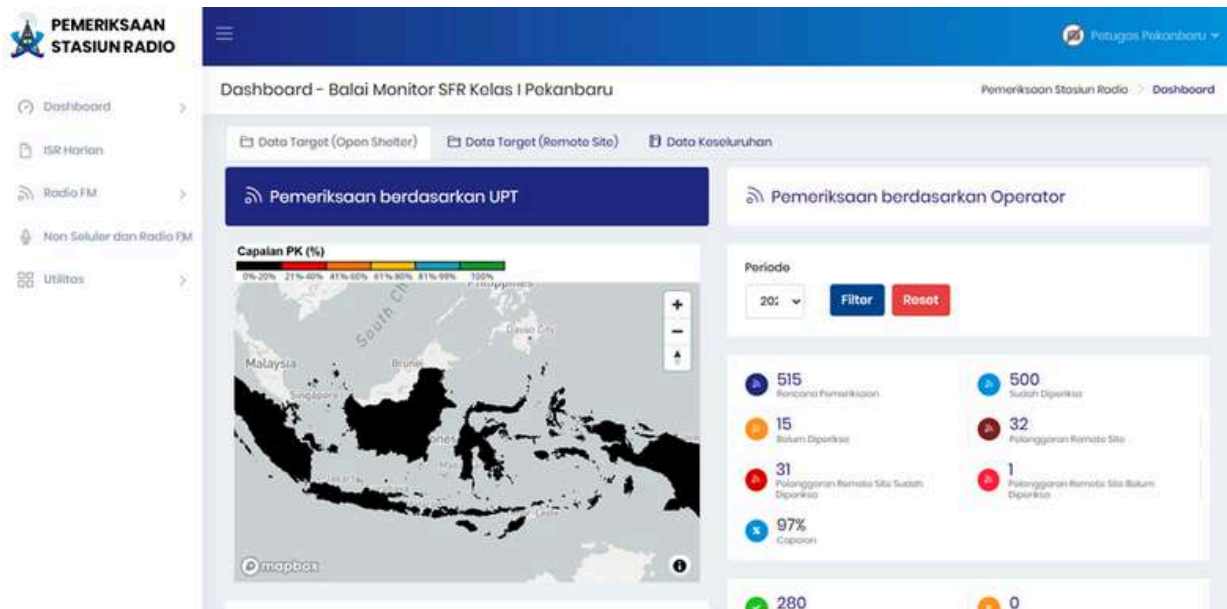
Capaian Hasil Pemeriksaan MW Link metode Remote Site Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Tahun 2025 berdasarkan data apstard.postel.go.id



Gambar 3.4 Hasil Pemeriksaan MW Link metode Remote site

Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link melalui kegiatan Open Shelter sebanyak 500 data ISR, sehingga capaian kinerja mencapai >100% dari target yang telah ditetapkan.

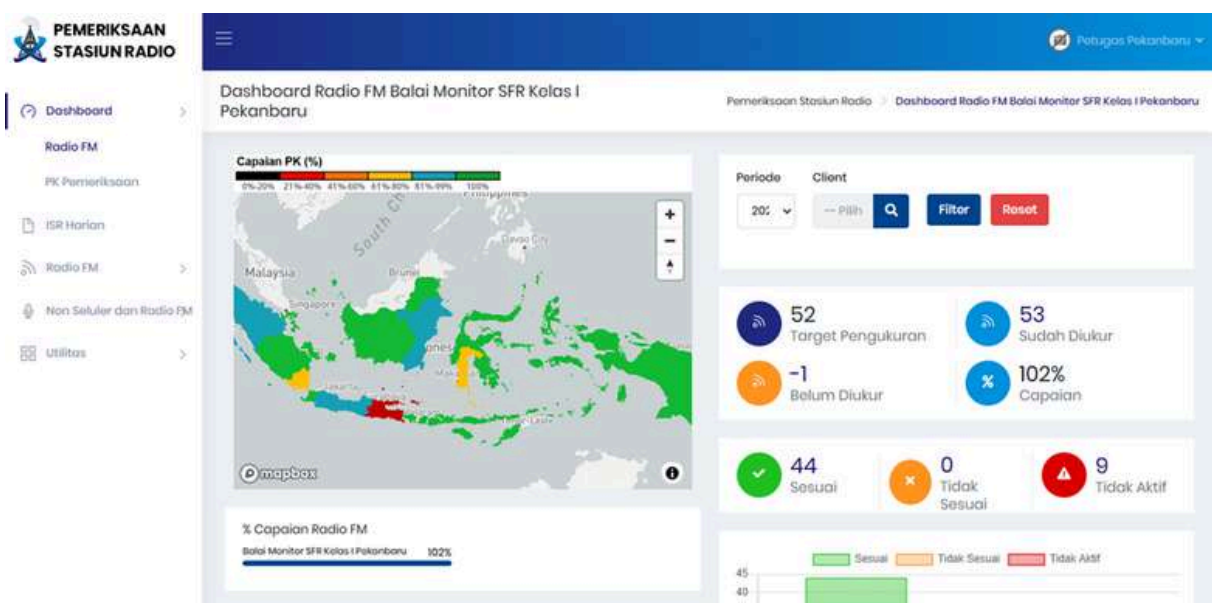
Capaian Hasil Pemeriksaan MW Link metode Open Shelter Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Tahun 2025 berdasarkan data apstard.postel.go.id



Gambar 3.5 Hasil Pemeriksaan MW Link metode Open Shelter

Telah dilakukan pengukuran parameter teknis pada Subservice Radio Siaran FM dan TV Siaran Digital pada 63 penyelenggara yang memiliki ISR dengan rincian 53 ISR penyelenggara Radio Siaran FM dan 10 ISR penyelenggara Televisi Siaran Digital.

Capaian Hasil Pengukuran Radio Siaran FM dan Televisi Digital Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Tahun 2025 berdasarkan data apstard.postel.go.id



Gambar 3.6 Hasil Pengukuran Radio Siaran FM dan Televisi Digital

ANALISA

Pelaksanaan dan capaian kinerja persentase (%) pemeriksaan stasiun radio tahun anggaran 2025 tentunya tidak terlepas dari banyak faktor pendukung atau penghambat. Keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan berhubungan dengan regulasi, teknologi, serta aspek operasional dan sosial. Kompetensi SDM yang dimiliki, kemampuan dalam merangkul stakeholder terkait, serta pemanfaatan teknologi dan perangkat pendukung yang memadai menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai target kinerja.

Disisi lain, tentunya masih terdapat beberapa kendala yang pelaksanaannya masih dapat diminimalisir, sebagai contoh sulitnya akses ke lokasi sering dihadapi saat adanya pemeriksaan oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Kendala kesulitan akses ini bisa saja terjadi karena lokasi fisik stasiun yang akan diperiksa maupun kendala akses secara administratif untuk dapat memasuki area yang akan diperiksa.

Untuk pelaksanaan pemeriksaan stasiun Radio, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 315.025.000,- sampai akhir pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 314.840.575,- (99,94%). Penggunaan anggaran tersebut juga digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan.

DAMPAK

Pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio, TV Digital, dan Perangkat Telekomunikasi memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan regulasi serta menjaga kualitas komunikasi di berbagai sektor.

Sebagai bagian pengawasan spektrum frekuensi, pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada stasiun radio, tetapi juga mencakup televisi digital serta berbagai perangkat yang beroperasi dalam sistem komunikasi nirkabel. Salah satu dampak utama dari pemeriksaan ini peningkatan kepatuhan pengguna frekuensi. Dengan adanya inspeksi berkala, pemilik stasiun radio dan televisi digital lebih terdorong untuk memenuhi persyaratan teknis dan administratif, sehingga mengurangi risiko pelanggaran yang dapat mengganggu komunikasi publik maupun industri. Selain itu, pemeriksaan juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap interferensi, memastikan bahwa setiap perangkat beroperasi dalam batas frekuensi yang telah ditentukan.

TINDAK LANJUT

Hasil pelaksanaan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio tentunya perlu ditindaklanjuti guna memastikan bahwa penggunaan frekuensi radio sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyebabkan interferensi antar layanan. Adapun tindak lanjut yang dilakukan antara lain: identifikasi jika terjadi penyimpangan penggunaan, pemberitahuan kepada pelaku penyimpangan, tindakan perbaikan atau mereduksi gangguan yang ditimbulkan terhadap penyimpangan penggunaan SFR, penjatuhan sanksi atau tindak hukum (jika diperlukan) serta koordinasi dengan pihak atau stakeholder terkait.

REKOMENDASI

Kedepannya untuk dapat terus meningkatkan kinerja Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dalam memenuhi target kinerja yang ada khususnya untuk pemeriksaan stasiun radio, diperlukan komunikasi, kolaborasi atau kerjasama yang lebih intens dengan para stakeholder terkait. Disamping itu, pemahaman stakeholder terkait pentingnya dilakukan pemeriksaan guna memastikan kualitas layanan untuk seluruh pihak yang terlibat baik penyelenggara jasa telekomunikasi maupun bagi pihak yang menerima manfaatnya juga dapat ditingkatkan, sehingga tidak terjadi resistensi yang pada akhirnya dapat menjadi kendala bagi Balmon SFR Kelas I Pekanbaru.

EFISIENSI

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio dilakukan dengan 2 metode yaitu open shelter yaitu hadir secara fisik ke lokasi stasiun yang akan diperiksa atau dengan cara kedua yaitu remote site atau dilakukan secara jarak jauh tanpa harus hadir secara fisik di lokasi stasiun yang akan diperiksa.

Kedua metode tersebut tentu saja memiliki keunggulannya masing masing, jika metode remote site memiliki keunggulan dari sisi efisiensi waktu dan tenaga serta anggaran tanpa harus mengurangi kualitas pemeriksaan, metode open shelter memiliki keunggulan dalam hal transparansi, efektivitas, dan pengawasan real-time.



IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : Dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio, Balmon Pekanbaru mengedepankan nilai orientasi pelayanan. Dengan adanya pemeriksaan ini, kualitas layanan telekomunikasi atau penyiaran yang disediakan oleh stakeholder terkait dapat lebih terjaga karena telah sesuai antara izin ISR yang ada dengan parameter teknis yang ada sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih optimal dan terjaga kualitasnya.

Akuntabel : Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dapat mempertanggung jawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil selama proses pemeriksaan. Setiap temuan atau rekomendasi yang dikeluarkan harus jelas, terperinci, dan didasarkan pada bukti yang valid yang ditemukan baik melalui mekanisme



Kompeten : Balmon SFR Kelas I Pekanbaru selalu berusaha agar SDM yang ada memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam aspek teknis terkait frekuensi dan transmisi, maupun dalam pemahaman regulasi dan kebijakan yang berlaku. Selalu melakukan pengembangan diri agar dapat melakukan pemeriksaan yang efektif dan efisien.

Harmonis : Dalam melakukan pemeriksaan, tim Balmon SFR Kelas I Pekanbaru selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan pengguna SFR, bukan dengan pendekatan yang menekan atau menciptakan konflik. Membangun komunikasi yang baik dan mengedepankan dialog agar memperlancar proses pemeriksaan.

Loyal : Balmon SFR Kelas I Pekanbaru harus loyal pada tugasnya untuk menjaga kepentingan publik dan memastikan bahwa peraturan dan regulasi diikuti dengan benar.

Adaptif : Tim Balmon SFR Kelas I Pekanbaru selalu berusaha untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi yang terus berubah. Dengan memahami teknologi baru yang digunakan di stasiun radio (misalnya, digitalisasi atau sistem transmisi baru), pemeriksa melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih tepat dan efektif.

Kolaboratif : Kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam industri telekomunikasi, penyiaran serta seluruh pengguna SFR termasuk operator serta masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan solusi yang baik untuk semua pihak.



Indikator Kinerja 3

Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

LATAR BELAKANG

Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari layanan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Padatnya penggunaan spektrum frekuensi radio oleh masyarakat sangat berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi yang merugikan atau yang dikenal dengan Harmful Interference. Akibat maraknya penggunaan spektrum frekuensi oleh masyarakat tanpa dan/atau tidak sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki, menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya proses pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang andal agar tidak terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (Harmful interference) bagi pengguna frekuensi yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan proteksi atau perlindungan bagi pengguna frekuensi yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Proteksi atau perlindungan tersebut dilakukan melalui kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dan wajib mendapatkan respons penanganan dalam jangka waktu 1 x 24 jam dalam hal terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (Harmful Interference).

Penanganan gangguan spektrum frekuensi tersebut wajib mengutamakan penanganan pada dinas keselamatan seperti pada dinas penerbangan, dinas maritim, dan dinas lainnya yang sangat berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Gangguan spektrum frekuensi radio ini perlu mendapat perhatian khusus oleh karena dalam penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor atau lintas Kementerian/Lembaga. Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDPPI yang tersebar di seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tidak terbatas pada dinas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, melainkan seluruh dinas atau service seperti pada dinas bergerak darat, tetap, siaran, satelit, dan dinas lainnya.

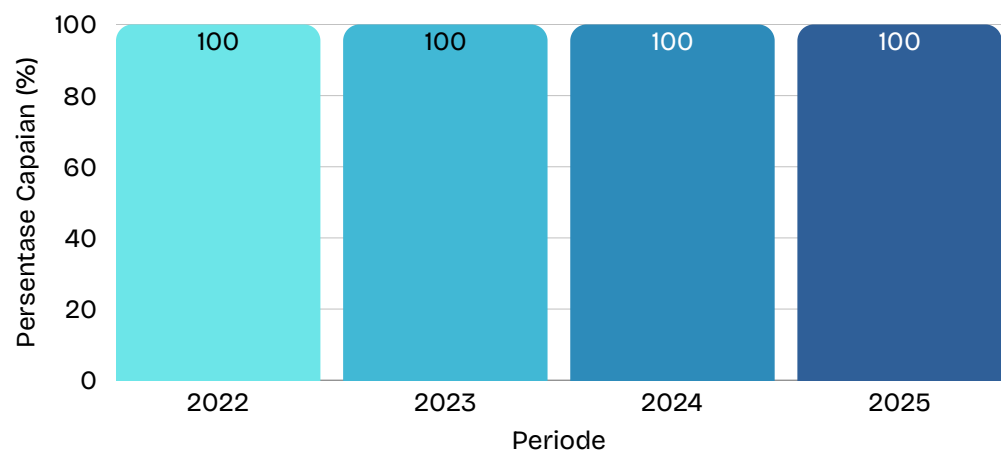
Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan adalah melakukan pelayanan tindak lanjut terkait pelaporan pengaduan gangguan frekuensi radio yang dilakukan dengan proses monitoring dan deteksi terhadap gangguan frekuensi radio sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal SDPPI Nomor : 3 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Penggunaan SFR dan APT.

CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.5 Laporan Gangguan SFR

Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru	Kabupaten Kepulauan Meranti	Kabupaten Bengkalis
Klien	PT.NIRWANA TURISINDO / PREMIERE HOTEL	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.

Penyelesaian aduan gangguan spektrum frekuensi radio tahun 2025, dari total 3 aduan gangguan telah berhasil diselesaikan seluruhnya 100 % dari target yang ditetapkan oleh Ditjen SDPPI sebesar 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak ada gangguan frekuensi untuk keselamatan penerbangan maupun maritim.



Grafik 3.2 Perbandingan Capaian di periode sebelumnya

ANALISA

Capaian penanganan gangguan SFR terkait keselamatan bisa melebihi target yang telah ditetapkan, beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut yakni:

- 1.Menyiapkan target pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio.
- 2.Melakukan sosialisasi baik skala regional yang dilakukan oleh UPT maupun skala nasional dengan menghadirkan audiens dari beberapa instansi maupun komunitas, seperti APJII, Himpunan Nelayan, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), ORARI dan RAPI, dan lainnya.

3. Melakukan edukasi sekaligus penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio. Pelaksanaan penertiban ini adalah bagian tindak lanjut proses edukasi dan pengawasan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio agar tertib menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan koordinasi dengan UPT dan instansi-instansi terkait dalam melakukan proses penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, serta melakukan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio. Sebagai optimalisasi pencapaian indikator, Ditjen SDPPI juga berinovasi dalam kegiatan sosialisasi.
5. SDM yang berkompeten yang baik serta memiliki kemampuan teknis dan koordinasi yang baik

Anggaran yang tersedia untuk Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio sebesar Rp. 23.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.683.025,- (99.93%). Anggaran tersebut berhasil menangani aduan gangguan sebanyak 3 kali.

DAMPAK

Pelaksanaan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga stabilitas dan kualitas komunikasi di wilayah Kabupaten/Kota. Gangguan spektrum frekuensi dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti interferensi antar sistem komunikasi, penggunaan frekuensi tanpa izin, atau ketidaksesuaian teknis perangkat yang beroperasi dalam spektrum tertentu. Salah satu dampak utama dari penanganan gangguan spektrum adalah meningkatnya kualitas layanan komunikasi dengan identifikasi dan mitigasi gangguan secara cepat, pengguna layanan telekomunikasi, penyiaran, dan komunikasi bisnis dapat menikmati koneksi yang lebih stabil dan bebas dari interferensi. Hal ini sangat penting bagi sektor-sektor yang bergantung pada komunikasi nirkabel, seperti industri penyiaran, layanan darurat, dan jaringan telekomunikasi publik.

Selain itu, penanganan gangguan spektrum juga berkontribusi pada penegakan regulasi dan kepatuhan pengguna frekuensi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pengguna frekuensi lebih terdorong untuk mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam hal perizinan dan penggunaan perangkat yang sesuai standar. Hal ini membantu menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih tertib dan terorganisir.

TINDAK LANJUT

Tahun 2025, telah dilakukan berbagai pengembangan pada aplikasi trouble ticket sehingga memudahkan dalam pelaporan dan tindakan dalam proses penanganan gangguan. Selain itu kerjasama yang dilakukan dengan berbagai stakeholder semakin ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyegaran dan penandatanganan MoU terkait dengan penanganan gangguan khususnya pada spektrum frekuensi radio prioritas seperti maritim dan penerbangan.

REKOMENDASI

Untuk meningkatkan efektifitas dan keberhasilan pencapaian target Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio ini, diperlukan sosialisasi yang semakin baik sehingga penggunaan spektrum frekuensi bisa semakin tertib dan potensi gangguan spektrum frekuensi radio semakin kecil. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan dapat meningkatkan kemampuan para pelaksana teknis khususnya pengendali frekuensi radio sehingga dapat mempercepat proses identifikasi dan penanganan gangguan pengguna spektrum frekuensi radio. Serta memperkuat peraturan, kebijakan dan sanksi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio.



EFISIENSI

Aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio dari bulan Januari s.d Desember 2025 berjumlah 3 aduan gangguan SFR dan sudah tertangani seluruhnya. Sepanjang tahun 2025 penanganan gangguan SFR telah diselesaikan 100%.

Efisiensi capaian target pada indikator "Persentase Penanganan Gangguan Frekuensi Radio" dilakukan secara efektif dan efisien hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor.

Pertama, meningkatnya jumlah perangkat monitoring yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, peningkatan jumlah SDM terutama fungsional pengendali frekuensi di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap efisien dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada dinas penerbangan dan maritim. Selain kedua faktor tersebut, inovasi mengenai layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilakukan secara berkesinambungan salah satu contohnya adalah pengembangan aplikasi Trouble Ticket layanan penanganan gangguan SFR. Dengan adanya aplikasi ini, tentunya pengguna spektrum frekuensi radio dapat melakukan laporan pengaduan kapanpun dan dimanapun apabila frekuensi yang digunakan mengalami gangguan yang merugikan (Harmful Interference).

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Dimaksudkan agar layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang merupakan layanan publik, wajib memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggung jawabkan dihadapan masyarakat.

Akuntabel : Ditunjukkan dengan komitmen ASN untuk bekerja secara jujur dan transparan. Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan, nilai ini dibutuhkan untuk kualitas kerja yang semakin baik.

Kompeten : Kompetensi ASN terus diasah dan ditingkatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada ASN dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

Harmonis : Harus selalu terjaga, baik harmonisasi hubungan antara sesama ASN maupun hubungan dengan pihak masyarakat luar, agar suasana kerja baik di dalam maupun di luar kantor dapat selalu terjaga, nyaman, dan kondusif.

Loyal : Ditunjukkan dengan selalu siap 24 jam dalam menerima aduan gangguan yang terjadi dari masyarakat dan segera memberikan respons penanganan gangguan meskipun sumber gangguan berada di wilayah yang sulit dijangkau dan butuh waktu yang tidak sebentar dalam proses penanganannya hingga gangguan spektrum frekuensi tersebut dapat teratasi dengan tuntas.



Adaptif : Inovasi-inovasi layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio terus dikembangkan, salah satunya melalui pengembangan aplikasi Trouble Ticket penanganan gangguan SFR, dimana masyarakat yang melaporkan aduan gangguan dapat mengetahui status proses aduannya sudah berjalan sejauh mana melalui notifikasi yang diterima pada aplikasi.

Kolaboratif : Ditunjukkan dengan selalu berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak (stakeholder) menyelesaikan untuk permasalahan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio khususnya pada dinas maritim dan penerbangan, tanpa adanya kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait permasalahan tentunya penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio akan sangat sulit diselesaikan

Indikator Kinerja 4

Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

LATAR BELAKANG

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio secara illegal berpotensi menimbulkan gangguan atau harmful interference pada penyelenggara komunikasi resmi yang telah berizin serta beresiko mengganggu keamanan dan menimbulkan kerugian ekonomi akibat penggunaan perangkat komunikasi illegal dan belum tersertifikasi. Dari hasil pengawasan dan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Riau banyak ditemukan pengguna spektrum frekuensi radio ilegal pada Dinas Bergerak Darat, Dinas Tetap, Dinas Amatir, Dinas Maritim hingga Dinas Siaran.

Untuk itu Balmon SFR Kelas I Pekanbaru senantiasa melakukan pengawasan dan kegiatan pengendalian spektrum frekuensi radio dengan mengamati, memantau, memeriksa, mengukur, dan pada akhirnya melaksanakan operasi penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio ilegal dan yang tidak sesuai ketentuan teknis perangkat. Kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan pada tahun 2025, termasuk di dalamnya kegiatan Penertiban Nasional sebanyak 3 (tiga) kegiatan.

Pada tahun anggaran 2025, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki target 75% tingkat kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital, dengan program kerja kegiatan pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 6 (enam) kegiatan dan tindak lanjut hasil penertiban sebanyak 1 (kali) kegiatan di wilayah Kabupaten/ Kota Provinsi Riau. Kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilakukan melalui tahapan sesuai dengan pedoman Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi, dengan jenis perangkat prioritas sebagai berikut:

Jenis perangkat prioritas:

- HF All Band Transceiver
- Mobile Transceiver/Radio Rig
- Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router)
- Pemancar FM
- Simbox/Modempool
- Fake BTS/IMSI Catcher
- Repeater/Penguat Sinyal Seluler
- Jammer
- GPS Tracker
- Microwavelink (IDU/ODU)
- Handy Talkie (HT)
- Radio POC
- Set Top Box
- Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch)
- Optical Line Terminal (OLT) dan Optical Network Terminal (ONT)
- Alat Telekomunikasi Rakitan



CAPAIAN KINERJA

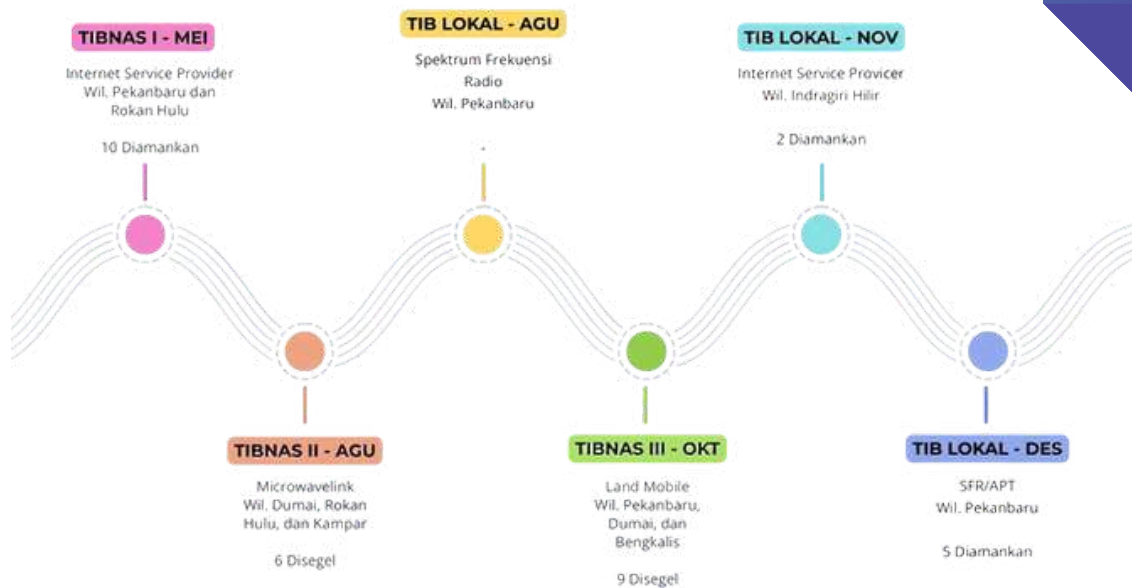
Selama tahun 2025, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sebanyak 6 (enam) kali kegiatan menemukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio sebanyak 32 (tiga puluh dua) stasiun radio dan telah dihentikan pancarannya serta dilakukan penyegelan terhadap stasiun radio tersebut

Dari 32 (tiga puluh dua) tersebut telah dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kata lain capaiannya indikator kinerja ini adalah 100%. Kemudian, dilaksanakan juga kegiatan tindak lanjut hasil penertiban telah sebanyak 1 (satu) kegiatan pengguna frekuensi ilegal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja bahwa hasil penertiban diarahkan dalam bentuk pembinaan dan sanksi administrasi.

Operasi Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/ atau Perangkat Telekomunikasi di Wilayah Provinsi Riau dengan Target Operasi Microwave Link Operator Seluler dan Penyelenggara Internet Service Provider (ISP) pada pengguna Frekuensi 2.4 GHz dan Frekuensi 5.8 GHz.

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan penertiban Pengguna Frekuensi Radio yang meliputi kegiatan di dalam dan luar kota sesuai grafik berikut.





Gambar 3.7 Jadwal Pelaksanaan Penertiban

Terdapat kendala pada pelaksanaan penertiban terhadap pengguna Internet Service Provider (ISP) di Wilayah kerja Balmon SFR Kelas I Pekanbaru yaitu kurangnya sosialisasi tentang Pelanggaran dan Sanksi terhadap penggunaan Frekuensi yang tidak sesuai peruntukan sesuai dengan Perdirjen Nomor 03 Tahun 2025 tentang cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Telah dilakukan monitoring alat/perangkat telekomunikasi di 10 Kabupaten/Kota wilayah kerja UPT Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Hasil monitor alat/perangkat telekomunikasi 313 alat/perangkat, dengan rincian 312 alat/perangkat memiliki sertifikat dan 1 alat/perangkat tidak memiliki sertifikat. Jumlah ini telah mencapai target yaitu melebihi 300 target, sehingga memperoleh capaian >100%.

ANALISIS

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital ini ditentukan oleh beberapa faktor:

- Peraturan dan kebijakan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak
- Ketersediaan sumber daya yang memadai mulai dari kualitas SOM, perangkat, serta anggaran demi meningkatkan efektivitas penertiban;
- Sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran spektrum frekuensi radio ilegal dapat memberikan pesan jelas tentang konsekuensi dari penggunaan frekuensi ilegal; serta
- Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil penertiban serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Sedangkan beberapa kendala yang kerap kali dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat yang menjadi objek penertiban terhadap regulasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/perangkat Telekomunikasi.

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 210.816.000,-. Anggaran tersebut dibagi menjadi 6 pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 187.851.300,- (89,10%). Realisasi ini tidak dapat maksimal dikarenakan adanya kegiatan kepulauan yang seharusnya menggunakan 2 unit speedboat tetapi di efisiensi menjadi 1 unit speedboat.

DAMPAK

Pelaksanaan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki dampak yang luas dalam menjaga keteraturan dan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi di wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat yang beroperasi dalam spektrum frekuensi telah memenuhi standar teknis dan regulasi yang berlaku.

Dengan adanya penertiban, pengguna spektrum frekuensi lebih terdorong untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Balmon SFR Kelas I Pekanbaru secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan penggunaan frekuensi.

Penertiban perangkat ilegal juga berkontribusi dalam menjaga keamanan komunikasi publik, terutama dalam sektor penyiaran dan telekomunikasi. Dengan regulasi yang ditegakkan, masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih aman dan terpercaya.

REKOMENDASI

Untuk meningkatkan efektifitas dan keberhasilan pencapaian target Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi ini, diperlukan kerjasama yang erat antara Balmon SFR Kelas I Pekanbaru sebagai regulator, penegak hukum, dan pemegang izin sehingga dapat mempercepat proses identifikasi dan penanganan pelanggaran pengguna frekuensi ilegal. Serta memperkuat peraturan, kebijakan dan sanksi terkait gangguan spektrum frekuensi radio.

TINDAK LANJUT

Sebagian besar target operasi penertiban berasal dari hasil identifikasi pada kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dengan memantau langsung aktual penggunaan frekuensi di lapangan. Sehingga untuk tahun 2025 akan diperkuat kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi dan lembaga terkait lainnya demi memperoleh informasi pengguna yang belum terpantau dari hasil monitoring. Pada tahun 2025 telah diterapkan sanksi administratif bagi pengguna frekuensi ilegal. Sehingga pada prosesnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna spektrum frekuensi radio akan melalui proses dan tahapan dalam penyelesaian sanksi administrasinya. Hal ini diharapkan mampu menekan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat telekomunikasi ilegal.

EFISIENSI

Kegiatan penertiban nasional tahun 2025 dilaksanakan 6 (enam) tahap. Yang terdiri dari 3 (tiga) Penertiban Serentak Secara Nasional dan 3 (tiga) Penertiban Mandiri oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dengan hasil realisasi yang dicapai sebesar 100% Penertiban SFR dan APT. Tahun 2025 tingkat capaian realisasi penertiban SFR dan APT ini diharapkan dapat terlaksana seluruhnya sehingga diperoleh capaian 100%.

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : Dapat dipastikan bahwa tim penertiban memiliki orientasi pelayanan yang tinggi terhadap masyarakat, terkhusus pemegang izin. Serta berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, memberikan edukasi tentang aturan, dan merespons gangguan dengan cepat.

Akuntabel : Diterapkan suatu sistem akuntabilitas yang jelas dalam setiap tahap penertiban dengan transparansi dalam tindakan yang diambil serta keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kompeten : Tim kerja yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Harmonis : Dibangun hubungan yang harmonis dan kolaboratif antara semua pihak terkait, termasuk otoritas regulasi, penegak hukum, pemegang izin.



Loyal : Dipahami dan diterapkan loyalitas terhadap prinsip-prinsip hukum dan aturan yang berlaku serta tindakan yang diambil oleh tim penertiban sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum.

Adaptif : Dibangun tim yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, baik dari segi teknologi maupun regulasi dan dilakukan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan yang diperlukan.

Kolaboratif : Dijalin kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penertiban. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, penertiban frekuensi radio dapat menjadi lebih efisien dan dapat diandalkan. Penerapan nilai-nilai ini dapat membentuk citra positif tentang upaya penertiban di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.

Indikator Kinerja 5

Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

LATAR BELAKANG

Dalam mendukung tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya Spektrum Frekuensi Radio, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal, efektif dan efisien serta meminimalisir penggunaan frekuensi radio yang tidak berizin dan atau menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference), Balmon SFR Kelas I Pekanbaru didukung sarana pengawasan Spektrum Frekuensi Radio. Terkait dengan sarana infrastruktur sistem perangkat, Balmon Pekanbaru telah dilengkapi dengan perangkat pendukung Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan alat monitoring/ukur diantaranya terdiri atas stasiun monitor tetap, stasiun monitor transportable, stasiun monitor bergerak, dan stasiun monitor jinjing (portable). Stasiun monitor tersebut, selanjutnya dikategorikan dalam perangkat utama dan perangkat pendukung. Kategori perangkat utama terdiri atas stasiun monitor Transportable (Site Tenayan Raya, Site Rumbai, Site Bengkalis, Site Bagan Siapi-api dan Site Dumai), dan stasiun monitor bergerak yaitu perangkat SMFR Bergerak Tipe 2 (Stasiun Mon-DF Bergerak). Sedangkan untuk kategori perangkat pendukung, dilengkapi dengan sejumlah perangkat pendukung monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio berupa stasiun monitor tetap dan mobile/ portable/ jinjing

Keberadaan perangkat pendukung Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan alat monitoring/ukur tersebut sangat diperlukan untuk kegiatan monitoring pendudukan spektrum frekuensi radio hingga penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Aktivitas monitoring spektrum frekuensi radio dengan melakukan proses operasi pemantauan berlangsung terus menerus dan tidak berhenti. Sehingga dukungan infrastruktur perangkat pendukung Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) dan alat monitoring/ukur tersebut diperlukan setiap saat. Sehubungan dengan hal tersebut, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru perlu memperhatikan fungsi pengoperasian dan pemanfaatan perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur tersebut agar dapat terjaga kehandalan dan kontinuitasnya. Sasaran kinerja ini bertujuan memastikan kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur dapat terawat dengan baik dan berfungsi optimal dan efektif dalam menunjang kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio diantaranya kegiatan observasi, pengukuran, inspeksi serta identifikasi dan deteksi.

CAPAIAN KINERJA

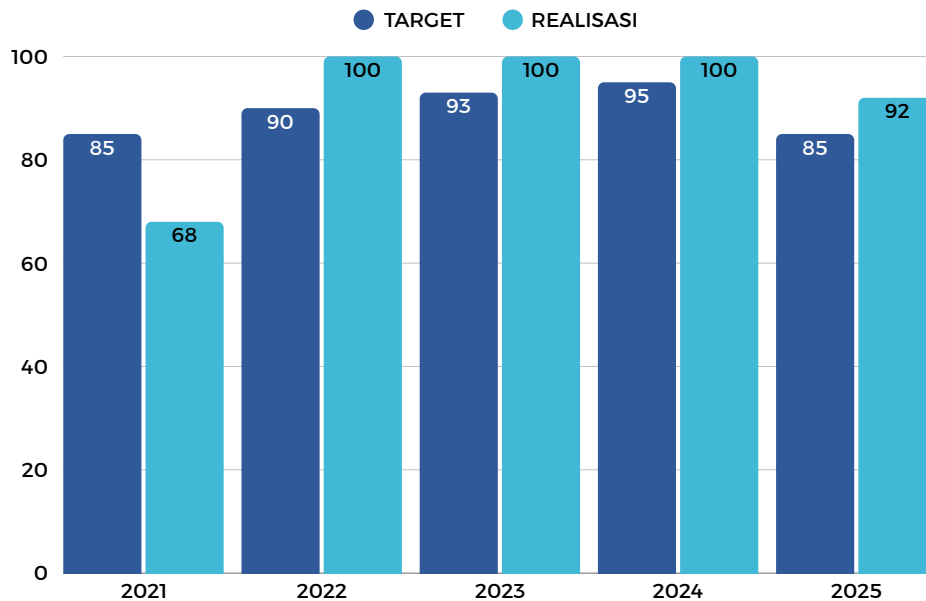
Pada tahun 2025 Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki sasaran kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur sebesar 85%. Rutinitas kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur diperlukan untuk capaian kinerja tersebut.

Dari laporan Service Level Agreement (SLA) Balmon SFR Kelas I Pekanbaru untuk tahun 2025, kondisi dari seluruh perangkat SMFR dan alat monitoring/ukur tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut.



Grafik 3.3 Kondisi Perangkat Monitoring dan Alat Ukur SMFR

Pada grafik di atas menunjukkan persentase berfungsinya perangkat SMFR dan alat monitoring/ukur yang terdiri dari perangkat utama dan perangkat pendukung yang menunjang kegiatan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru di setiap bulan pada tahun 2025. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi persentase berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru pada tahun 2025 adalah sebesar 92%. Dengan demikian, berdasarkan Perjanjian Kinerja Balmon SFR Kelas I Pekanbaru tahun 2025 dimana persentase berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT ditetapkan target kinerjanya adalah 85%. Sehingga dapat diketahui capaian kinerja persentase berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur Balmon SFR Kelas I Pekanbaru pada tahun 2025 adalah sebesar 92%. Realisasi dan capaian persentase berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT melebihi target



Grafik 3.4 Capaian Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT Tahun 2020 - 2025

ANALISIS

Dalam pencapaian kinerja berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada tahun 2025 dengan melalui sejumlah pihak ketiga terhadap perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur. Perangkat SMFR dan alat monitoring/ukur yang dilakukan perbaikan dan pemeliharaan merupakan unit perangkat utama dan pendukung baik stasiun monitor tetap, transportable, bergerak maupun portable/jinjing.

Anggaran yang tersedia untuk memastikan seluruh perangkat monitoring dan stasiun monitor frekuensi radio di Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dapat bekerja dengan baik sebesar Rp. 817.601.000,- dan sampai akhir tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp. 644.321.704,- (78,81%).

DAMPAK

Keberlangsungan operasional dan efektivitas fungsi monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan kestabilan spektrum frekuensi radio. Sebagai bagian integral dari Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, stasiun ini bertanggung jawab dalam memastikan bahwa penggunaan frekuensi radio tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mencegah adanya gangguan dan penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif terhadap berbagai sektor.

REKOMENDASI

Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur menjadilah satu bagian yang sangat frekuensi radio di wilayah kerja UPT seeara optimal, efektif dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya spektrum efisien. Sehingga performa yang ditunjukkan saat ini dapat ditingkatkan atau minimal dapat dipertahankan di tahun selanjutnya. Kendala yang diperoleh pada stasiun monitor transportable menjadi perhatian dan mendesak untuk ditindaklanjuti Balmon SFR Kelas I Pekanbaru khususnya pada kendala jaringan internet dan sumber energi listrik. Untuk tahun selanjutnya, Balmon Pekanbaru perlu menemukan dan menentukan alternatif lain terhadap jaringan internet dan sumber energi listrik stasiun monitor transportable misalnya menggunakan energi listrik terbarukan.

TINDAK LANJUT

Untuk menjaga konsistensi dan peningkatan kinerja berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur, dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang berkesinambungan. Tindak lanjut pada setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi diharapkan dalam bentuk rencana aksi pemeliharaan atau perbaikan perangkat pendukung SMFR dan Alat/monitoring/ukur maupun pengambilan kebijakan dalam rangka optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio. Dari evaluasi terhadap pengoperasian dan pemanfaatan stasiun monitor transportable di tahun

sebelumnya, strategi optimalisasi terhadap perangkat Stasiun Monitor Transportable berhasil dilakukan oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru di tahun 2025. Tujuannya agar perangkat dapat berfungsi optimal dan efektif dalam menunjang kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio di Wilayah Provinsi Riau

EFISIENSI

Beberapa upaya efisiensi yang dilakukan dalam berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT antara lain memaksimalkan sistem kerja dan peningkatan pengawasan pekerjaan sehingga mendapat hasil yang lebih optimal. Disamping itu, peningkatan dilakukan pada beberapa bagian, seperti peningkatan jumlah peralatan ukur/tes yang digunakan dalam pengecekan dan pemeriksaan perangkat SMFR misalnya pengadaan signal generator. Serta Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terutama fungsional pengendali frekuensi radio yang penugasannya berkaitan dengan peningkatan fungsi perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring. Frekuensi radio merupakan infrastruktur vital dalam layanan komunikasi, mulai dari jaringan seluler, siaran televisi, radio publik, hingga komunikasi darurat. Terjaganya operasional monitoring, penyelenggara telekomunikasi dapat beroperasi tanpa gangguan yang disebabkan oleh interferensi atau pemanfaatan frekuensi ilegal.

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : Melalui kebijakan optimalisasi penggunaan perangkat monitoring SMFR untuk meningkatkan fungsinya yang optimal, efektif dan efisien dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan instansi terkait dalam mendukung perencanaan pembangunan bidang spektrum frekuensi radio.

Akuntabel : Keberhasilan capaian kinerja berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur melalui kegiatan pemeliharaan perangkat monitoring, merupakan wujud tanggung jawab, kejujuran dan integritas yang tinggi terhadap kepercayaan yang diberikan dalam pengelolaan barang milik negara.

Kompeten : Kegiatan dilakukan dalam mewujudkan capaian kinerja berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur senantiasa didukung oleh tim kerja yang terdiri dari pengendali frekuensi yang kompeten dan selalu meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta workshop/ sosialisasi yang terkait dengan bidang tugasnya.

Harmonis : Capaian kinerja berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur terwujud dalam lingkungan kerja yang kondusif, saling bekerjasama dan sikap toleransi yang tinggi ditengah latar belakang yang berbeda- beda.

Loyal : Tim kerja dalam mewujudkan capaian kinerja berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur memiliki dedikasi tinggi, senantiasa menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan sebagai ASN dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Adaptif : Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tim kerja cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan organisasi dan perkembangan teknologi serta senantiasa berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam mewujudkan sasaran kinerja.

Kolaboratif : Tim kerja dalam melaksanakan kegiatan mampu membangun kerjasama yang bersinergi baik internal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru maupun eksternal

Indikator Kinerja 6

Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

LATAR BELAKANG

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memiliki peran strategis dalam mendukung terselenggaranya pengelolaan spektrum frekuensi radio serta pengawasan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi secara tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan bagian integral dari upaya menjaga ketersediaan, kualitas, dan keamanan pemanfaatan sumber daya telekomunikasi guna mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, UPT Balai Monitor melaksanakan kegiatan monitoring dan penertiban Spektrum Frekuensi Radio serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan/atau terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, standar teknis, dan penggunaan spektrum frekuensi radio. Pelanggaran yang ditemukeni dari hasil monitoring dan penertiban tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif, termasuk sanksi berupa denda administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dan pembinaan kepada pengguna spektrum dan perangkat telekomunikasi.

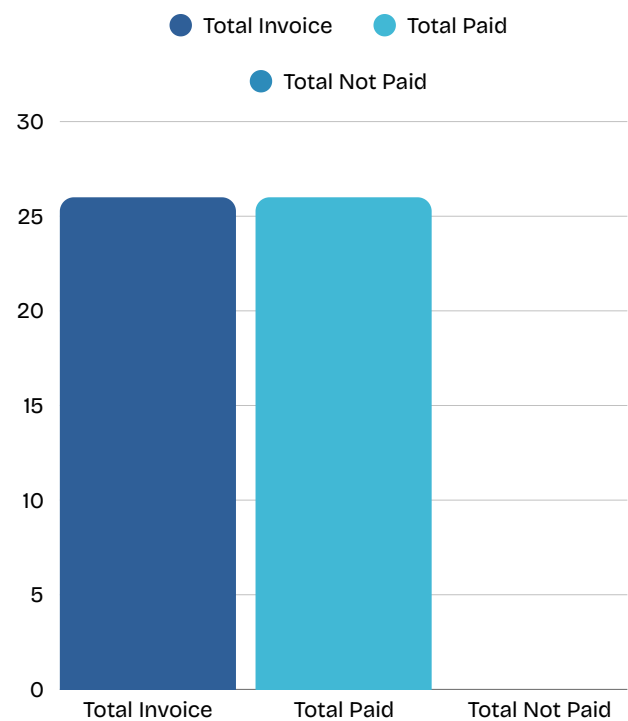
Seiring dengan semakin meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi, kompleksitas pengawasan dan penegakan kepatuhan juga semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanganan sanksi denda administratif yang tidak hanya berfokus pada penerbitan sanksi, tetapi juga pada efektivitas tindak lanjut terhadap invoice denda yang telah diterbitkan, termasuk proses klarifikasi, konfirmasi, pemberian peringatan, hingga penyelesaian melalui pembayaran atau mekanisme lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif pada Tahun 2025 disusun sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana UPT Balai Monitor, khususnya UPT Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan secara efektif dan akuntabel. Indikator ini tidak hanya merefleksikan tingkat kepatuhan Wajib Bayar terhadap kewajiban pembayaran denda administratif, tetapi juga menggambarkan kinerja UPT dalam melakukan penanganan aktif atas setiap invoice denda administratif melalui berbagai tahapan tindak lanjut yang terstruktur.

Dengan adanya indikator kinerja tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Balai Monitor dapat terukur secara objektif, serta mendorong peningkatan kualitas pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum di bidang Spektrum Frekuensi Radio serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Selain itu, indikator ini juga menjadi instrumen pengendalian kinerja dalam rangka mendukung optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor sumber daya dan perangkat pos dan informatika, sekaligus meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum para pengguna spektrum dan perangkat telekomunikasi.

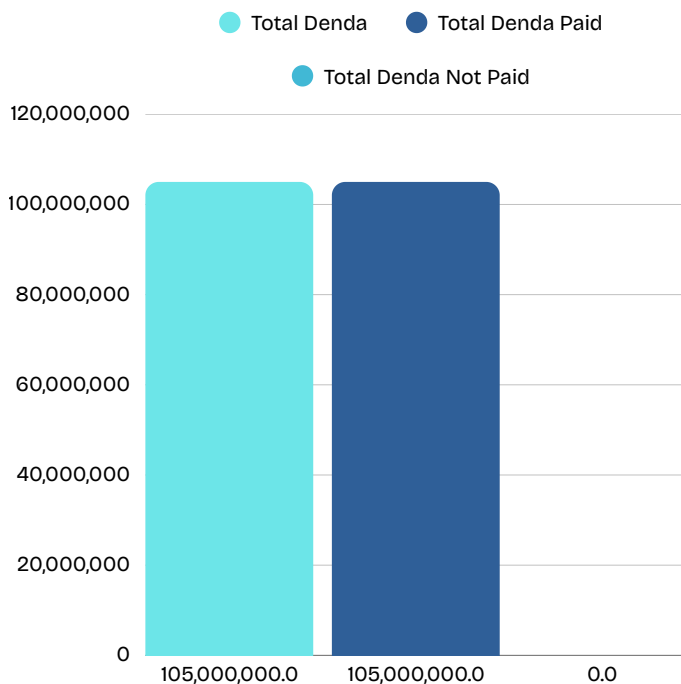
CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2025, UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pekanbaru melaksanakan penanganan sanksi denda administratif sebagai tindak lanjut langsung atas kegiatan monitoring dan penertiban Spektrum Frekuensi Radio serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Penanganan sanksi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung pada saat penertiban, sehingga seluruh kewajiban denda administratif dapat diselesaikan tanpa penundaan. Sepanjang periode pelaporan, UPT Balmon Pekanbaru menerbitkan sebanyak 26 invoice sanksi denda administratif dengan total nilai tagihan sebesar Rp104.596.800,-. Seluruh invoice tersebut telah dibayarkan lunas, sehingga tidak terdapat invoice denda administratif yang belum terbayar.



Grafik 3.5 Invoice Penanganan Denda Administratif

Dengan kondisi tersebut, Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif UPT Balmon SFR Kelas I Pekanbaru pada Tahun 2025 mencapai 100%, baik dari sisi jumlah invoice maupun dari sisi nilai nominal denda administratif. Capaian ini telah melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada seluruh periode pelaporan. Penerapan mekanisme penyelesaian pembayaran denda administratif secara langsung pada saat penertiban merupakan langkah strategis UPT Balmon Pekanbaru dalam menyederhanakan proses kerja, meningkatkan efektivitas penegakan ketentuan, serta memastikan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara tepat waktu dan akuntabel.



Grafik 3.6 Total Penanganan Denda Administratif

ANALISIS

Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif UPT Balmon SFR Kelas I Pekanbaru pada Tahun 2025 mencapai 100%, baik dari sisi jumlah invoice maupun nilai nominal denda administratif. Capaian ini didukung oleh penerapan mekanisme pembayaran denda secara langsung pada saat penertiban dan penerbitan SPPD, sehingga seluruh kewajiban Wajib Bayar dapat diselesaikan tanpa penundaan. Mekanisme tersebut meningkatkan efektivitas penegakan ketentuan, menghilangkan potensi piutang PNBP, serta menyederhanakan proses kerja karena tidak diperlukan tahapan penagihan lanjutan seperti reminder atau pelimpahan ke KPKNL. Pelaksanaan penanganan Sanksi Denda Administratif tidak memerlukan anggaran tersendiri karena merupakan tindak lanjut dari temuan hasil penertiban yang dilaksanakan.

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru pada tahun 2025 mengeluarkan sebanyak 26 invoice denda dengan total tagihan Rp. 104.596.800,-, seluruh tagihan sudah dibayar capaian kegiatan 100%.

DAMPAK

Penerapan mekanisme pembayaran sanksi denda administratif secara langsung pada saat penertiban memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas penegakan ketentuan di bidang Spektrum Frekuensi Radio serta Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Seluruh sanksi denda administratif yang ditetapkan dapat diselesaikan pada saat yang sama, sehingga Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif mencapai 100%, baik dari sisi jumlah invoice maupun nilai nominal. Selain memastikan penerimaan PNBP diterima secara tepat waktu, mekanisme ini juga akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum Wajib Bayar.

REKOMENDASI

Mekanisme pembayaran sanksi denda administratif secara langsung pada saat penertiban direkomendasikan untuk terus diterapkan sebagai pendekatan utama dalam penanganan sanksi denda administratif karena terbukti efektif dan efisien.

Praktik ini dapat dipertimbangkan sebagai model atau best practice dalam penanganan sanksi denda administratif di lingkungan UPT Balai Monitor lainnya, dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan PNBP.

TINDAK LANJUT

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru akan terus mempertahankan serta terus mengoptimalkan seluruh mekanisme pembayaran langsung dalam setiap kegiatan penertiban, serta memastikan tahapan penetapan dan pembayaran sanksi denda administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku. Selain itu, UPT akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna menjaga konsistensi dan mengantisipasi potensi kendala di lapangan



EFISIENSI

Penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif secara langsung berdampak pada efisiensi proses kerja, karena menghilangkan kebutuhan tahapan penagihan lanjutan seperti penyampaian surat reminder, klarifikasi berulang, serta pelimpahan ke KPKNL. Dengan berkurangnya beban administrasi lanjutan, penggunaan waktu, tenaga, dan biaya operasional dapat dioptimalkan, sehingga sumber daya UPT dapat lebih difokuskan pada pelaksanaan kegiatan monitoring dan penertiban berikutnya.

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : UPT Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memberikan pelayanan yang cepat, jelas, dan transparan kepada pengguna spektrum dan perangkat telekomunikasi. Dalam penanganan sanksi denda administratif, petugas memberikan penjelasan yang komprehensif terkait jenis pelanggaran, dasar hukum, besaran denda, serta mekanisme pembayaran, sehingga Wajib Bayar memperoleh kepastian layanan dan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya.

Akuntabel : Seluruh pelaksanaan monitoring, penertiban, penetapan, dan pembayaran sanksi denda administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku. Setiap tahapan kegiatan didukung dengan dokumentasi dan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam pengelolaan PNBP, sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja UPT.

Kompeten : Balmon SFR Kelas I Pekanbaru terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pemahaman regulasi, SOP, dan penggunaan aplikasi pendukung penanganan sanksi denda administratif. Kompetensi petugas tercermin dalam kemampuan melakukan identifikasi pelanggaran, penghitungan denda sesuai formula, serta pelaksanaan penertiban yang profesional dan tepat sasaran.

Harmonis : Dalam melaksanakan tugas, UPT Balmon SFR Kelas I Pekanbaru membangun hubungan kerja yang harmonis baik secara internal maupun eksternal. Sinergi antar pegawai dan koordinasi dengan Wajib Bayar serta pemangku kepentingan lainnya dilakukan dengan menjunjung tinggi sikap saling menghargai, komunikasi yang baik, dan penyelesaian permasalahan secara persuasif dan profesional

Loyal : UPT Balmon SFR Kelas I Pekanbaru menunjukkan loyalitas dengan melaksanakan kebijakan dan arahan pimpinan serta mendukung pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Loyalitas tercermin dalam komitmen untuk menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan optimalisasi PNPB sebagai bagian dari kepentingan negara dan masyarakat.

Adaptif : Balmon SFR Kelas I Pekanbaru mampu beradaptasi terhadap dinamika kebijakan, regulasi, dan perkembangan teknologi. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan mekanisme pembayaran denda administratif secara langsung pada saat penertiban sebagai bentuk penyesuaian proses kerja yang lebih efektif, efisien, dan responsif pada kebutuhan di lapangan.

Kolaboratif : Pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban dilakukan melalui kolaborasi yang baik dengan Direktorat Pengendali Infrastruktur Digital, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini mendukung kelancaran penanganan pelanggaran, percepatan penyelesaian sanksi denda administratif, serta peningkatan kualitas pengawasan di wilayah kerja UPT Balmon SFR Kelas I Pekanbaru



Indikator Kinerja 7

Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

LATAR BELAKANG

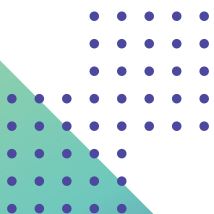
Penyelenggaraan layanan telekomunikasi yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, pemerintahan, dan perekonomian nasional. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi suara dan data, diperlukan upaya pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara telah memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan. Sebagai bagian dari fungsi pengendalian dan pengawasan infrastruktur digital, kegiatan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi dilaksanakan untuk memperoleh data objektif terkait kinerja jaringan telekomunikasi di wilayah kerja.

Pengukuran ini bertujuan untuk menilai tingkat pemenuhan parameter kualitas layanan yang meliputi aspek aksesibilitas, keterhubungan, keberlangsungan layanan, serta kualitas transmisi data yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Pengukuran ini bertujuan untuk menilai tingkat pemenuhan parameter kualitas layanan yang meliputi aspek aksesibilitas, keterhubungan,



Kegiatan ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal terkait pengendalian kualitas layanan telekomunikasi, khususnya dalam rangka monitoring kinerja penyelenggara jaringan; evaluasi pemenuhan standar layanan; serta penyediaan data faktual sebagai dasar pengambilan kebijakan dan rekomendasi perbaikan layanan.



Static test merupakan pengambilan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler secara tetap di titik-titik yang ditentukan pada 1 (satu) kota atau kabupaten yang berfokus di pusat pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, pemukiman, dan point of interest lain yang diperlukan.

Tabel 3.6 Metode pemantauan standar kualitas layanan Static Test

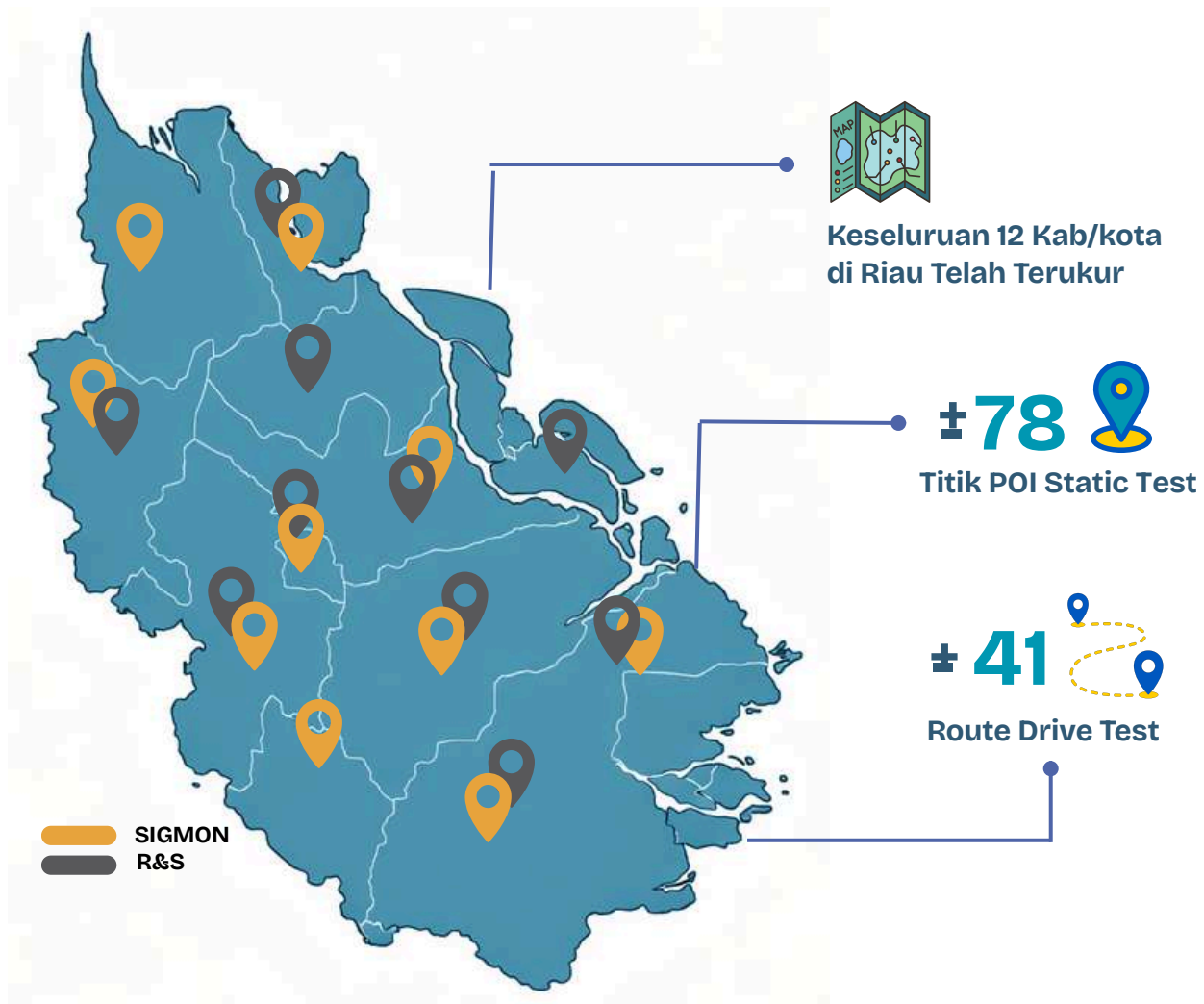
Jenis Pengukuran	
1.	<i>Point of interest</i> pengukuran reguler
2.	<i>Point of interest</i> pengukuran insidentil (sesuai kebutuhan)
Jenis Layanan yang Diukur	
1.	<i>Youtube Streaming</i>
2.	<i>Browsing</i>
3.	<i>Speedtest Crowdsourcing</i>
4.	<i>File Transfer Protocol DL & UL Test</i>
5.	<i>HTTP DL & UL Test</i>
6.	<i>Ping Test</i>
7.	<i>Whatsapp Call</i>
8.	<i>Whatsapp Message</i>

Drive Test merupakan pengambilan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau sarana transportasi umum dengan mengikuti rute yang telah ditetapkan. Rute tersebut meliputi jalan protokol, wilayah bisnis dan pemukiman, sarana transportasi umum, dan rute lain yang diperlukan. Metode ini dapat menjadi acuan kualitas layanan telekomunikasi di suatu lokasi kota atau kabupaten.

Tabel 3.7 Metode pemantauan standar kualitas layanan Drive Test

Jenis Pengukuran	
1.	<i>Drive Test Idle</i> (pengukuran di rute penghubung) a. Mengukur kuat sinyal jaringan bergerak seluler 2G/3G/4G b. Mengukur kualitas sinyal jaringan bergerak seluler 3G/4G
Jenis Layanan yang Diukur	
1.	<i>Youtube Streaming</i>
2.	<i>Browsing</i>
3.	<i>Speedtest Crowdsourcing</i>
4.	<i>File Transfer Protocol DL & UL Test</i>
5.	<i>HTTP DL & UL Test</i>
6.	<i>Ping Test</i>
7.	<i>Whatsapp Call</i>
8.	<i>Whatsapp Message</i>

CAPAIAN KINERJA



Gambar 3.8 Sebaran Pengukuran QOS

Dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional, Balai Monitor melakukan pengawasan intensif terhadap infrastruktur jaringan seluler yang menjadi tulang punggung komunikasi masyarakat. Pengukuran yang dilakukan di 12 kabupaten/kota dengan total sekitar 78 titik POI dan 41 route drivetest ini menunjukkan bahwa pengawasan kualitas layanan telah menjangkau seluruh wilayah administratif secara komprehensif. Langkah ini diambil guna memitigasi kesenjangan kualitas sinyal antarwilayah dan memastikan ketersediaan konektivitas yang stabil. Kegiatan ini mencakup pengukuran terhadap tiga operator seluler utama, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata, guna memantau performa jaringan di lapangan. Secara keseluruhan, rata-rata hasil pengukuran menunjukkan kualitas layanan yang stabil dan berada pada kategori Cukup Baik meskipun masih terdapat titik-titik dengan kecepatan jaringan yang sangat rendah.



Pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target yang ditetapkan. Kegiatan ini mencakup seluruh wilayah yang menjadi sasaran pengukuran, yaitu 80% dari jumlah kabupaten/kota di wilayah kerja UPT Balai Monitor.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

- Seluruh lokasi pengukuran kualitas layanan di 12 kabupaten/kota berhasil dilaksanakan sehingga telah melebihi target kabupaten yang ditetapkan;
- Seluruh parameter pengukuran kualitas layanan sesuai ketentuan berhasil dikumpulkan dan terdokumentasi;
- Data hasil pengukuran dapat diolah dan dianalisis sebagai bahan evaluasi kualitas layanan telekomunikasi.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja kegiatan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan indikator kinerja.

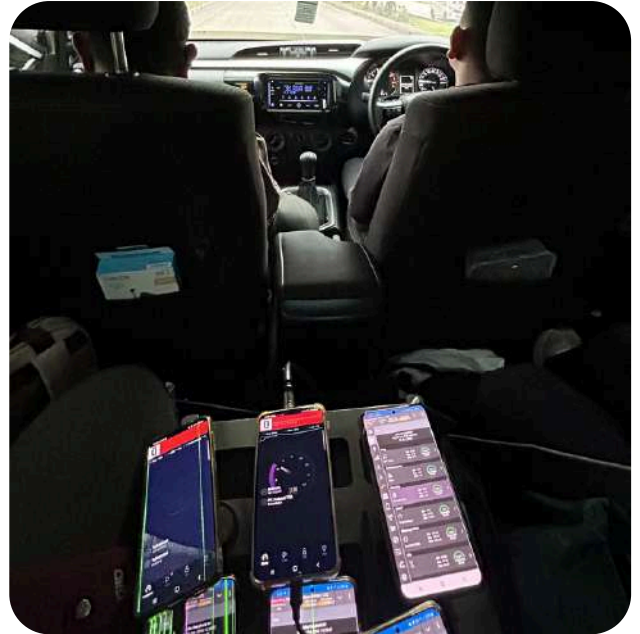
ANALISIS

Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengukuran, hingga pengolahan dan pelaporan data, dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Perencanaan yang matang
2. Penentuan wilayah, titik pengukuran, serta jadwal pelaksanaan dilakukan secara sistematis sehingga seluruh target wilayah dapat terjangkau sesuai rencana.
3. Kesiapan sumber daya
4. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan peralatan pengukuran yang memadai memungkinkan kegiatan pengukuran kualitas layanan dilaksanakan secara optimal.
5. Metodologi pengukuran yang terstandar
6. Pengukuran kualitas layanan dilakukan dengan metode dan parameter yang sesuai ketentuan, sehingga data yang dihasilkan bersifat objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Koordinasi dan kerja sama yang baik
8. Terjalinnya koordinasi internal tim serta komunikasi dengan pihak terkait mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan

Meskipun capaian kinerja telah tercapai secara optimal, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kualitas layanan telekomunikasi di lapangan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, kepadatan trafik, dan ketersediaan infrastruktur jaringan.

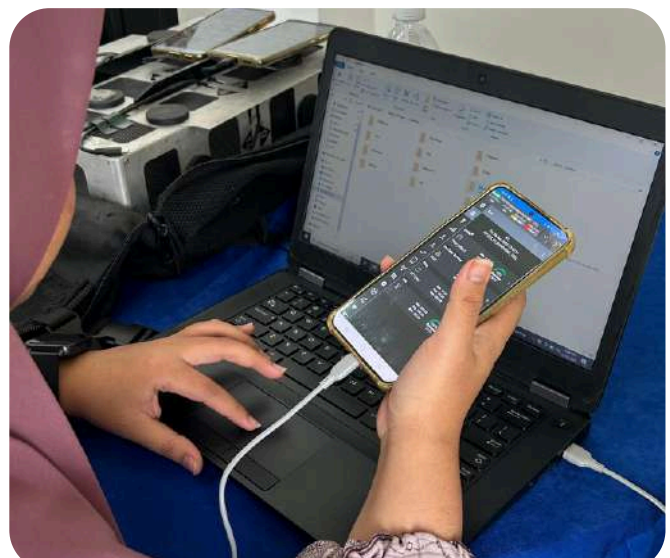
Pada tahun 2025 kegiatan pengukuran kualitas layanan belum mempunyai anggaran tersendiri. Untuk memenuhi target tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan maka kegiatan dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi dan Pemeriksaan Stasiun Radio.



DAMPAK

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif, antara lain:

- Penyediaan Data Kualitas Layanan yang Akurat dan Akuntabel Tersedianya basis data hasil pengukuran (drive test) yang objektif sebagai referensi valid dalam mengevaluasi performa jaringan seluler di wilayah Riau. Data ini berfungsi sebagai instrumen audit teknis untuk membandingkan realita di lapangan dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan.
- Peningkatan Pengawasan terhadap Penyelenggara Telekomunikasi Memperkuat fungsi kontrol Balmon Kelas I Pekanbaru dalam memastikan kepatuhan operator seluler terhadap regulasi.
- Jaminan Kualitas Layanan yang Optimal bagi Masyarakat Mendorong terciptanya konektivitas yang stabil dan minim gangguan (drop call atau blank spot) bagi pengguna akhir.



REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kualitas layanan, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain:

- Penyelenggara telekomunikasi diharapkan dapat melakukan optimalisasi jaringan pada wilayah dengan hasil pengukuran yang masih perlu ditingkatkan.
- Perlu dilakukan pengukuran kualitas layanan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan kualitas layanan kepada masyarakat.
- Peningkatan koordinasi antara UPT Balai Monitor dan penyelenggara telekomunikasi dalam menindaklanjuti hasil pengukuran.

TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, UPT Balai Monitor telah dan akan:

- Menyampaikan hasil pengukuran kualitas layanan kepada penyelenggara telekomunikasi terkait;
- Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara;
- Menjadikan hasil pengukuran sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan pengawasan selanjutnya.

EFISIENSI

Kegiatan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, baik dari sisi waktu, sumber daya manusia, maupun penggunaan anggaran. Perencanaan rute pengukuran dan pembagian tugas tim dilakukan secara optimal sehingga seluruh target wilayah dapat dicapai tanpa pemborosan sumber daya.

Pemanfaatan peralatan pengukuran yang tersedia secara maksimal juga mendukung tercapainya efisiensi pelaksanaan kegiatan.

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : memberikan pelayanan terbaik melalui pengawasan kualitas layanan telekomunikasi.

Akuntabel : seluruh kegiatan dan hasil pengukuran dapat dipertanggung jawabkan..

Kompeten : kegiatan dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kompetensi teknis di bidangnya.

Harmonis : terjalinnya kerja sama yang baik antar tim dan dengan pihak terkait.

Loyal : mendukung kebijakan dan tugas organisasi.

Adaptif : menyesuaikan metode dan pelaksanaan dengan kondisi lapangan.

Kolaboratif : bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi dan pemangku kepentingan lainnya.

Indikator Kinerja 8

Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

LATAR BELAKANG

Dengan adanya penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya diberikan kepada pengguna melalui mekanisme perizinan dengan kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun tidak seluruh pemegang izin memenuhi kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio tepat waktu, sehingga menimbulkan piutang BHP Frekuensi Radio yang berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan negara dan mencerminkan belum optimalnya tingkat kepatuhan pengguna. Untuk itu Balmon SFR Kelas I Pekanbaru tetap melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pembayaran SPP BHP dimaksud sebagai upaya penting untuk meningkatkan kepatuhan pengguna frekuensi radio, menjaga akuntabilitas pengelolaan PNBP, serta mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan berkelanjutan. Dalam rangka pencegahan atau mengurangi timbulnya piutang BHP Frekuensi, Radio yang disebabkan kelalaian klien/para pengguna frekuensi radio.

Petugas Balmon SFR Kelas I Pekanbaru akan menghubungi klien (pihak perusahaan atau instansi pemerintah) melalui WhatsApp, telepon, email terkait pemberitahuan SPP BHP pada aplikasi billing ISR serta membantu klien dalam hal penguduhan Tagihan SPP BHP tersebut dan petugas juga melakukan kunjungan langsung terhadap klien/para pengguna frekuensi radio yang memiliki potensi menjadi piutang negara karena keterlambatan pembayaran yang telah menjadi Surat Peringatan (SP) 1/2/3 dan SP terakhir.

Untuk mewujudkan penanganan atau pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan upaya pengurusan piutang negara secara optimal.

Namun demikian, tidak seluruh piutang negara dapat diselesaikan melalui Pencegahan dan penagihan, baik karena kondisi debitur maupun keterbatasan objek. Atas kondisi tersebut, diperlukan mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengurusan piutang negara yang telah dilakukan secara maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



SASARAN KINERJA

Sasaran kinerja yang dimaksud adalah melakukan kunjungan ke lokasi alamat dan keberadaan Penanggung Hutang/Wajib Bayar BHP Frekuensi Radio sesuai data perizinan di wilayah kerja Balmon SFR Kelas I Pekanbaru untuk melakukan klarifikasi pembayaran atas tunggakan BHP Frekuensi Radio sebelum jatuh tempo pembayaran yang sudah ditentukan. distribusi SPP BHP Frekuensi Radio kepada para Wajib Bayar BHP Frekuensi Radio yang dikirimkan melalui WhatsApp, telepon dan email yang terdaftar.

CAPAIAN KINERJA

Telah terealisasinya capaian kinerja dari Balmon SFR Kelas I Pekanbaru 100% dalam kegiatan penanganan piutang dengan melaksanakan penyampaian dokumen SPP/Rincian tagihan kepada wajib bayar secara rutin dengan total Penanganan Piutang yang dilaksanakan sebanyak 253 SPP BHP Frekuensi Radio tahun 2025 yg ada di Provinsi Riau dengan target 253 SPP BHP Frekuensi Radio. Berikut data Penyampaian dokumen SPP/Rincian Tagihan dan Surat Tagihan(ST) pada Tahun 2025 :

Tabel 3.8 Pendistribusian SPP dan ST UPT Pekanbaru Tahun 2025

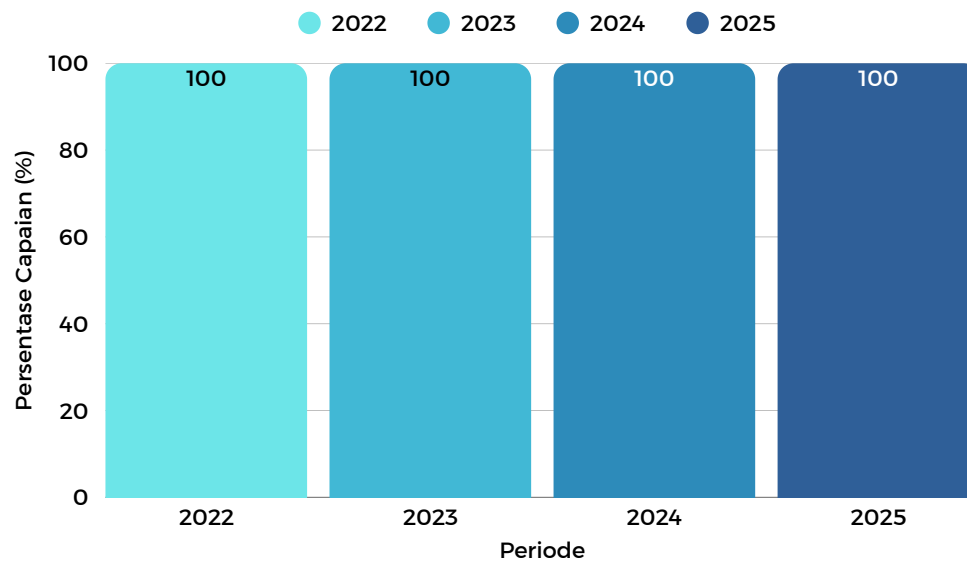
NO	BULAN	JUMLAH PENERBITAN TAGIHAN BHP			JUMLAH BHP FREKUENSI RADIO (RP)
		SPP	ST	Total	
1	Januari	14	5	19	Rp. 26.231.955
2	Februari	20	5	25	Rp. 10.887.277
3	Maret	4	7	11	Rp. 19.489.795
4	April	7	7	14	Rp. 24.722.419
5	Mei	12	6	18	Rp. 25.675.885
6	Juni	11	9	20	Rp. 22.880.385
7	Juli	11	9	20	Rp. 25.203.718
8	Agustus	15	9	24	Rp. 32.797.746
9	September	15	4	19	Rp. 17.094.364
10	Oktober	26	4	30	Rp. 46.967.192
11	November	20	6	26	Rp. 43.082.538
12	Desember	20	7	27	Rp. 42.731.400
Total		175	78	253	Rp. 367.764.674

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan pendistribusian Surat Perintah Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan negara dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Dalam pelaksanaannya, jumlah SPP yang telah diterbitkan dan didistribusikan mencapai 175 SPP, yang mencakup SPP baru bagi pengguna frekuensi yang baru mendapatkan izin serta SPP perpanjangan bagi pengguna yang melakukan perpanjangan izin spektrum frekuensinya. Selain itu, sebagai langkah untuk memastikan kepatuhan pengguna dalam memenuhi kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio, juga telah diterbitkan sebanyak 78 Surat Tagihan (ST) kepada pengguna yang belum menyelesaikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, jumlah tagihan BHP Frekuensi Radio Balai Monitor SFR Kelas I Pekanbaru selama tahun 2025 mencapai total Rp. 367.764.674,-. Capaian ini menunjukkan komitmen Balmon Samarinda dalam memastikan tertib administrasi pembayaran BHP Frekuensi Radio. Adapun kegiatan pencegahan dan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio disertai dengan pelaksanaan PPNTO yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 5 (lima) kali kegiatan yaitu :

Tabel. 3.9 Rekapitulasi Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Piutang

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1	Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	11 s/d 15 Februari 2025	Kab. Bengkalis (Duri), Kota Dumai dan Kab. Siak Sri Indrapura
2	Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	11 s/d 15 Maret 2025	Kota Pekanbaru
3	Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	09 s/d 12 September 2025	Kota Dumai
4	Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	28 s/d Oktober 2025	Kab. Siak dan Kab. Bengkalis (Duri)
5	Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	15 s/d 19 Desember 2025	Kota Pekanbaru

Pada Tahun 2025 Balmon SFR kelas I Pekanbaru melakukan Koordinasi Penanganan Piutang dengan pihak KPKNL Pekanbaru ataupun KPKNL Dumai sebanyak 3 kali. Serta melakukan Pengumpulan Dokumen Penghapusan Mutlak telah dilaksanakannya kegiatan tersebut di Provinsi Riau sebanyak 6 klien. Dan melaksanakan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) di Kota Dumai, Kab. Bengkalis (Duri), Kab. Siak Sri Indrapura dan Kota Pekanbaru sebanyak 14 klien. Berikut terlampir data pelaksanaan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) di tahun 2025 (4 kegiatan) :



Grafik 3.7 Perbandingan Capaian di periode sebelumnya

Tabel 3.10 Rekapitulasi Kegiatan PPNT0 UPT Pekanbaru

NO	BULAN	WAKTU	HASIL
1	kunjungan kepada Waba PPNT0 di Kota Dumai (CV. Makmur Advertising)	September	Debitur masih ada namun pada hari kunjungan tidak ada di tempat dan Tim akan terus berkomunikasi dengan aparat setempat terkait keberadaan debitur
2	kunjungan kepada Waba PPNT0 di Kab. Bengkalis, Duri - PT. Surya Bandar Kencana - PT. Truba Jaya Engenering	Oktober	Tim sudah melakukan kunjungan kelapangan sesuai alamat waba namun perusahaan sudah tidak beroperasi lagi serta tim juga melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait keberadaan waba
3	kunjungan kepada Waba PPNT0 di Kab. Siak Sri Indrapura (CV. Ridho)	November	Tim sudah melakukan kunjungan kelapangan sesuai alamat waba namun perusahaan sudah tidak beroperasi lagi serta tim juga melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait keberadaan waba
4	kunjungan kepada Waba PPNT0 di Kota Pekanbaru - PT. Tekno Api Petrolindo - PT. Suara Riau Mandiri - PT. Sinar Ansari Maju - PT. Riau Airlines - CV.Adithia - PT. Citra Purnama Lestari - PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) - PT. Radio Esti Elita	Desember	Hasil Kegiatan PPNT0 di Kota Pekanbaru - Tim sudah melakukan kunjungan lapangan ke 8 waba PPNT0 sesuai alamat waba namun 7 waba/perusahaan sudah tidak beroperasi lagi serta tim juga melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait keberadaan waba. - PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) berniat melakukan pembayaran piutang negara yang ditagihkan. - PT. Radio Esti Elita membayar piutang negara sebelum tanggal 31 desember 2025.

ANALISIS

Dari tabel Peyampaian/Pendistribusian SPP dan ST UPT Pekanbaru maka dapat dianalisis sebagai berikut. Total SPP yang diterima sepanjang tahun 2025 adalah 253 SPP BHP Frekuensi Radio jumlah SPP yang didistribusikan 175 dan Surat Tagihan (ST) yang didistribusikan sebanyak 78. Capaian persentase untuk setiap bulan adalah 100%, menunjukkan bahwa jumlah yang diterima selalu sama dengan jumlah yang terdistribusi.

Ini merupakan indikator positif dari efisiensi distribusi Pola distribusi bulanan SPP dan ST relatif konsisten setiap bulan, dengan variasi yang kecil. Ini menunjukkan jumlah tagihan khusus untuk dinas bergerak darat memiliki jumlah pengguna yang tidak terlalu banyak, karena sebagian besar tagihan SPP dan ST masih didistribusikan secara terpusat berdasarkan tempat atau alamat penagihan yang didaftarkan di sistem.

Meskipun demikian Balai Monitor SFR Kelas I Pekanbaru tetap memiliki konsistensi dalam kegiatan distribusi selama tahun 2025 tersebut. Dan juga pada tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas I Pekanbaru telah berkoordinasi kepada Pemerintah setempat terkait pelaksanaan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) yang telah dilaksanakan dengan maksimal.

Dalam mendukung tercapainya target Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 41.966.000,-. Sampai akhir pelaksanaan kegiatan anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp.37.409.000,- (89,14%). Dengan penggunaan anggaran tersebut Balmon SFR Kelas I Pekanbaru mampu memenuhi target yang ditetapkan.

INOVASI

Adanya konsistensi distribusi serta menerapkan strategi distribusi yang konsisten dan terencana setiap bulan yang dilakukan melalui berbagai media yaitu pendistribusian melalui media sosial, Whatsapp, dan kunjungan langsung. Selain itu, Koordinasi dengan Klien dengan cara meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk memahami kendala yang dialami oleh mereka serta Balmon SFR Kelas I Pekanbaru konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses distribusi tagihan.

DAMPAK

Dengan adanya sistem pemantauan yang terstruktur, penyelenggara yang belum memenuhi kewajiban dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif atau hukum. Spektrum frekuensi merupakan asset negara yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Penanganan piutang yang efektif memastikan bahwa pendapatan Negara dari biaya penggunaan frekuensi tetap terjaga, sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pengawasan spektrum yang lebih baik.



REKOMENDASI

- Balmon SFR Kelas I Pekanbaru khususnya bagian pelayanan perizinan melakukan analisis mendalam terhadap kendala distribusi SPP BHP Frekuensi dan Surat Tagihan (ST) dan mengidentifikasi serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur distribusi SPP BHP Frekuensi dan ST sesuai dengan kebutuhan klien.
- Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan klien untuk memahami kendala mulai dari tahap pengiriman SPP BHP Frekuensi, kendala terkait penggunaan aplikasi e-billing ISR serta kendala yang dihadapi terkait perubahan PIC klien yang menyebabkan sulitnya mengakses akun e-billing ISR milik klien/ pengguna frekuensi radio tidak terpenuhinya komitmen pembayaran yang wajib mereka tunaikan dan mengevaluasi strategi distribusi yang ada serta menyesuaikannya dengan perubahan lingkungan kerja atau kebijakan yang mungkin terjadi sehingga strategi distribusi SPP BHP Frekuensi tetap relevan dan efektif.
- Melakukan pengumpulan data yang lebih rinci dan analisis lebih lanjut terhadap seluruh proses distribusi SPP BHP Frekuensi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi tren dan pola yang memerlukan perhatian khusus

TINDAK LANJUT

- Bentuk pemanfaatan yang telah ditindaklanjuti antara lain:
- Reduksi Jumlah Piutang Tertunda Tindakan proaktif yang diambil oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru yang terus memonitor perkembangan pembayaran Piutang SPP BHP Frekuensi Radio berhasil mengurangi jumlah piutang yang tertunggak. Efisiensi Proses Pembayaran.
- Pemanfaatan sistem pembayaran melalui Host to Host melalui kerjasama Ditjen Infrastruktur Digital dengan Bank tertentu telah meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pemantauan piutang SPP BHP karena laporan langsung masuk ke sistem informasi pembayaran Ditjen Infrastruktur Digital.
- Peningkatan Kepatuhan Pihak Debitur dengan kegiatan monitoring penanganan piutang oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru, maka telah berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan pihak debitur dalam pembayaran tepat waktu

EFISIENSI



Melalui pemanfaatan sistem pembayaran melalui Host to Host (H to H) dan melalui kerjasama Ditrekorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan Bank tertentu telah meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pemantauan piutang SPP BHP karena laporan langsung masuk ke sistem informasi pembayaran Ditrekorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru serta klien juga lebih mudah untuk melakukan pemantauan pembayaran melalui aplikasi BILLING ISR yang telah bekerja secara efektif dan efisien. Serta pemanfaatan aplikasi MySpectra membantu klien serta Balmon SFR Kelas I Pekanbaru untuk dapat memantau terbitnya Izin Stasiun Radio.

Selain itu, sistem pembayaran ini memudahkan bagi klien untuk melakukan efisiensi sumber daya manusia karena pembayaran telah dapat dilakukan secara online melalui gadget serta sarana yang telah disiapkan oleh Bank tertentu yang telah bekerjasama dengan Ditrekorat Jenderal Infrastruktur Digital dari dahulu.



IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi pelayanan : melayani dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan klien/wajib bayar agar dapat menerima dokumen SPP/ST atau informasi terkait tagihan, bersikap ramah, tanggap, berusaha memberikan solusi terbaik, dan 'update' terhadap pembaharuan sistem.

Akuntabel : memberikan informasi yang sebenarnya, rutin mengecek dan mengunduh tagihan, cermat, disiplin mendistribusikan setiap dokumen yang terbit agar sampai ke alamat wajib bayar sesuai aturan dan berintegritas.

Kompeten : meningkatkan kemampuan dengan banyak menggali informasi dan pengetahuan terutama aturan dan proses bisnisnya.

Harmonis : menghargai dan menghormati setiap klien/wajib bayar, mengetahui dan semaksimal mungkin memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, jika perlu berkolaborasi dengan tim kerja yang lain.

Loyal : memberikan layanan sesuai prinsip dan aturan kenegaraan dan menjaga nama baik khususnya Balai Monitor SFR Kelas I Pekanbaru.

Adaptif : terus belajar dan segera menyesuaikan diri terhadap perubahan yang sifatnya membawa kemajuan karena informasi selalu berkembang terutama memasuki era digitalisasi.

Kolaboratif : selalu terbuka terhadap saran dan masukan dan bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan baik intern Balai Monitor SFR Kelas I Pekanbaru, Ditrekorat Jenderal Infrastruktur Digital, KPKNL wilayah Riau dan pemerintah Provinsi Riau



Indikator Kinerja 9

Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

LATAR BELAKANG

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru berkomitmen memberikan layanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, terutama dalam izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR). Sesuai dengan Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, penyelenggaraan layanan ini harus melibatkan masyarakat agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat secara proaktif. Sosialisasi juga merupakan bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi perlu dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, program, maupun regulasi yang berlaku, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

CAPAIAN KINERJA

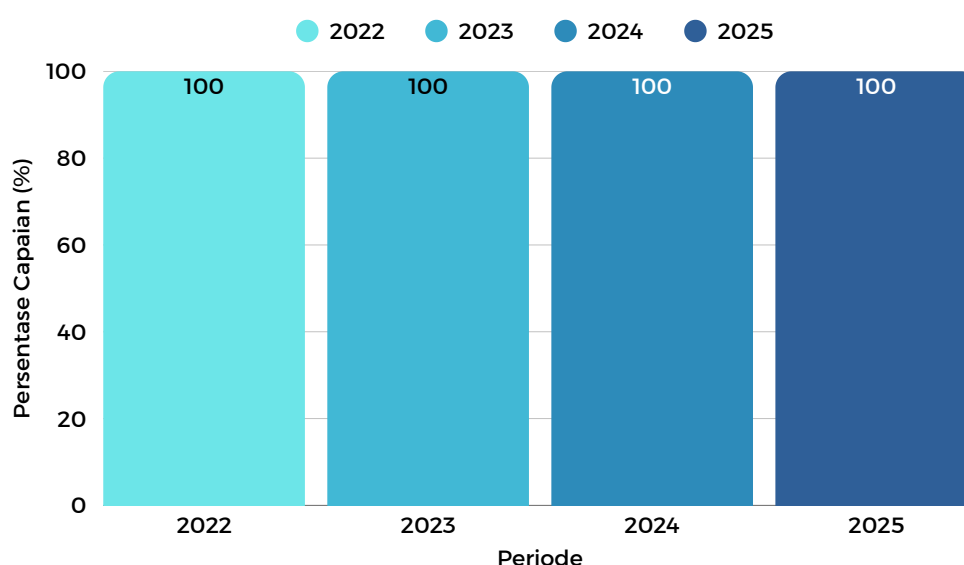
Indikator Kinerja pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh UPT diukur berdasarkan kegiatan pelaksanaan Sosialisasi pelayanan publik dengan pelaksanaan satu kali dan minimal peserta 30 orang dimana pelaksanaan tersebut ditargetkan 100 %.



Dalam rangka pelaksanaan capaian maka tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru telah kegiatan Sosialisasi pelayanan publik secara offline yang dihadiri oleh pengguna frekuensi radio yang ada di Provinsi Riau dengan total peserta 50 orang dari 12 Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Capaian ini sesuai dengan target capaian dengan persentase terhadap target sebesar 100%.

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 06 November 2025 di Kota Pekanbaru dengan mengusung tema “Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri” Kegiatan ini dihadiri oleh Peserta yang berasal dari berbagai sektor, termasuk instansi pemerintah, perusahaan, serta dinas penyiaran FM.

Dalam sosialisasi ini, peserta diberikan informasi mengenai berbagai aspek terkait Perizinan Frekuensi Radio Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri, Pengajuan UMKU Izin Stasiun Radio, teknis penggunaan spektrum frekuensi radio, serta regulasi yang mengatur pengenaan denda administratif atas pelanggaran SFR/APT. Secara umum pada tahun 2025 ini, pelaksanaan Sosialisasi pada Balmon SFR Kelas I Pekanbaru sangat baik.



Grafik 3.8 Perbandingan Capaian di periode sebelumnya

ANALISA

Sepanjang tahun 2025, kegiatan sosialisasi pelayanan publik terkait penggunaan spektrum frekuensi radio telah dilaksanakan melalui berbagai metode, termasuk penyampaian materi secara langsung dalam forum tatap muka dan juga Sosialisasi secara on the spot serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih luas. Setiap sesi sosialisasi dirancang dengan target peserta yang berbeda-beda, mencakup berbagai sektor pengguna spektrum frekuensi radio, seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, penyiaran, hingga komunitas radio. Pendekatan ini diterapkan dengan tujuan agar informasi yang disampaikan lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta. Selain itu, metode ini juga disesuaikan dengan dinamika perkembangan regulasi dan teknologi dalam bidang spektrum frekuensi radio. Dengan adanya sosialisasi yang beragam ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami dengan lebih baik aturan-aturan yang berlaku serta konsekuensi yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian dalam penggunaan spektrum frekuensi radio.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan ketiga kegiatan ini adalah sebesar Rp. 75.245.000,- dan penyerapan anggarannya sebesar Rp. 72.499.000,- (96,35%). Dengan penggunaan anggaran tersebut Balmon SFR Kelas I Pekanbaru mampu memenuhi target yang ditetapkan.

TINDAK LANJUT

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru juga telah membangun layanan perizinan spektrum frekuensi radio online yang memberikan informasi mengenai alur dan prosedur layanan secara rinci dan jelas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk memastikan masyarakat selalu mendapatkan informasi terbaru, sosialisasi dan publikasi terkait layanan dilakukan secara rutin, berkala, dan segera setelah ada pembaruan. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung (offline), melalui media elektronik, maupun secara daring melalui platform media sosial resmi Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Dalam hal peningkatan profesionalisme dan kompetensi petugas layanan, Balmon Pekanbaru secara aktif mengikutsertakan petugas dalam berbagai kegiatan pelatihan, seperti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan (diklat), Training of Trainer (ToT), serta seminar, sosialisasi, atau lokakarya yang relevan dengan layanan spektrum frekuensi radio.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru juga senantiasa membangun kerja sama yang erat dengan mitra kerja serta pengguna layanan, sekaligus secara aktif menindaklanjuti setiap aduan yang disampaikan oleh masyarakat

DAMPAK

Melalui sosialisasi, masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka terkait prosedur administrasi, pengaduan, serta layanan teknis yang tersedia. Hal ini membantu pengguna frekuensi untuk mengakses layanan secara lebih mudah dan efektif, meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pengelola spektrum. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat memungkinkan Balai Monitor Pekanbaru untuk mengevaluasi kinerja layanan berdasarkan pengalaman pengguna. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan, peningkatan efisiensi, serta pengembangan inovasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat lebih proaktif dalam melaporkan gangguan frekuensi atau penggunaan ilegal yang dapat menghambat komunikasi. Hal ini memperkuat sistem pengawasan serta memudahkan penindakan terhadap pelanggaran spektrum.



REKOMENDASI

- Balmon SFR Kelas I Pekanbaru khususnya bagian pelayanan perizinan melakukan analisis mendalam terhadap kendala distribusi SPP BHP Frekuensi dan Surat Tagihan (ST) dan mengidentifikasi serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur distribusi SPP BHP Frekuensi dan ST sesuai kebutuhan klien.
- Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan klien untuk memahami kendala mulai dari tahap pengiriman SPP BHP Frekuensi, kendala terkait penggunaan aplikasi e-billing ISR serta kendala yang dihadapi terkait perubahan PIC klien yang menyebabkan sulitnya mengakses akun e-billing ISR milik klien/ pengguna frekuensi radio tidak terpenuhinya komitmen pembayaran yang wajib mereka tunaikan dan mengevaluasi strategi distribusi yang ada serta menyesuaikannya dengan perubahan lingkungan kerja atau kebijakan yang mungkin terjadi sehingga strategi distribusi SPP BHP Frekuensi tetap relevan dan efektif.
- Melakukan pengumpulan data yang lebih rinci dan analisis lebih lanjut terhadap seluruh proses distribusi SPP BHP Frekuensi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi tren dan pola yang memerlukan perhatian khusus

EFISIENSI

sosialisasi pelayanan publik dilakukan secara hybrid (offline dan online) guna meningkatkan jangkauan dan efisiensi. Mengingat luasnya wilayah Provinsi Riau serta tantangan aksesibilitas ke beberapa daerah, pelaksanaan sosialisasi hybrid ini menjadi solusi efektif. Sosialisasi melalui media elektronik, seperti radio dan televisi, juga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga informasi terkait regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio dapat tersampaikan dengan baik



IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna Frekuensi Radio sambil terus melakukan penyempurnaan layanan guna memastikan informasi yang diberikan diterima baik oleh pengguna frekuensi radio dan Memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pemohon izin. Selain itu, melakukan evaluasi terhadap kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio kepada masyarakat untuk memperoleh suatu masukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Akuntabel : Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memastikan Petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas secara konsisten meningkatkan integritas petugas layanan dengan memastikan tidak adanya praktik menerima imbalan dan memastikan Petugas pelayanan memiliki komitmen agar tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi.

Kompeten : Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dalam menjaga profesionalisme dan kompetensi petugas pelayan dengan cara mengikuti training of trainer (ToT)

Bimtek serta workshop atau sosialisasi yang relevan dengan bidang layanan spektrum frekuensi radio untuk membangun rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.

Harmonis : Narasumber mampu memberikan materi, menjelaskan, dan berinteraksi dengan peserta dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan peserta.

Loyal : Taat dan tertib dalam menjalankan kegiatan Sosialisasi sesuai dengan susunan acara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan Petugas layanan diharapkan memiliki dedikasi tinggi selalu menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

Adaptif : Panitia tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait kegiatan yang dapat terjadi sewaktu – waktu dan Berkontribusi dalam kegiatan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi kepada masyarakat dengan namun mudah dipahami.

Kolaboratif : Panitia berkoordinasi dan bekerjasama dengan narasumber dan pihak terkait untuk mensukseskan kegiatan Sosialisasi.

Indikator Kinerja 10

Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

LATAR BELAKANG

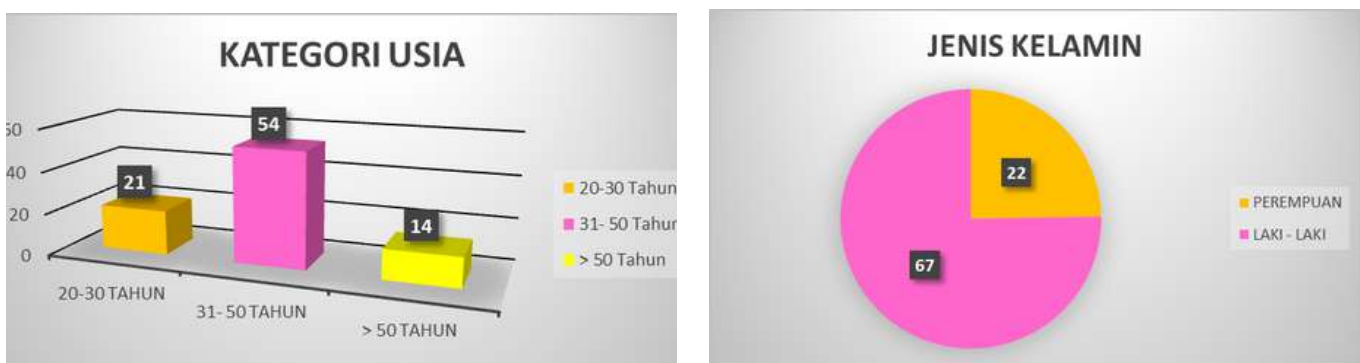
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah dituntut untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan secara objektif. Melalui survei ini, instansi memperoleh gambaran nyata mengenai persepsi masyarakat terhadap prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya, kompetensi petugas, sarana prasarana, hingga perilaku pelayanan.

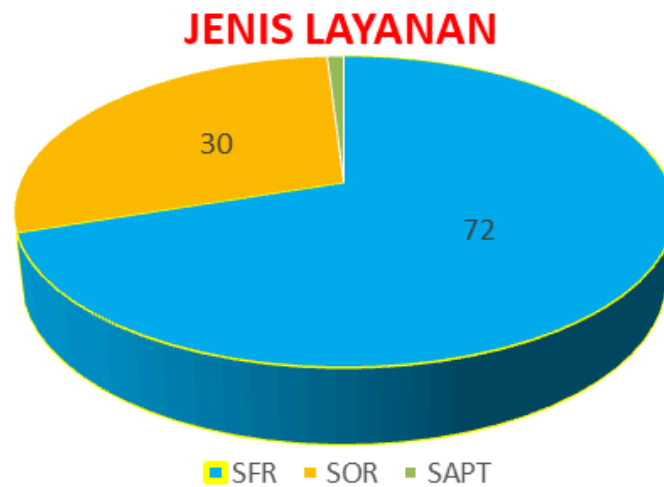
Pelaksanaan survei kepuasan juga sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil survei menjadi dasar penyusunan kebijakan peningkatan kualitas layanan serta sebagai bahan evaluasi kinerja unit pelayanan

CAPAIAN KINERJA

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada bulan Januari – Desember tahun 2025 menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Publik. Survei dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dengan jumlah responden yang mengikuti sebanyak 89 responden dengan rincian seperti dalam tabel dan bagan berikut ini:



Grafik 3.9 Rincian Responden SKM



Grafik 3.10 Responden berdasarkan layanan

Berikut hasil Survei pelayanan Publik Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Tahun 2025 Hasil Survei Pelayanan Publik melalui Link Survei yang telah disediakan oleh Direktorat Direktorat Layanan Infrastruktur Digital Tahun 2025.

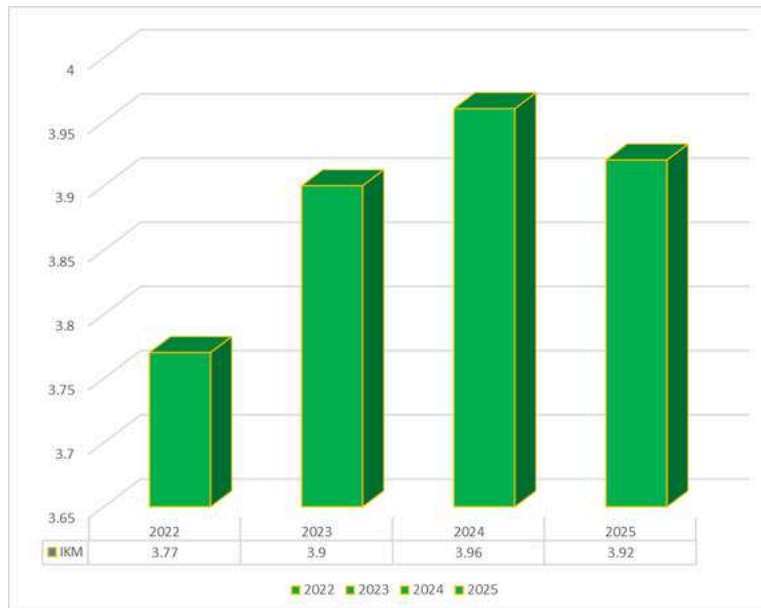
IKM : 3,92

IPKP : 3,92

Catatan : Hasil Survei di atas merupakan hasil konversi yang dihasilkan pada proses pengolahan data dari survei pelayanan public yang disediakan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital

Tabel 3.11 Indeks Kategori Survey IKM/IPKP

IKM/IPKP	Kode	Kategori	Indeks
	P1	Biaya/Tarif	385
	P2	Kompetensi Pelaksana	396
	P3	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masyarakat	392
	P4	Perilaku Pelaksana	396
	P5	Persyaratan	393
	P6	Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	392
	P7	Sarana dan Prasarana	390
	P8	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	391
	P9	Waktu Penyelesaian	392



Grafik 3.11 Perbandingan hasil Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Secara umum pada tahun 2025 ini, layanan publik yang diberikan oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru sudah dinilai Sangat Memuaskan dengan capaian Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) sebesar 3,92 dari skala 4 dan dapat disimpulkan capaian kinerja terkait Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) 100% dari target capaian 3,2 dari skala 4. Dan dengan data yang ditampilkan Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) tahun 2025 pada Balmon SFR Kelas I tergolong SANGAT BAIK.

ANALISA

Berdasarkan hasil SKM pada Tabel didapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/IPKP) Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Dari hasil survei tersebut, diketahui bahwa Indikator nilai tertinggi adalah Unsur Kompetensi pelaksana dan Perilaku Pelaksana dengan nilai indeks sebesar 3,96 sedangkan nilai indikator terendah adalah Sarana dan Prasarana sebesar 3,90.

Sedangkan secara umum, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM/IPKP) terhadap pelayanan yang dilakukan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru adalah sebesar 3,92 (skala 4). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru menunjukkan kategori Mutu Pelayanan A, dengan mutu kinerja yang terkategori SANGAT BAIK. Namun ditemukan adanya penurunan perolehan hasil survey kepuasan pelayanan public (IKM/IPKP) dari Tahun 2024 ke Tahun 2025. Penurunan ini dapat dilihat dari jumlah responden dan hasil survei pada unsur kategori Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana dan Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Kegiatan IKM/IPKP dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Survey IIPP/IPAK. Kegiatan dilaksanakan 2 kali dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 23.740.000,- dan seluruh anggaran terserap habis realisasi anggaran 100%. Dengan penggunaan anggaran tersebut Balmon SFR Kelas I Pekanbaru berhasil mencapai nilai hasil indeks IKM/IPKP sebesar 3,9.

DAMPAK

Melalui Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) berdampak penting sebagai alat evaluasi kinerja pelayanan, karena memberikan gambaran tingkat kepuasan masyarakat serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan. Hasil survei menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan, mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi, serta meningkatkan profesionalisme aparatur. Bagi masyarakat, survei ini menjadi sarana penyampaian aspirasi yang berujung pada layanan yang lebih baik, sementara bagi pemerintah hasilnya digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan penguatan reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil survei pelayanan publik diperoleh permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari responden yang menggambarkan kondisi layanan publik. Untuk rencana tindak lanjut yang dijabarkan dalam bentuk rekomendasi tiap jenis layanan publik tersaji pada tabel berikut :

- **Biaya dan Tarif**
 - Rekomendasi : Menginformasikan biaya secara rinci dan jelas sesuai dengan standar yang ditetapkan
 - Rencana Aksi : Menginformasikan variable yang mempengaruhi Perhitungan Tarif BHP Frekuensi Radio
- **Sarana dan Prasarana**
 - Rekomendasi : Melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana serta dampaknya terhadap pelayanan publik.
 - Rencana Aksi : Menyediakan brosur prosedur sop perizinan, menyediakan platfrom pelayanan online.
- **Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan**
 - Rekomendasi : Mempublikasikan terkait Produk Sertifikasi dan Jenis Pelayanan.
 - Rencana Aksi : Membuat Standar Pelayanan yang sesuai dengan produk Sertifikasi dan Jenis Layanan .
- **Waktu Penyelesaian**
 - Rekomendasi : Menentukan Standar Pelayanan dan Memastikan Petugas menyelesaikan pelayanan sesuai dengan standar dan Memmberikan Kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak menerima layanan sesuai standar
 - Rencana Aksi : Meningkatkan wawasan dan keahlian petugas pelayanan dengan mengikutsertakan bimtek dan sosialisasi terkait produk layanan dan Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat waktu layananan.

TINDAK LANJUT

Dalam hal peningkatan IKM/IPKP, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas pelayanan yang disediakan. Perbaikan yang telah dikembangkan diantaranya penyediaan whatsapp pelayanan (wayan), Instagram yang dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi, konsultasi, pengaduan ataupun asistensi terkait layanan spektrum frekuensi radio. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi dan publikasi informasi layanan utamanya yang terbaru secara rutin, berkala dan segera, baik secara offline, melalui media elektronik maupun secara online melalui media sosial milik Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Sedangkan untuk peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Petugas Layanan, Balmon Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru senantiasa mengikutkan petugas pelayanan melalui bimbingan teknis, diklat, Training of Trainer (ToT) atau mengikutkan dalam forum seminar seperti sosialisasi atau workshop sesuai bidang layanan spektrum frekuensi radio. Disamping itu, dalam peningkatan integritas petugas layanan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas layanan dengan menerapkan sistem reward dan punishment.

EFISIENSI

Survei kualitas pelayanan publik dilakukan secara mandiri oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei kualitas pelayanan publik adalah ASN di lingkungan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Dalam mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang disesuaikan dengan indeks yang akan diukur, pengisian kuesioner pengukuran kualitas pelayanan publik ini dilakukan secara mandiri dan online melalui tautan <https://komin.fo/pekanbaru2025> atau scan barcode yang dikirimkan kepada pengguna layanan melalui email atau media komunikasi lainnya, seperti Whatsapp.

Kelebihan pelaksanaan survei secara online, di antaranya rendah biaya, akses data otomatis dan real time, waktu pelaksanaan survei cepat, serta kenyamanan responden menjawab pertanyaan sesuai waktu luang. Sosialisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan para peserta di suatu tempat tentu berdampak pada efisiensi kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Hal ini mengingat wilayah Sulawesi Tengah yang sangat luas, dan sulit menjangkau seluruh wilayah. Demikian juga sosialisasi yang dilakukan melalui media elektronik, diharapkan dapat menjangkau para pendengar radio dan penonton televisi sehingga sosialisasi yang diberikan dapat tersampaikan.

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat mencerminkan mutu kualitas layanan yang telah diberikan, untuk itu Balmon SFR Kelas I Pekanbaru berkomitmen senantiasa memberikan pelayanan prima dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pelayanan yang diselenggarakan demi kepuasan masyarakat.

Akuntabel : Peningkatan integritas petugas pelayanan yang konsisten dilakukan seperti tidak menerima imbalan menunjukkan komitmen Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dalam memberikan pelayanan prima.

Kompeten : Dalam pemberian layanan yang berkualitas, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru senantiasa meningkatkan profesionalisme kompetensi petugas layanan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, Training of Trainer (ToT) serta workshop/ sosialisasi yang terkait dengan bidang layanan spektrum frekuensi radio.

Harmonis : Balmon SFR Kelas I Pekanbaru senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, hal ini terlihat pada kepekaan petugas layanan dalam membangun sikap saling bekerjasama, peduli, tolong menolong serta saling menghargai perbedaan.

Loyal : Petugas layanan yang memiliki dedikasi tinggi, senantiasa menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan sebagai ASN dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan tidak melanggar aturan.

Adaptif : Kemampuan petugas layanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi dan perkembangan teknologi, regulasi serta senantiasa berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam memberikan layanan yang prima.

Kolaboratif : Petugas layanan mampu membangun kerjasama yang bersinergi baik internal Balmon SFR Kelas I Pekanbaru maupun eksternal mitra Balmon SFR Kelas I Pekanbaru.



Indikator Kinerja 11

Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan upaya berkelanjutan untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah masih adanya potensi penyimpangan perilaku aparatur, seperti pungutan liar, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, serta rendahnya transparansi dalam proses pelayanan. Untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai prinsip integritas dan profesionalisme, diperlukan instrumen pengukuran yang objektif dan terukur. Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP) / Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi alat evaluasi yang penting untuk mengetahui persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap perilaku aparatur serta kualitas integritas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Hasil survei IIPP/IPAK memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kepercayaan masyarakat, potensi risiko korupsi, serta aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki. Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bahan evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perbaikan layanan serta penguatan budaya integritas di lingkungan organisasi.

Pelaksanaan survei ini juga sejalan dengan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, adil, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

CAPAIAN KINERJA

Adapun Capaian Kinerja Balmon SFR Kelas I Pekanbaru terhadap Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) sebesar 100 % yaitu 3,96 dengan skala 4 dari target capaian sebesar 3,6 dengan skala 4 dengan jumlah responden yang sama dengan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) yaitu 89 responden.

Berikut hasil Survei pelayanan Publik Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Tahun 2025 Hasil Survei Pelayanan Publik melalui Link Survei yang telah disediakan oleh Direktorat Direktorat Layanan Infrastruktur Digital Tahun 2025.

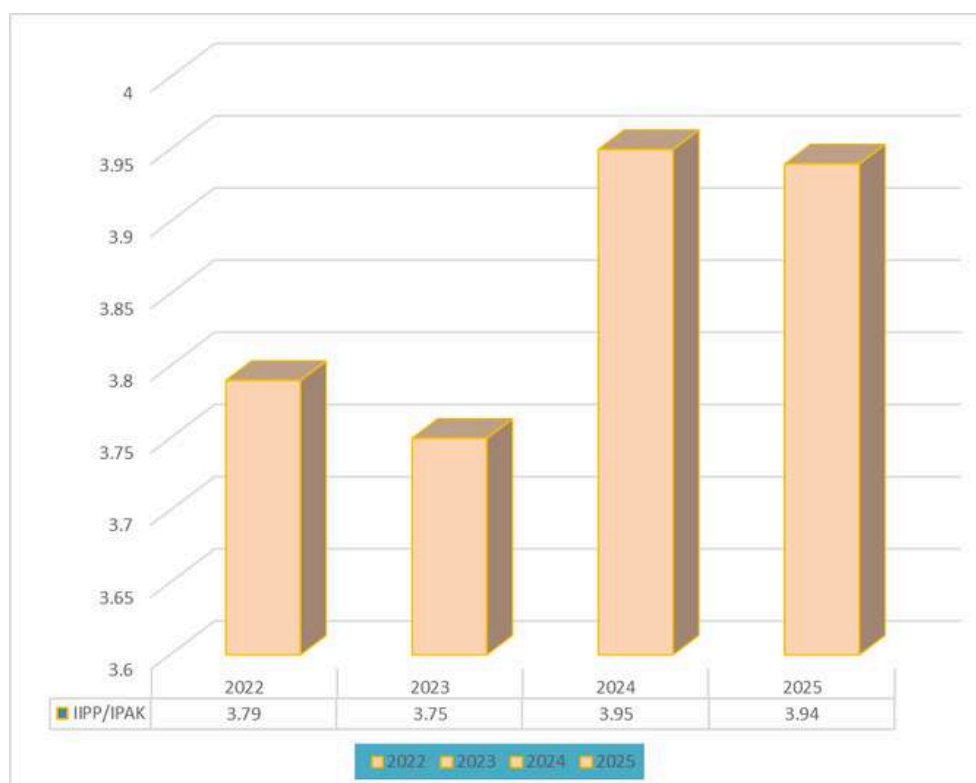
Hasil Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

IKM : 3,92**IPKP : 3,92**

Catatan : Hasil Survei di atas merupakan hasil konversi yang dihasilkan pada proses pengolahan data dari survei pelayanan public yang disediakan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital.

Tabel 3.12 Nilai Indeks Hasil Survey

IKM/IPKP	Kode	Kategori	Indeks
	P1	Diskriminasi Pelayanan	385
	P2	Pelayanan Di Luar Prosedur	396
	P3	Penerimaan Imbalan	392
	P4	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	396
	P5	Pungutan Liar (Pungli)	393

**Grafik 3.12 Perbandingan hasil Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)**

ANALISA

Berdasarkan hasil Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) pada Tabel didapatkan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Dari hasil survei tersebut, diketahui bahwa Indikator nilai tertinggi adalah Unsur Percaloan/Perantara Tidak Resmi dengan nilai indeks sebesar 3,96 sedangkan nilai indikator terendah dengan nilai capaian sebesar 3,94 ada tiga (3) yaitu unsur Diskriminasi Pelayanan, Pelayanan Di Luar Prosedur dan Pungutan Liar (Pungli). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru menunjukkan kategori Mutu Pelayanan A, dengan mutu kinerja yang terkategori SANGAT BAIK. Namun ditemukannya adanya penurunan perolehan hasil Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dari Tahun 2024 ke 2025 yaitu pada unsur Diskriminasi Pelayanan, Pelayanan Di Luar Prosedur dan Penerimaan Imbalan.

Kegiatan survey kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK). Kegiatan dilaksanakan 2 kali dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 23.740.000,- dan seluruh anggaran terserap habis realisasi anggaran 100%. Dengan penggunaan anggaran tersebut Balmon SFR Kelas I Pekanbaru berhasil mencapai nilai hasil indeks IIPP/IPAK sebesar 3,96.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) diperoleh permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari responden yang menggambarkan kondisi Integritas Pelayanan Publik. Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut diharapkan dalam bentuk rencana aksi hasil survei Integritas Pelayanan Publik dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Untuk rencana tindak lanjut yang dijabarkan dalam bentuk rekomendasi tiap jenis layanan publik sebagai berikut :

Diskriminasi Pelayanan

Rekomendasi : Penerapan Standar Pelayanan yang Jelas dan Terbuka dan Penguatan Komitmen Etika Aparatur, Pelatihan Pelayanan Prima dan Anti-Diskriminasi.

Rencana Aksi : Membuat Maklumat pelayanan dan mempublikasikannya dan Membuat system antrian digital dan layanan digital yang transparan.

Penerimaan Imbalan

Rekomendasi : Meningkatkan pengawasan pimpinan langsung terhadap pelaksanaan pelayanan dan Menyediakan dan mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat

Rencana Aksi : Monitoring rutin terhadap pelaksanaan pelayanan, termasuk melalui CCTV dan Menyediakan kanal pengaduan masyarakat.

Pelayanan Di Luar Prosedur

Rekomendasi : Penguatan Pemahaman SOP kepada Petugas, Pemasangan Alur dan Standar Pelayanan Secara Terbuka, dan Pernyataan Komitmen Pelayanan

Rencana Aksi : Melaksanakan sosialisasi dan refresh SOP secara berkala agar seluruh petugas memahami alur pelayanan yang benar, menampilkan SOP, persyaratan, waktu layanan, dan biaya layanan di ruang pelayanan dan media digital agar masyarakat mengetahui hak dan prosedur yang benar dan Petugas menandatangani pakta integritas dan komitmen memberikan pelayanan sesuai SOP.

TINDAK LANJUT

Dalam hal peningkatan survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK), Balmon SFR Kelas I Pekanbaru senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas pelayanan yang disediakan. Perbaikan yang telah dikembangkan diantaranya penyediaan whatsapp pelayanan (wayan), Instagram yang dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi, konsultasi, pengaduan ataupun asistensi terkait layanan spektrum frekuensi radio. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi dan publikasi informasi layanan utamanya yang terbaru secara rutin, berkala dan segera, baik secara offline, melalui media elektronik maupun secara online melalui media sosial milik Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Sedangkan untuk peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi Petugas Layanan, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru senantiasa mengikutkan petugas pelayanan melalui bimbingan teknis, diklat, Training of Trainer (ToT) dalam peningkatan integritas petugas layanan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas layanan dengan menerapkan sistem reward dan punishment.

EFISIENSI

Survei kualitas pelayanan publik dilakukan secara mandiri oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK). Balmon SFR Kelas I Pekanbaru menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang sama pada link tautan <https://komin.fo/pekanbaru2025> sehingga pengisian tidak dilaksanakan dua kali oleh responden dan pengisian survey juga tidak hanya dilakukan secara tatap muka langsung namun juga melalui kanal online.

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat mencerminkan mutu kualitas layanan yang telah diberikan, untuk itu Balmon SFR Kelas I Pekanbaru berkomitmen senantiasa memberikan pelayanan prima dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pelayanan yang diselenggarakan demi kepuasan masyarakat.

Akuntabel : Peningkatan integritas petugas pelayanan yang konsisten dilakukan seperti tidak menerima imbalan menunjukkan komitmen Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dalam memberikan pelayanan prima.

Kompeten : Dalam pemberian layanan yang berkualitas, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru senantiasa meningkatkan profesionalisme kompetensi petugas layanan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, Training of Trainer (ToT) serta workshop/ sosialisasi yang terkait dengan bidang layanan spektrum frekuensi radio.

Harmonis : Balmon SFR Kelas I Pekanbaru senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, hal ini terlihat pada kepekaan petugas layanan dalam membangun sikap saling bekerjasama, peduli, tolong menolong serta saling menghargai perbedaan.

Loyal : Petugas layanan yang memiliki dedikasi tinggi, senantiasa menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan sebagai ASN dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan tidak melanggar aturan.

Adaptif : Kemampuan petugas layanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi dan perkembangan teknologi, regulasi serta senantiasa berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam memberikan layanan yang prima.

Kolaboratif : Petugas layanan mampu membangun kerjasama yang bersinergi baik internal Balmon SFR Kelas I Pekanbaru maupun eksternal mitra Balmon SFR Kelas I Pekanbaru.

Indikator Kinerja 12

Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi telekomunikasi radio yang semakin pesat menuntut tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan bertanggung jawab dalam pengoperasian perangkat radio. Operator radio memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran komunikasi, keselamatan, serta ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis milik negara.

Untuk menjamin bahwa setiap operator radio memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu mekanisme pengakuan kompetensi yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sertifikasi operator radio menjadi instrumen penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aspek teknis, operasional, dan etika dalam penggunaan perangkat radio, baik untuk keperluan keselamatan, komersial, maupun nonkomersial.

Penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan komunikasi radio, meminimalkan potensi gangguan frekuensi, serta mendukung keselamatan jiwa dan harta benda, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti pelayaran, penerbangan, penanggulangan bencana, dan komunikasi darurat.

Layanan sertifikasi operator radio terdiri dari beberapa penyelenggara antara lain Izin Amatir Radio (IAR), Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN), Short Range Certificate/Long Range Certificate (SRC/LRC).

Izin Amatir Radio (IAR) merupakan Sertifikasi yang wajib dimiliki oleh para penggiat amatir radio agar dapat mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai dengan tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku. Dan untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR) para penggiat wajib mengikuti Ujian Amatir Radio sesuai dengan tingkatannya. Untuk menjamin bahwa setiap calon amatir radio memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan, prosedur operasional, serta teknik komunikasi radio, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sebagai syarat memperoleh Izin Amatir Radio (IAR). UNAR menjadi instrumen penting dalam menciptakan sumber daya amatir radio yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.

Amatir radio merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi radio yang memiliki peran strategis dalam mendukung komunikasi kebencanaan, komunikasi darurat, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi radio komunikasi.

Keberadaan operator amatir radio yang kompeten dan beretika sangat diperlukan agar penggunaan spektrum frekuensi radio dapat berjalan secara tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan. Selain itu, pelaksanaan UNAR juga merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung terwujudnya tertib frekuensi dan pencegahan interferensi yang merugikan layanan komunikasi lainnya.

Penyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio atau Maritime On The Spot (MOTS) adalah usaha untuk mengurangi gangguan frekuensi dinas penerbangan di pita HF yang diamati dilakukan oleh nelayan yang menggunakan perangkat All Band. Komunikasi maritim merupakan hal penting dalam keselamatan pelayaran. Komunikasi yang efektif dapat membantu menghindari kecelakaan, meningkatkan respons dalam situasi darurat, dan memfasilitasi para pelayar berkoordinasi antara kapal dan pusat pengendalian maritim. Dan guna memastikan standar keselamatan dan efisiensi komunikasi maritim, maka pentingnya regulasi/ aturan yang mengharuskan pelaut memiliki sertifikasi tertentu, yaitu Sertifikat mengoperasikan peralatan komunikasi seperti Short Range Certificate (SRC) dan Long Range Certificate (LRC). SRC merupakan sertifikasi untuk penggunaan peralatan komunikasi pendek jarak, seperti VHF (Very High Frequency) radio. Pemegang sertifikat diharapkan mampu memahami cara berkomunikasi di perairan terbatas, serta memahami protokol panggilan darurat, dan memiliki pengetahuan tentang prosedur keselamatan maritime dasar. Sertifikasi SRC dan LRC diakui secara internasional. Oleh karena itu, para pelaut dalam hal ini nelayan yang memiliki sertifikasi ini dapat beroperasi di perairan internasional dengan kepercayaan diri bahwa mereka memenuhi standar keselamatan dan komunikasi yang diakui secara global.

Tahun 2025 adalah merupakan tahun lima Balmon SFR Kelas I Pekanbaru melaksanakan program Maritime on the Spot (MOTS). Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital telah memberikan target Perjanjian Kinerja pelaksanaan program tersebut, sehingga harus dijalankan semaksimal mungkin agar target dapat tercapai. Pada tahun 2025 Balmon SFR Kelas I Pekanbaru telah berhasil melaksanakan 1 (satu) kali Sosialisasi MOTS dan Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN.

Kegiatan Maritime On The Spot (MOTS) dimaksudkan untuk mengarahkan para nelayan untuk menggunakan perangkat standard Maritim serta mengurus izin stasiun radio (ISR) nya. Tujuan kegiatan Maritime On The Spot (MOTS) ini agar tidak lagi terjadi gangguan frekuensi dinas penerbangan di pita HF, sekaligus mengarahkan nelayan menggunakan perangkat standard maritim yang berfungsi sebagai salah satu sarana keselamatan berlayar.

Regulasi terkait penggunaan stasiun radio di laut seringkali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Operator radio kapal nelayan mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami serta mematuhi regulasi tersebut, yang dapat berdampak pada keselamatan dan koordinasi pelayaran.

Kesadaran terhadap keamanan dan keselamatan maritim menjadi sangat penting. Operator radio kapal nelayan perlu memahami pentingnya penggunaan stasiun radio yang sah dan berizin untuk menghindari potensi masalah dan meningkatkan respon dalam situasi darurat. Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa stasiun radio kapal tersebut memenuhi standar teknis dan penggunaan frekuensi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

IKRAN merupakan sertifikasi bagi nelayan dalam berkomunikasi saat berlayar. Pemahaman tentang proses perizinan dan keberlanjutan pengurusan ISR maritim ini sangat penting untuk memastikan legalitas dan kehandalan stasiun radio di atas kapal laut serta memastikan nelayan dapat berkomunikasi dengan benar dan baik saat berlayar.

SASARAN KINERJA

Sasaran kegiatan Maritime On The Spot (MOTS) adalah nelayan yang belum memiliki izin stasiun radio (ISR) atas perangkat radio komunikasi standard maritim yang mereka miliki atau nelayan yang masih menggunakan perangkat radio All Band. Penyelenggaraan kegiatan Maritime On The Spot (MOTS) juga menyasar kapal non perikanan yang akan mengurus izin stasiun radio (ISR) maritim.

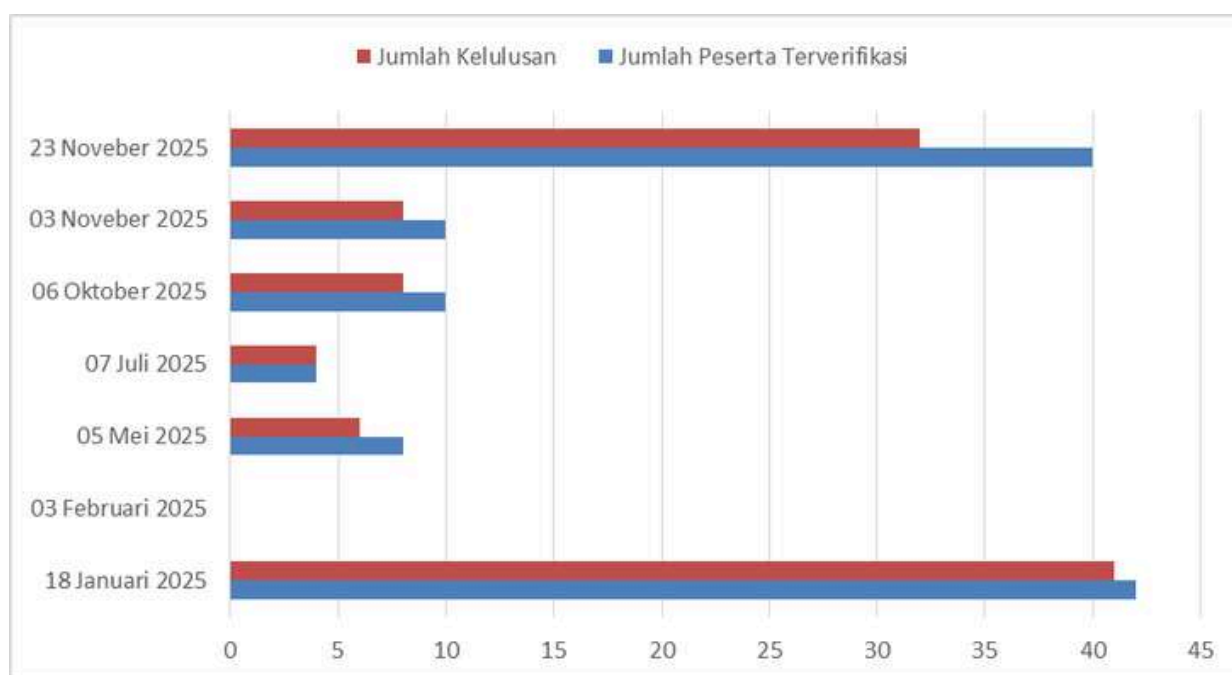
Sedangkan pada pelaksanaan UNAR Balmon SFR Kelas I Pekanbaru pada tahun 2025 telah menargetkan 2 (dua) jenis pelaksanaan UNAR yaitu UNAR CAT Reguler dan UNAR Non Reguler yang pada hakikatnya sama. Hal yang membedakan antara keduanya adalah UNAR CAT Reguler dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali selama tahun 2025 dan dilakukan pembatasan jumlah peserta mengingat keterbatasan jumlah perangkat PC/Laptop di Kantor. Sebaliknya pada pelaksanaan UNAR Non Reguler jumlah kegiatannya dibatasi mengingat dilaksanakan di daerah Kota atau kabupaten tertentu atas permintaan dari Organisasi Amatir Radio Lokal setempat.

CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2025 di targetkan pelaksanaan UNAR Non Reguler sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi pada bulan september kegiatan tersebut dihapuskan karena tidak adanya permintaan dari Organisasi Amatir Radio dan berkurangnya animo penggiat amatir radio. Selain UNAR Non Reguler, Balai Monitor spektrum Frekuensi radio Kelas I Pekanbaru juga melaksanakan kegiatan ujian amatir radio berbasis komputer (CAT UNAR) Reguler sebanyak 6 (enam) kali di tahun 2025, sehingga jumlah total pelaksanaan UNAR pada Tahun 2025 sebanyak 6 (enam) kali pelaksanaan.

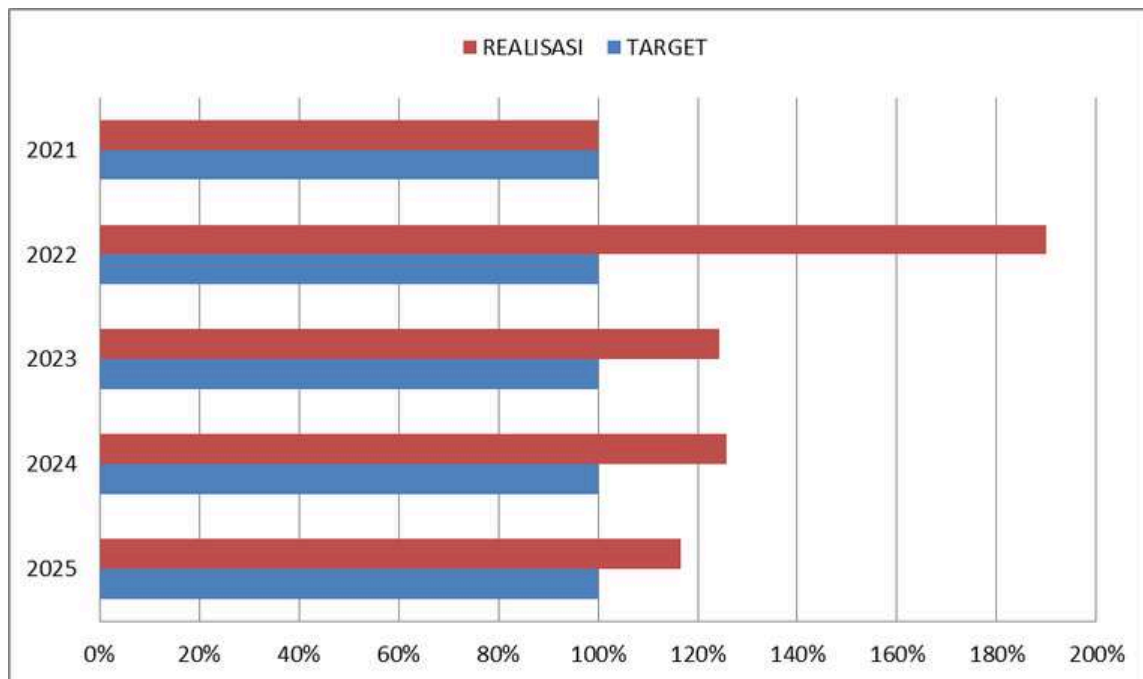
Tabel 3.13 Jumlah Peserta UNAR Tahun 2025

No	Jumlah Peserta Terverifikasi			Jumlah Kelulusan			Keterangan
	Siaga	Penggalang	Penegak	Siaga	Penggalang	Penegak	
1	41	1	0	40	1	0	1 Peserta Tidak Hadir
2	0	0	0	0	0	0	Tidak ada Peserta yang mendaftar
3	7	1	0	5	1	0	2 Peserta Tidak Hadir
4	4	0	0	4	0	0	
5	10	0	0	10	0	0	
6	8	1	1	7	1	0	2 Peserta Tidak Hadir
7	33	3	4	25	3	4	8 Peserta Tidak Hadir
Total	103	6	5	91	6	4	



Grafik 3.13 Jumlah Peserta UNAR Tahun 2025

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio dari Tahun ke Tahun.



Grafik 3.14 Persentase Jumlah Peserta UNAR Tahun 2025

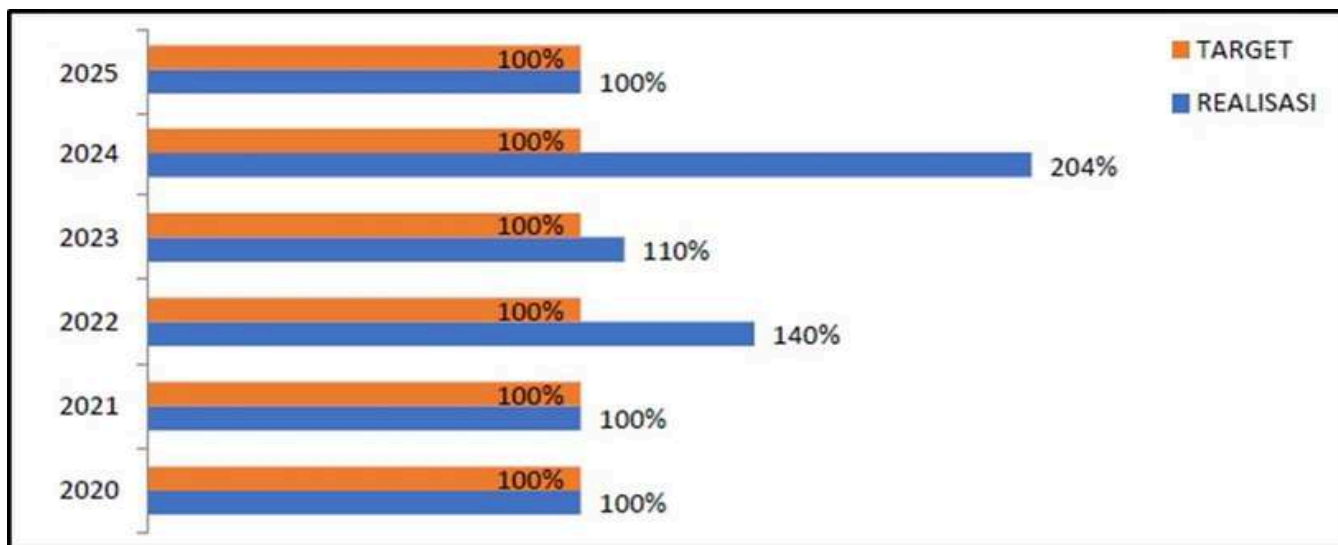
Sedangkan Capaian Kinerja pada Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio terdiri dari Sosialisasi dan Bimbingan Sertifikasi Operator Radio Short Range Certificate (SRC) / Long Range Certificate (LRC) serta Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN) oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2025 sebesar 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Tabel 3.14 Pencapaian Kegiatan Maritime On The Spot (MOTS) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Capaian Realisasi	Sasaran Output	Hasil
1	Sosialisasi MOTS	1 Kegiatan	100%	Izin Stasiun Maritim	23 ISR Maritim
2	Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN	1 Kegiatan	100%	Penerbitan Sertifikat SRC/LRC dan IKRAN	37 SRC dan 37 IKRAN

Tahun 2025 Balmon SFR Kelas I Pekanbaru telah melakukan pembukaan Locket Maritime On The Spot (MOTS) di Wilayah Pesisir Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Maritime On The Spot (MOTS) Pada Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Tahun 2025 yang meliputi ISR Maritim dan/ atau IKRAN Serta Penerbitan Sertifikasi SRC/LRC untuk nelayan, maka diperoleh hasil capaian 23 ISR Maritim dan 37 IKRAN serta 37 Sertifikat SRC.



Grafik 3. 15 Capaian Kinerja Persentase (%) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN Tahun 2020 – 2025

ANALISA

Faktor Keberhasilan pada Pencapaian Target Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio adalah Adanya keterlibatan dan kerjasama dengan Organisasi Amatir Radio Lokal yang baik dalam menjaring calon peserta UNAR serta kemampuan dalam memberikan dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas PC/Laptop serta jaringan internet dengan bekerjasama dengan institusi pendidikan ataupun instansi pemerintahan. Inovasi dalam Pelaksanaan UNAR Reguler: Penjaringan peserta UNAR Reguler melalui Universitas menambah capaian target peserta UNAR.

Capaian yang diperoleh oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru secara angka persentase sebesar 100% terhadap target peserta menunjukkan keberhasilan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dalam menarik minat dan partisipasi peserta.



Hal ini dapat dilihat pada table di atas bahwa dalam tahun 2025 telah dilaksanakan 1 Kali Kegiatan Sosialisasi Maritime on The Spot (MOTS) dan Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN di Wilayah Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir. Dari kegiatan tersebut dihasilkan pengurusan izin stasiun radio maritime sebanyak 23 ISR Maritim dan telah diterbitkan sebanyak 37 Short Range Certifikat (SRC) dan 37 Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN).

Capaian ini membuktikan bahwa adanya komunikasi dan kolaborasi yang intensif dengan Instansi-Instansi terkait di Bagan Siapi-api serta pemilihan lokasi yang strategis berkontribusi pada kesuksesan mencapai jumlah peserta yang jauh melebihi target.

Kesuksesan mencapai target peserta juga mencerminkan efektivitas dalam penyelenggaraan Sosialisasi Maritime on The Spot (MOTS) dan Bimbingan Teknis SRC/LRC. Keterlibatan peserta dalam jumlah besar menunjukkan bahwa materi yang disampaikan menarik dan relevan bagi mereka, serta metode penyampaian yang efektif.

Program ini memberikan manfaat konkret bagi nelayan dengan memberikan sosialisasi Maritim on the Spot (MOTS) dan Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN karena dengan Bimbingan Teknis ini akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator radio kapal dan para nelayan. Sehingga diharapkan keselamatan pelayaran dan komunikasi di wilayah perairan dapat ditingkatkan.

Faktor Kendala pada Pencapaian Target

- Keterbatasan Perangkat PC/Laptop: Jumlah terbatas perangkat menjadi kendala utama, terutama dalam pelaksanaan UNAR CAT Reguler yang dilakukan secara terus menerus setiap bulan.
- Kurangnya Animo Masyarakat: Jumlah penggiat Amatir Radio yang berkurang menjadi kendala utama dalam pencapaian target

Upaya dalam Mencapai Target / Upaya Percepatan / Upaya ke Depan Pengadaan

- Perangkat Tambahan sebagai Upaya meningkatkan jumlah perangkat PC/Laptop melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengatasi keterbatasan tersebut.
- Penguatan Kerjasama dengan Organisasi untuk Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Amatir Radio setempat serta Organisasi lainnya untuk memastikan pelaksanaan UNAR Reguler dapat berjalan lancar.
- Pengelolaan perangkat secara bergantian antar peserta, dapat diidentifikasi untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan, dan hal ini telah dilaksanakan oleh Balmon Pekanbaru dengan baik. Dengan memperhatikan berbagai faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi, serta merancang upaya-upaya yang sesuai, pelaksanaan UNAR CAT di Balmon Pekanbaru maupun dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Pemantauan secara berkala terhadap indikator kinerja dapat membantu dalam mengevaluasi kemajuan dan membuat penyesuaian strategi jika diperlukan.
- Optimalisasi kerjasama dengan ORARI Daerah maupun ORARI lokal dalam menjaring calon peserta UNAR serta partisipasi Balmon Pekanbaru dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Amatir Radio.
- Pengembangan Program Pelatihan Menyelenggarakan program pelatihan bagi peserta UNAR CAT, khususnya yang terkait dengan penggunaan perangkat dan aplikasi yang digunakan selama ujian. Hal ini telah difasilitasi oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI melalui aplikasi Tryout yang berbasis web yaitu SEENOW yang dapat diakses oleh seluruh User khususnya yang terkait Sertifikasi Operator Radio.
- Memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan UNAR dan evaluasi untuk melacak kemajuan pencapaian target secara berkala. Dengan pemantauan yang lebih cermat, dapat lebih cepat teridentifikasi potensi kendala atau keberhasilan yang dapat dimaksimalkan.

Dalam mendukung tercapainya target Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS IKRAN), anggaran yang tersedia sebesar Rp. 171.780,000,-. Sampai akhir pelaksanaan kegiatan anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp.161.509.566,- (94,02%). Dan dengan penggunaan anggar tersebut Balmon SFR Kelas I Pekanbaru mampu memenuhi target yang ditetapkan.

DAMPAK

Capaian ISR Maritim mengalami penurunan capaian dikarenakan wilayah pesisir di Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir adalah wilayah kepulauan, sehingga dapat diprediksikan bahwa kapal yang berada di Wilayah tersebut adalah kapal kecil yang digunakan dalam keseharian masyarakat setempat. Hal ini, merupakan sebuah evaluasi yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan lanjutan terkait program kegiatan Maritime on The Spot (MOTS).



Sedangkan capain hasil dari Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN) dan Short Range Sertificate (SRC) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Hal ini ditandai oleh antusias para nelayan di Wilayah Bagan Siapi-api untuk mengetahui dan mengimplementasikan program Kementerian Komunikasi dan Digital melalui kegiatan yang di mandatorikan kepada Balmon SFR Kelas I Pekanbaru khususnya pada bidang komunikasi maritim guna memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses perizinan, regulasi teknis, dan kepatuhan serta pengembangan individu.

Capaian yang diperoleh oleh BBalmon SFR Kelas I Pekanbaru secara angka persentase sebesar 100%. Terlaksananya kegiatan dan peroleh hasil pengurusan ISR Maritim dan Bimtek IKRAN dan SRC/LRC menunjukkan keberhasilan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dalam melakukan konsultasi dan Asistensi terhadap pemilik kapal serta Nelayan dalam memberikan pengertian dan tujuan untuk pengurusan izin maritime serta IKRAN.

Kesuksesan mencapai target juga mencerminkan efektivitas dalam pelayanan dalam kegiatan MOTS. Keterlibatan instansi terkait juga sangat besar dalam mengakomodir para nelayan dengan adanya KUSUKA sehingga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru dapat menerima data nelayan dengan baik yang digunakan sebagai target asistensi dan Bimtek agar terbitnya IKRAN. Program ini memberikan manfaat konkret bagi nelayan dan pemilik kapal dengan memberikan pelayanan MOTS dan Bimtek ini akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para nelayan serta meningkatnya tertib penggunaan frekuensi radio, sehingga diharapkan keselamatan pelayaran dan komunikasi di perairan dapat ditingkatkan.

TINDAKLANJUT

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan terkait aturan dan persyaratan pengurusan izin stasiun radio services maritime dan mengembangkan komunikasi ataupun pendekatan secara baik terhadap nelayan agar dapat meyakinkan bahwa pentingnya informasi serta wawasan dasar terhadap komunikasi yang baik dan benar guna keselamatan dalam berlayar. Hal ini merupakan suatu tindaklanjut berupa pembukaan jenis izin baru berupa Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) yang memungkinkan nelayan dengan perangkat All Band mendapatkan Izin Stasiun Radio dengan alokasi frekuensi khusus. Dengan alokasi frekuensi khusus ini, maka tidak akan mengganggu frekuensi lain utamanya frekuensi dinas penerbangan.

Dengan ISR yang tertib, nelayan dapat berkomunikasi dengan stasiun pantai, kapal lain, serta otoritas maritim, baik untuk keperluan operasional maupun dalam keadaan darurat. Sistem ini membantu mencegah insiden navigasi serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan di sector perikanan. Pelaksanaan Maritime on the Spot (MOTS) dan Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN) memungkinkan pemantauan dan pengendalian spektrum frekuensi maritim yang lebih terstruktur.



Dengan adanya izin yang diberikan secara langsung di lapangan, risiko penggunaan frekuensi ilegal atau interferensi dapat diminimalkan, sehingga komunikasi radio tetap berjalan stabil. Melalui kemudahan perizinan dan ketersediaan sistem komunikasi yang dapat diandalkan, nelayan dapat mengoptimalkan operasional perikanan, mulai dari pemantauan cuaca, transaksi ekonomi, hingga koordinasi logistik saat melaut.

Program ini memperkuat kolaborasi antara Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dengan otoritas kelautan, serta komunitas nelayan dalam menciptakan ekosistem komunikasi maritim yang lebih tertib, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam hal pelaksanaan UNAR Reguler maupun Non Reguler baik dari panitia UNAR maupun dari Organisasi Amatir Radio selalu membuka kritikan serta saran sebagai evaluasi perbaikan pada kegiatan berikutnya. Salah satunya adalah penambahan jumlah PC/laptop yang akan digunakan dalam pelaksanaan UNAR Reguler (dalam bentuk sewa). Balmon SFR Kelas I Pekanbaru juga senantiasa berkoordinasi dengan ORARI Daerah maupun ORARI lokal dalam menjaring calon peserta UNAR serta partisipasi Balmon Pekanbaru dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Amatir Radio. Selain itu, Balmon Pekanbaru berusaha menerapkan budaya BerAKHLAK yang menjadi landasan ASN dalam melaksanakan tugasnya khususnya bagi petugas pelayanan dalam bidang Amatir Radio.

REKOMENDASI

Rekomendasi melalui hasil kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC ini maka didapatkan beberapa rekomendasi yang cukup relevan untuk kegiatan di tahun berikutnya diantaranya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap materi pelatihan yang disampaikan serta memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta khususnya para nelayan dan operator kapal. Pentingnya evaluasi terhadap metode pemahaman terhadap materi yang sesuai untuk di aplikasikan pada bimbingan teknis ini. Hal ini karena obyek pemberian materi adalah para nelayan yang memiliki kemampuan yang berbeda terhadap penerimaan materi.

Metode yang lebih efektif untuk berinteraksi dengan peserta dan memastikan pemahaman yang maksimal dapat tercapai maka sangat dibutuhkan penambahan waktu untuk memberikan materi praktik tata cara komunikasi marabahaya. Hal ini merupakan inti dari pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN ini adalah tercapainya pemahaman peserta yakni para nelayan dan operator radio kapal agar kompeten dan mampu menerapkan komunikasi marabahaya.

Sedangkan dalam pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang dapat dijadikan rekomendasi sebagai evaluasi dan perbaikan capaian kinerja selanjutnya, berdasarkan pemahaman kekurangan dari pelaksanaan capaian target eksisting/tahun berjalan: Peningkatan Jumlah Perangkat PC/Laptop Mengidentifikasi sumber daya dan pendanaan tambahan untuk meningkatkan jumlah perangkat PC/Laptop yang tersedia ini salah satu solusi untuk dukungan pelaksanaan UNAR Reguler yang dilaksanakan di Kantor Balmon SFR Kelas I Pekanbaru .





Sarana dan fasilitas pendukung bukan sekadar pelengkap, melainkan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan UNAR. Dengan dukungan fasilitas yang baik, UNAR dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, adil, dan terpercaya, sehingga menghasilkan amatir radio yang kompeten, disiplin, dan taat regulasi.

EFISIENSI

Dalam upaya mencapai target indikator ISR Maritim dan Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN), Balmon SFR Kelas I Pekanbaru telah berhasil menerapkan berbagai strategi efisiensi sumber daya, khususnya pada sumber daya manusia. Untuk memastikan kualitas penyampaian asistensi serta konsultasi dan terlaksana dengan baik. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru berkolaborasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan para pemilik kapal serta nelayan dalam memberikan informasi dasar terkait tugas Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Hal ini membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan para instansi terkait. Sedangkan Efisiensi yang dapat dilakukan terdapat 2 (dua) aspek, yaitu efisiensi sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan.

Efisiensi Sumber Daya Manusia Penyederhanaan Proses Pelaksanaan UNAR yang berbasis online dan via Website e-licensing UNAR CAT sehingga dapat mengurangi beban kerja bagi panitia pelaksana. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan UNAR secara online dibandingkan dengan pelaksanaan UNAR secara manual, menunjukkan penurunan waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan penyelesaian setiap tahap kegiatan

Sedangkan Efisiensi Waktu Pelaksanaan Optimalisasi jadwal pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Reguler meminimalkan waktu tunggu peserta UNAR dalam melihat hasil kelulusan hal ini terjadi karena pelaksanaan ujian secara online melalui website berlangsung dalam satu hari dan hasil ujian dapat langsung dilihat setelah proses submit jawaban ujian. Begitupula Izin Amatir Radio (IAR) dapat langsung diunduh langsung melalui website e-licensing Amatir Radio. Dalam evaluasi, tercatat peningkatan signifikan dalam kecepatan pelaksanaan keseluruhan.

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : Hal ini berupa menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait proses perizinan ISR Maritim. Fokus pada pelayanan kepada nelayan dan pemilik kapal akan kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Balmon SFR Kelas I Pekanbaru berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan pemohon izin, melalui pengaturan lokasi loket pelayanan atau penentuan waktu pelayanan menyesuaikan dengan saat nelayan tidak melaut. Melayani dengan ramah dan cekatan, memberikan solusi atas kendala yang ditemui serta Mengevaluasi kegiatan sebagai bagian untuk perbaikan kegiatan berikutnya.

Akuntabel : Memastikan transparansi dalam proses perizinan dengan menjelaskan langkah langkah yang harus diambil oleh nelayan dan pemilik kapal dengan jelas akan rincian mengenai persyaratan dan tata cara perizinan. Petugas pelayanan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.

Kompeten : Menyelenggarakan pelatihan yang komprehensif bagi operator radio kapal untuk memastikan mereka memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup terkait peralatan komunikasi maritim dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga perlu adanya kompetensi pengetahuan terhadap petugas pelayanan dalam memberikan pengetahuan, arahan dan bimbingan dalam melayani secara prima.

Harmonis : Menjalin harmonisasi dengan instansi terkait dalam berkolaborasi yang selaras serta menyelenggarakan koordinasi yang baik untuk memastikan bahwa program ISR Maritim berjalan sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah lainnya.

Loyal : Melayani dengan sepenuh hati, efektif dan tepat waktu. Serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada para penerima layanan. Responsif terhadap keluhan dan menyelesaikan secara tuntas merupakan suatu kepuasan penerima layanan.

Adaptif : Penyesuaian dengan Perkembangan yang bersifat adaptif terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan peserta. Mampu menyesuaikan program sesuai dengan perkembangan terkini, sehingga tetap relevan dan efektif. Serta pro aktif dan berinovasi guna meningkatkan kualitas, efisiensi dan manfaat pelayanan.

Kolaboratif : Kerjasama dengan masyarakat/ nelayan lokal dan pemilik kapal. Kerja sama antara seluruh nelayan dan pemilik kapal dengan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dalam pemberian konsultasi dan asistensi pengurusan ISR maritime merupakan perwujudan sikap kolaboratif yang bersifat membangun.

Indikator Kinerja 13

Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

LATAR BELAKANG

Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link merupakan bagian integral dari Program Prima Aksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi) yang dicanangkan oleh Direktorat Layanan Infrastruktur Digital. Program ini bertujuan memastikan bahwa hasil verifikasi data koordinat site ISR yang telah dilakukan oleh UPT tidak berhenti pada tahap identifikasi ketidaksesuaian, tetapi ditindaklanjuti secara nyata oleh pemegang ISR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Layanan Infrastruktur Digital Nomor 1346/DJID.4/SP.02.10/07/2025 tanggal 24 Juli 2025, tindak lanjut verifikasi data koordinat site ISR dilakukan untuk meningkatkan akurasi data perizinan ISR, menurunkan potensi interferensi, serta mendukung implementasi Master Data Referensi Site (MDRS) sebagai acuan koordinat nasional dalam proses perizinan dan pengawasan.

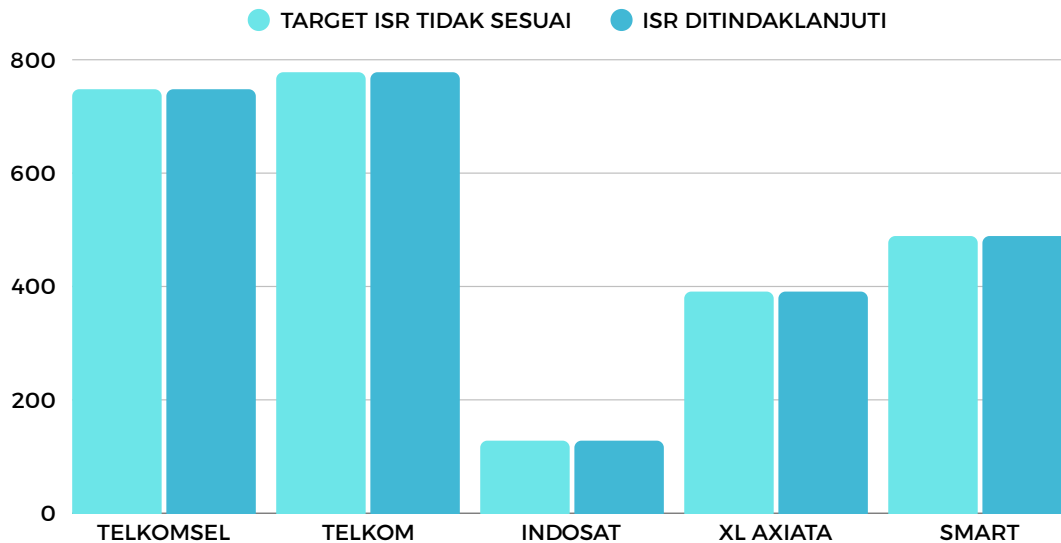
Data koordinat site ISR yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan berpotensi menimbulkan permasalahan teknis, seperti interferensi frekuensi, ketidaktepatan analisis teknis perizinan, serta hambatan dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

CAPAIAN KINERJA

Balmon SFR Kelas I Pekanbaru pada Tahun 2025 menetapkan target tindak lanjut terhadap 2.534 site ISR Microwave Link yang teridentifikasi tidak sesuai berdasarkan hasil verifikasi tahun sebelumnya.

Tabel 3.15 Target tindak lanjut verifikasi per-triwulan

Periode	Target	Site ISR tidak sesuai	Site ditindaklanjuti	% Realisasi	% Capaian	Keterangan
TW-1	100%	0	0	0	0%	
TW-2	100%	0	0	0	0%	
TW-3	100%	1200	1200	100%	100%	
TW-4	100%	1334	1334	100%	100%	
TOTAL	100%	2534	2534	100%	100%	



Grafik 3.16 Realisasi tindak lanjut verifikasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi per triwulan, seluruh site ISR yang tidak sesuai tersebut telah ditindaklanjuti 100%, baik melalui:

- Modifikasi data koordinat ISR, dan/atau
- Penghentian ISR sesuai ketentuan.
- Dengan demikian, capaian kinerja indikator Persentase Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link (Prima Aksi) pada Balmon SFR Kelas I Pekanbaru mencapai 100%, yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program Prima Aksi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

ANALISA

Keberhasilan pencapaian target tindak lanjut verifikasi data koordinat Site ISR Microwave Link didukung oleh beberapa faktor utama. Kejelasan petunjuk teknis Program Prima Aksi yang dituangkan melalui Nota Dinas dan arahan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital memberikan panduan yang jelas bagi UPT dalam melaksanakan tahapan evaluasi data, penetapan target kinerja, monitoring, serta pelaporan tindak lanjut hasil verifikasi. Selain itu, dukungan ketersediaan data ISR terkini melalui Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya (SIMS) serta implementasi Master Data Referensi Site (MDRS) sebagai referensi koordinat nasional sangat membantu dalam proses validasi dan penyesuaian data oleh pemegang ISR. Keberhasilan kegiatan ini juga ditunjang oleh koordinasi aktif dan sinergi yang baik antara Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagai pemegang ISR, sehingga proses tindak lanjut, khususnya pengajuan modifikasi data koordinat ISR, dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Di samping itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui pelaporan progres tindak lanjut setiap triwulan memungkinkan pengendalian kinerja yang terukur serta memastikan seluruh temuan hasil verifikasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu.

DAMPAK

Pelaksanaan tindak lanjut verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link memberikan dampak strategis, antara lain:

- Meningkatkan akurasi dan validitas data perizinan ISR, sehingga analisis teknis perizinan menjadi lebih tepat.
- Menurunkan potensi interferensi frekuensi, karena lokasi stasiun radio telah disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
- Mendukung optimalisasi pengawasan spektrum frekuensi radio, dengan data koordinat yang telah terstandarisasi melalui MDRS.
- Meningkatkan kepastian hukum dan transparansi layanan perizinan, bagi penyelenggara telekomunikasi maupun regulator.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan pelaksanaan tindak lanjut verifikasi data koordinat Site ISR Microwave Link, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru merekomendasikan penguatan integrasi antara kegiatan verifikasi koordinat dan tindak lanjut hasil verifikasi agar perbaikan data dapat dilakukan secara lebih cepat dan sistematis. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas data awal ISR melalui validasi dan pemutakhiran data secara berkala pada sistem SIMS guna meminimalkan temuan ketidaksesuaian di tahap verifikasi berikutnya. Penguatan koordinasi dengan pemegang ISR juga perlu terus ditingkatkan agar proses modifikasi data koordinat atau penghentian ISR dapat dilakukan secara proaktif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja tersebut, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut verifikasi data koordinat Site ISR Microwave Link secara berkelanjutan. Hasil tindak lanjut ini akan dimanfaatkan sebagai dasar pemutakhiran basis data ISR pada SIMS serta sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan kegiatan verifikasi dan pengendalian ISR pada tahun berikutnya. Selain itu, laporan progres tindak lanjut akan tetap disampaikan secara triwulanan kepada Direktorat Layanan Infrastruktur Digital sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Prima Aksi secara nasional.

EFISIENSI

Efisiensi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut verifikasi data koordinat Site ISR Microwave Link dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan data hasil verifikasi yang telah tersedia tanpa perlu pengumpulan ulang data lapangan. Penggunaan sistem informasi, seperti SIMS dan penerapan MDRS, memungkinkan proses validasi dan penyesuaian data dilakukan secara lebih cepat dan terstandarisasi. Selain itu, koordinasi jarak jauh dengan pemegang ISR serta melakukan pelaksanaan monitoring secara berkala

juga mengurangi kebutuhan sumber daya dan waktu, sehingga target tindak lanjut dapat diselesaikan secara optimal dengan penggunaan anggaran dan personel yang lebih efisien.

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memberikan kepastian layanan perizinan ISR melalui tindak lanjut hasil verifikasi data koordinat secara cepat, tepat, dan berbasis data yang valid. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan kejelasan status perizinan bagi pemegang ISR.

Akuntabel : Seluruh tindak lanjut hasil verifikasi dilaksanakan berdasarkan data yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses monitoring dan pelaporan dilakukan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

Kompeten : SDM Balmon Pekanbaru memiliki kompetensi teknis dan pemahaman regulasi yang memadai dalam pengelolaan data koordinat ISR. Peningkatan kapasitas dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan Program Prima Aksi dan implementasi MDRS.

Harmonis : Pelaksanaan tindak lanjut verifikasi didukung oleh hubungan kerja dan komunikasi yang baik dengan pemegang ISR serta unit kerja terkait. Sinergi ini memperlancar proses klarifikasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil verifikasi.

Loyal : Petugas Balmon SFR Kelas I Pekanbaru mengutamakan kepentingan organisasi dan negara dalam menjaga ketertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Pelaksanaan tugas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kolaboratif : Keberhasilan capaian tindak lanjut verifikasi data koordinat merupakan hasil kolaborasi Balmon Pekanbaru dengan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital dan pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini mempercepat penyelesaian tindak lanjut dan meningkatkan efektivitas kinerja.

Adaptif : Balmon SFR Kelas I Pekanbaru menyesuaikan mekanisme kerja dengan kebijakan yang berkembang, khususnya dalam pelaksanaan Program Prima Aksi dan penerapan MDRS. Fleksibilitas metode kerja mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.



SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efesien

Indikator Kinerja 2.1

Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru Tahun 2025

LATAR BELAKANG

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan agar berjalan secara efektif dan efisien harus didukung dengan kegiatan – kegiatan administratif pendukung yang harus dilakukan dengan baik yaitu sesuai antara perencanaan dengan realisasi. Adapun kegiatan administrasi penunjang tersebut antara lain :

- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Nilai Perencanaan Anggaran
- Pengelolaan Barang Milik Negara
- Pengelolaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Kepegawaian
- Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan

CAPAIA KINERJA

Dalam melakukan pengelolaan anggaran, pengukuran tingkat keberhasilan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dievaluasi melalui hasil nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran memiliki 2 komponen penilaian yaitu nilai pelaksanaan anggaran atau yang biasa disebut nilai IKPA dan nilai rencana anggaran yang dapat di liat pada aplikasi Smart Kemenkeu. Ketentuan penilaian atau perhitungan antara 2 komponen ini memiliki bobot yang sama yaitu masing – masing 50 %. Tetapi khusus tahun 2025 karena ada 2 Dipa yang digunakan karena perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja maka perhitungan Capaian Kinerja Anggaran menggunakan formula berikut :



Gambar 3.9 Dashboard NK Perencana dan Pelaksanaan

Tabel 3.16 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

DIPA BARU		DIPA LAMA	NKA 2025
Nilai Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	
33,16	44,99	49,17	84,58

Tabel 3.17 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 – 2025

Uraian	Target	Realisasi
Tahun 2021	86	91,48
Tahun 2022	87	91,4
Tahun 2023	87	88,71
Tahun 2024	89	96,28
Tahun 2025	86,95	84,58

Tabel 3.18 Nilai Kinerja Pelaksana Anggaran Balmon SFR Kelas I Pekanbaru



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	008	059	694700	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU	Nilai	100,00	77,77	86,55	60,00	100,00	100,00	100,00	89,98	100%	0,00	89,98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	11,67	17,31	6,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek	88,89		86,64				100,00				

Dari tabel nilai pelaksana anggaran diatas, nilai revisi anggaran, nilai penyelesaian tagihan, nilai pengelolaan UP dan TUP serta nilai capaian output mendapat nilai maksimal, sedangkan nilai deviasi halaman III DIPA hanya memperoleh nilai 11,67 dari bobot 15, nilai penyerapan anggaran hanya memperoleh nilai 17,31 dari bobot 20 serta nilai belanja kontraktual memperoleh nilai 6 dari bobot 10.



Grafik 3.17 Nilai kinerja perencanaan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dari dashboard aplikasi money kemenkeu

2.1 Pengelolaan Anggaran

Anggaran Balmon SFR Kelas I Pekanbaru pada awal tahun sesuai DIPA NOMOR : SP DIPA- 059.03.2.613441/2025 adalah sebesar Rp 14.642.249.000,- yang terdiri dari 2 sumber pendanaan yaitu RM sebesar Rp. 5.231.705.000,- dan PNPB sebesar Rp. 9.410.544,-, tetapi pada bulan Juli 2025 terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja disingkat dengan SOTK sehingga terjadi cut off anggaran dan diganti dengan DIPA baru, sehingga Balmon SFR Kelas I Pekanbaru pada DIPA NOMOR : SP DIPA- 059.03.2.613441/2025 setelah revisi ketiga anggaran menjadi Rp 4.603.999.000,- yang terdiri dari RM Rp. 2.610.230.000,- dan PNPB sebesar Rp. 1.993.769.000,-. Anggaran Balmon SFR Kelas I Pekanbaru sesuai DIPA SOTK baru sesuai DIPA NOMOR : SP DIPA- 059.09.2.694700/2025 tanggal 8 Juli 2025 adalah sebesar Rp. 8.876.634.000,- dengan pembagian anggran RM sebesar Rp. 3.077.832.000,- dan anggaran PNPB sebesar Rp. 5.798.802.000,-.

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran (dalam ribu)

Jenis Belanja	DIPA 059.03.2.613441 (SOTK LAMA)			DIPA 059.09.2.694700 (SOTK BARU)		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Blj. Pegawai	Rp. 2.046.646	Rp. 2.046.458	99,99	Rp. 2.227.684	Rp. 2.205.985	99,03
Blj. Barang	Rp. 2.557.353	Rp. 2.557.282	100	Rp. 6.010.610	Rp. 5.310.086	88,35
Blj. Modal	-	-		Rp. 638.340	Rp. 350.190	54,86
Total	Rp. 4.603.999	Rp. 4.603.741	99,99	Rp. 8.876.634	Rp. 7.866.263	88,62

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dilakukan sebanyak 9 kali revisi dengan rincian 3 kali revisi untuk DIPA SOTK lama dan 6 kali untuk DIPA SOTK baru. Rincian revisi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20 Revisi DIPA SOTK lama Nomor SP DIPA- 059.03.2.613441/2025

Revisi ke	Tanggal Revisi	Keperluan Revisi	Wewenang
Revisi ke 1	22 Feb 2025	Revisi Blokir AA	DJA
Revisi ke 2	17 Apr 2025	Revisi hal III DIPA	Kanwil Pekanbaru
Revisi ke 3	8 Jul 2025	Cut off DIPA lama	DJA

Tabel 3.21 Revisi DIPA SOTK baru Nomor SP DIPA- 059.09.2.694700/2025

Revisi ke	Tanggal Revisi	Keperluan Revisi	Wewenang
Revisi ke 1	15 Jul 2025	Revisi RPD	Kanwil Pekanbaru
Revisi ke 2	29 Sep 2025	Revisi optimalisasi belanja barang untuk memenuhi belanja pegawai	Kanwil Pekanbaru
Revisi ke 3	28 Okt 2025	Revisi pemenuhan kekurangan belanja pegawai	DJA
Revisi ke 4	20 Nov 2025	Revisi relaksasi pagu blokir	DJA
Revisi ke 5	9 Des 2025	Pemutakhiran POK	Kanwil Pekanbaru
Revisi ke 6	12 Des 2025	Pemutakhiran POK	Kanwil Pekanbaru

2.1 Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengawasan terhadap barang milik negara yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu berupa tanah, bangunan, peralatan, maupun kendaraan. Tujuan utama dari pengelolaan BMN adalah untuk menjaga agar aset negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, efisien, dan efektif, serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk melakukan pengelolaan BMN tahun 2025, Balmon Pekanbaru memanfaatkan aplikasi SAKTI dan SIMAN yang merupakan subsistem dari SAI. Dalam prosesnya, pengelolaan BMN dilakukan dengan cara melaporkan arus barang dan arus uang. Untuk memastikan pengelolaan BMN berjalan dengan baik, terhadap kedua arus ini dilakukan proses check and balance secara berkala. Pencatatan yang baik dan transparan tentang BMN penting untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya negara. Posisi BMN dalam neraca merupakan gambaran terkait bagaimana barang milik negara dicatat sebagai bagian dari aset negara dalam laporan keuangan, yang memberikan gambaran mengenai nilai kekayaan negara yang dimiliki dalam bentuk fisik serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan organisasi terkait pelayanan publik. Berikut ini merupakan data posisi BMN Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dalam neraca tahun 2025.

Tabel 3.22 Posisi Barang Milik Negara di Neraca Aset Tahun 2025

KODE	AKUN NERACA	JUMLAH (Rp)
	URAIAN	
117111	Barang Konsumsi	20.549.124
131111	Tanah	36.812.057.000
132111	Peralatan dan Mesin	37.489.792.866
133111	Gedung dan Bangunan	5.042.179.987
134111	Jalan dan Jembatan	179.349.000
134112	Irigasi	32.455.000
134113	Jaringan	119.050.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(32.023.157.768)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.366.274.017)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(179.349.000)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(26.835.955)

137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(44.665.626)
162151	Software	3.528.711.407
162161	Lisensi	50.128.570
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	89.370.000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(89.370.000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(3.528.711.407,)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(50.128.570,)
J U M L A H		46.055.150.611

2.1 Pengelolaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Barang dan Jasa Pemerintah merujuk pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, dan pengawasan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel, serta mendukung transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, pada tahun 2025 Balmon SFR Kelas I Pekanbaru melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM) dan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), dibawah ini merupakan tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selama tahun 2025.

Tabel 3.23 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor SP DIPA- 059.03.2.613441/2025

No	Nama Paket	Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Mekanisme Pengadaan
1	Sewa Lokasi SPFR (ruang dan menara) Site Rumbai dan Tenayan Raya	99,900,000	99,900,000	PL
2	Sewa Lokasi SPFR (ruang dan menara) Site Dumai dan Bengkalis	99,900,000	99,900,000	PL
3	Sewa Lokasi SMFR (ruang dan menara) Site bagan Siapaiaipi	26,000,000	26,000,000	PL

4	Sewa Lokasi SPFR (ruang dan menara) Site Rumbai dan Tenayan Raya	26,000,000	26,000,000	PL
5	Internet SPFR	74,500,000	74,500,000	PL
6	Internet Kantor	95,500,000	62,500,000	PL
7	Internet Kantor (backup)	95,500,000	33,000,000	PL
8	Pemeliharaan Perangkat SPFR	148,740,000	148,740,000	PL
9	Jasa Tenaga Outsourcing (Tenaga Teknis)	62,362,000	62,361,170	PL

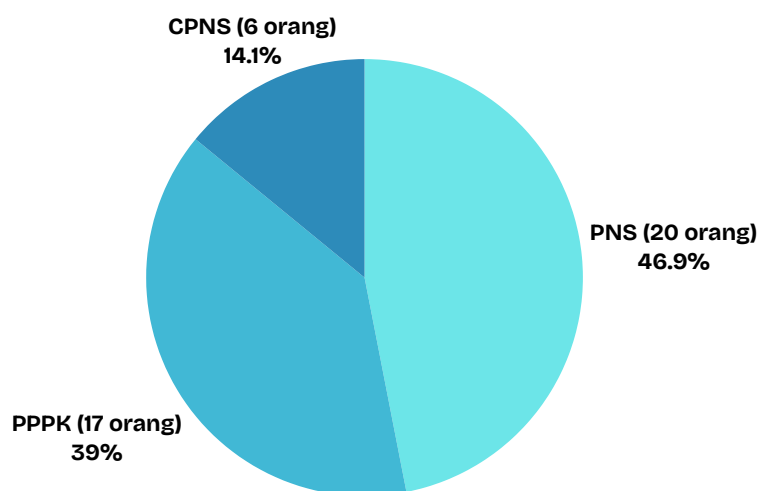
Tabel 3.24 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor SP DIPA- 059.09.2.694700/2025

No	Nama Paket	Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Mekanisme Pengadaan
1	Sewa Lokasi SPFR (ruang dan menara) Site Rumbai dan Tenayan Raya	99,900,000	66,600,000	PL
2	Sewa Lokasi SPFR (ruang dan menara) Site Dumai dan Bengkalis	99,900,000	66,600,000	PL
3	Sewa Lokasi SMFR (ruang dan menara) Site bagan Siapaipi	26,000,000	17,200,000	PL
4	Sewa Lokasi SPFR (ruang dan menara) Site Rumbai dan Tenayan Raya	26,000,000	17,200,000	PL
5	Internet SPFR	105,500,000	49,600,000	PL
6	Internet Kantor	144,000,000	41,600,000	PL
7	Internet Kantor (backup)	144,000,000	22,000,000	PL
8	Pemeliharaan Perangkat SPFR	150,000,000	133,750,000	PL
9	Pemeliharaan Perangkat Transportable	146,300,000	146,187,000	PL
10	Pemeliharaan penangkal petir	125,000,000	70,138,175	PL
11	Pemeliharaan cctv	53,045,000	53,044,680	PL
12	ILM	33,566,000	29,888,000	PL
13	Pemeliharaan Gedung	341,870,000	97,393,331	PL

14	Pemeliharaan Gedung	341,870,000	138,824,024	PL
15	MCU	117,000,000	116,671,000	PL
16	Jasa Tenaga Outsourcing (Tenaga Teknis)	93,570,000	51,967,640	PL
17	Evaluasi Kinerja	154,832,000	154,179,000	PL
18	Pengadaan Air Conditioner	29,200,000	26,417,940	e-katalog
19	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja	50,760,000	50,735,880	e-katalog
20	Pengadaan Laptop, PC dan Printer	272,540,000	270,302,004	e-katalog

2.4 Pengelola Kepegawaian

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, dan pengawasan terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan pegawai dalam suatu organisasi. Dalam konteks pemerintahan, pengelolaan SDM bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi, kualifikasi, dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. SDM Balmon Pekanbaru terdiri atas ASN yang terbagi menjadi PNS dan PPPK, serta CPNS. Berikut gambaran kekuatan SDM yang dimiliki oleh Balmon Pekanbaru pada tahun anggaran 2025.



Grafik 3.18 Perbandingan persentase PNS, CPNS dan PPPK

Pada tahun 2025, terdapat 1 (satu) orang pegawai PNS yang melakukan perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.25 Perpindahan Pegawai ke dalam Jabatan Fungsional

Nama, NIP	Jabatan Sebelumnya	Jabatan Saat ini	Tmt
RIO NOVIRA 198411022011011010	Analisis Sumber Daya Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Level 3	Arsiparis Ahli Muda	1 Jul 2025

**Tabel 3.26 Daftar Pegawai ASN (PNS dan PPPK) Balmon SFR Kelas I
Pekanbaru Tahun 2025**

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1	TONINOTITO, ST, MT	Pembina - IV/a	Plt. Ka. Balmonfrek Kelas I Pekanbaru/Ketua Tim Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi/Pengendali Frekuensi Radio Madya
2	WAN FACHRURAZI, ST, MM	Pembina - IV/a	Kasubbag Umum
3	NOFRIADI, S.Kom., M.Kom	Pembina - IV/a	Ketua Tim Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan /Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
4	MULYADI, S.Kom, MH	Pembina - IV/a	Ketua Tim Kualitas Layanan Infrastruktur Digital/Pengendali Frekuensi Radio Ahli Madya
5	HATOPAN PANJAITAN, ST, MH	Pembina - IV/a	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Madya
6	ANTONIUS NAZARA, SH	Penata TK. I - III/d	Penyidik Pelaksana
7	FEBY ROSADI, ST, MH	Penata TK. I - III/d	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
8	FERDINAN, SH	Penata TK. I - III/d	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Penyelia
9	DIANA SARI Br. SITEPU, ST, MH	Penata TK. I - III/d	Perencana Ahli Pertama
10	RIO NOVIRA, S. Kom, M. TI	Penata TK. I - III/d	Arsiparis Ahli Muda
11	BUDI HARIONO, ST, MH	Penata - III/c	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
12	FERDINAN NAIBORHU, ST, MM	Penata - III/c	Pengevaluasi Bid. Pemeliharaan & Perbaikan
13	R.D. NATALIA SIRAIT, AM.d	Penata Muda TK. I - III/b	Analisis Sumber Daya Monitoring SFR Level 1
14	DESY H. MARPAUNG, A.Md	Penata Muda TK. I - III/b	Analisis Sumber Daya Monitoring SFR Level 1
15	AHMAD SAUFI, ST	Penata Muda TK. I - III/b	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama

16	ARIEF SETIAWAN, ST	Penata Muda - III/a	Pengendali Frekuensi Radio Mahir
17	MUHAMAD YAMIN	Pengatur Tk. I - II/d	Analisis Sumber Daya Monitoring SFR Level 1
18	RIO MARLINA E. PANJAITAN	Pengatur - II/c	Analisis Sumber Daya Monitoring SFR Level 1
19	LIAN VERAWATY	Pengatur - II/c	Analisis Sumber Daya Monitoring SFR Level 1
20	ARIF FADHILLAH, A. Md	Pengatur - II/c	Pengelola Manajemen Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Informatika
21	MUHAMMAD IHSAN BATU BARA, S.T	IX	Ahli Pertama - Pengendali Frekuensi Radio
22	DERRY ADRIAN, SE	Penata Muda - III/a	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (CPNS)
23	DESSY SUHARTI MALA, S.AP	Penata Muda - III/a	Analisis Anggaran Ahli Pertama (CPNS)
24	TIA FEBRI ANANDA, S.Tr.T	Penata Muda - III/a	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama (CPNS)
25	SILVIA DWI YANTI, S.Tr.T	Penata Muda - III/a	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama (CPNS)
26	AULIA WAHDI NOVRI YANTO, A. Md	Pengatur - II/c	Pengendali Frekuensi Radio Terampil (CPNS)
27	ALDI SATRIA BUDI, A. Md	Pengatur - II/c	Pengendali Frekuensi Radio Terampil (CPNS)
28	DEDEK SUHENDRA, SE	IX	Penata Layanan Operasional
29	SLAMET HARIYADI, SE	IX	Penata Layanan Operasional
30	NURUL RUKMINI, A. Md	VII	Pengelola Layanan Operasional
31	ROIDA SUPRIYANTI	V	Pengadministrasi Perkantoran
32	FRANS, S.E.	IX	Penata Layanan Operasional
33	ANDA PUTRA	V	Pengadministrasi Perkantoran
34	DEFRI ARIANDI	V	Pengadministrasi Perkantoran

35	MARIHOT PINONDANG LUMBAN TOBING	V	Pengadministrasi Perkantoran
36	MUHTAROM	V	Pengadministrasi Perkantoran
37	NOVA DARWIS	V	Pengadministrasi Perkantoran
38	RABANUS	V	Pengadministrasi Perkantoran
39	RIAN PAJRIANTO	V	Pengadministrasi Perkantoran
40	ROBY HIDAYAT	V	Pengadministrasi Perkantoran
41	RUDI SYAHPUTRA	V	Pengadministrasi Perkantoran
42	SENDE TUA HARAHAHAP	V	Pengadministrasi Perkantoran
43	YOGI PRAMANA PUTRA	V	Pengadministrasi Perkantoran

Tabel 3.27 Data Pengembangan Kompetensi Pegawai

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN KOMPETENSI	TMT
1	TONINOTITO, ST, MT	Plt. Ka. Balmonfrek Kelas I Pekanbaru/Ketua Tim Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi/Pengendali Frekuensi Radio Madya	Pelatihan Implementasi AI Level Intermediate	24-25 Juni 2025
			Pelayanan Prima di Era Digital	19-23 Mei 2025
			Anti Korupsi	15-19 September 2025
			Pengawasan Tertib Sanksi Administrasi Efektif	17 Des 2025
			Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan	11-12 Desember 2025

2	WAN FACHRURAZI, ST, MM	Kasubbag Umum	Sosialisasi Manajemen Risiko dan Penginputan Aplikasi Manajemen Risiko	13 Mar 2025
			Bimbingan Teknis Perhitungan Formula IKPA	23 Jun 2025
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan Menuju Tata Kelola yang Transparansi dan Akuntabel	17 Mar 2025
			Sosialisasi Konflik Kepentingan di Lingkungan DJID TA 2025	23 Sep 2025
3	NOFRIADI, S.Kom., M.Kom	Ketua Tim Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan /Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	Pelatihan Teknis Policy Brief	20-24 Juli 2025
4	MULYADI, S.Kom, MH	Ketua Tim Layanan Infrastruktur Digital/Pengendali Frekuensi Radio Ahli Madya	Pelatihan Refreshment PPNS	10-16 Agustus 2025
5	HATOPAN PANJAITAN, ST, MH	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Madya	Pelatihan TV Digital	24-29 Agustus 2025
			Pelatihan Implementasi AI Level Intermediate	24-25 Juni 2025
6	ANTONIUS NAZARA, SH	Penyidik Pelaksana	Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Pemerintah Tahap II	14-19 Mei 2025
7	FEBY ROSADI, ST, MH	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	Sosialisasi Kepatuhan SFR & APT "Strategi Pengelolaan PNBPN Sanksi Adminitrasi "	21 Okt 2025
			Pengawasan Tertib Sanksi Adminitrasi Efektif	17 Des 2025
			Kontribusi Sebagai Dosen Industri di Politeknik Caltex Riau	8 Jul 2025

			Penyeragaman Penetapan Denda Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi Pada Dinas Tetap berdasarkan Izin Kelas	29 April - 02 Mei 2025
8	DIANA SARI Br. SITEPU, ST, MH	Perencana Ahli Pertama	Pemanfaatan Artificial <i>Intelligence</i> (AI) di Pemerintah	05-08 Mei 2025
			Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran (Pusat)	25-29 Agustus 2025
9	RIO NOVIRA, S. Kom, M. TI	Analisis Sumber Daya Monitoring SFR Level 3	Pemanfaatan Artificial <i>Intelligence</i> (AI) di Pemerintah Tahap II	14-19 Mei 2025
10	BUDI HARIONO, ST, MH	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda	Dasar-dasar Keamanan AI	21 Jan 2025
			Midset Digital 1: Mengubah Masa Depan Anda Dengan Pola Pikir Digital	20 Jan 2025
			Pengawasan Tertib Sanksi Administrasi Efektif	17 Des 2025
			Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan JF PFR Berdasarkan Permen Komdigi No.10 Tahun 2025	11 - 12 Desember 2025
			Pelatihan Kepemimpinan dan Ideologi Kebangsaan	21 Okt 2025
			Strategi Pengelolaan PNBSP Sanksi Administrasi	21 Okt 2025
			Sosialisasi Konflik Kepentingan di Lingkungan DJID TA 2025	23 Sep 2025
			Pelatihan Implementasi AI Level Intermediate	24 - 25 Juni 2025

11	FERDINAN NAIBORHU, ST, MM	Pengevaluasi Bid. Pemeliharaan & Perbaikan	Microsoft Power Point Level Intermediate	20 Feb - 13 Mar 2025
			Dasar-Dasar Implementasi Kecerdasan Artifisial Micro Skill	7 Mei 2025
			Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Pemerintah	14-17 Mei 2025
			Anti Korupsi	15-19 Sept 2025
			Workshop Pemeliharaan Perangkat SMFR	30-31 Juli 2025
			AI Praktis untuk Produktivitas	20 - 29 Oktober 2025
			Belajar Penggunaan Generative AI	13 Okt sd 6 Nov 2025
12	R.D. NATALIA SIRAIT, AM.d	Analisis Sumber Daya Monitoring SFR Level 1	Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Pemerintah	05-08 Mei 2025
			Mengikuti Bimbingan Teknis IKPA	12 Sep 2025
13	DESY H. MARPAUNG, A.Md	Analisis Sumber Daya Monitoring SFR Level 1	Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Pemerintah	05-08 Mei 2025
			Tugas Belajar sebagai mahasiswa Semester 2 dan 3 pada program S1 Universitas Terbuka	5 April 2025 - Januari 2026
14	AHMAD SAUFI, ST	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Pemerintah Tahap II	14-19 Mei 2025
			Pelatihan (Bootcamp) LAN Datathan 2025	14-18 Juli 2025
			Tugas Belajar sebagai mahasiswa pada program S2 Transformasi Digital	5 Feb - 31 Des 2025

15	ARIEF SETIAWAN, ST	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	Spectrum Monitoring Techniques and Methods (Intermediate)	20 April - 24 April 2025
16	MUHAMAD YAMIN	Analisis Sumber Daya Monitoring SFR Level 1	Pemanfaatan Artificial <i>Intelligence</i> (AI) di Pemerintah Tahap II	14-19 Mei 2025
			Tugas Belajar sebagai mahasiswa Semester 3 dan 4 pada program S1 Universitas Terbuka	5 April 2025 - Januari 2026
17	RIO MARLINA E. PANJAITAN	Analisis Sumber Daya Monitoring SFR Level 1	Pemanfaatan Artificial <i>Intelligence</i> (AI) di Pemerintah	05-08 Mei 2025
			Mengikuti Bimbingan Teknis IKPA	12 Sep 2025
			Tugas Belajar sebagai mahasiswa Semester 3 dan 4 pada program S1 Universitas Terbuka	5 April 2025 - Januari 2026
18	LIAN VERA WATY	Analisis Sumber Daya Monitoring SFR Level 1	Pemanfaatan Artificial <i>Intelligence</i> (AI) di Pemerintah	05-08 Mei 2025
			Tugas Belajar sebagai mahasiswa Semester 2 dan 3 pada program S1 Universitas Terbuka	5 April 2025 - Januari 2026
19	ARIF FADHILLAH, A. Md	Pengelola Manajemen Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Informatika	Pemanfaatan Artificial <i>Intelligence</i> (AI) di Pemerintah	05-08 Mei 2025

20	MUHAMMAD IHSAN BATU BARA, S.T	Ahli Pertama - Pengendali Frekuensi Radio	Pemanfaatan Artificial <i>Intelligence</i> (AI) di Pemerintah Tahap II	14-19 Mei 2025
			Workshop Pemeliharaan Perangkat SMFR	29 Juli-01 Agustus 2025
21	DERRY ADRIAN, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (CPNS)	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	23 Juni-27 September 2025
			Menghadiri Orientation Training CPNS Batch I DJID Tahun 2025	03 s/d 16 November 2025
22	DESSY SUHARTI MALA, S.AP	Analisis Anggaran Ahli Pertama (CPNS)	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	23 Juni-27 September 2025
			Menghadiri Orientation Training CPNS Batch I DJID Tahun 2025	03 s/d 16 November 2025
			Perencanaan Program dan Anggaran Terpadu T.A. 2027	1 s.d. 5 Desember 2025
23	TIA FEBRI ANANDA, S.Tr.T	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama (CPNS)	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	23 Juni-11 Oktober 2025
24	SILVIA DWI YANTI, S.Tr.T	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama (CPNS)	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025	23 Juni-11 Oktober 2025
			Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP)	25 - 29 November 2025
25	AULIA WAHDI NOVRI YANTO, A. Md	Pengendali Frekuensi Radio Terampil (CPNS)	Pelatihan Teknis Generative AI	19 Jul 2025
			Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II Tahun 2025	28 Agust-29 Nov 2025
26	ALDI SATRIA BUDI, A. Md	Pengendali Frekuensi Radio Terampil (CPNS)	Pelatihan Teknis Generative AI	19 Jul 2025
			Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II Tahun 2025	28 Agust-29 Nov 2025

27	FRANS, SE	Penata Layanan Operasional	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025
28	NURUL RUKMINI, A. Md	Pengelola Layanan Operasional	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025
29	ANDA PUTRA	Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025
30	DEFRI ARIANDI	Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025
31	MARIHOT PINONDANG LUMBAN TOBING	Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025
32	MUHTAROM	Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025
33	NOVA DARWIS	Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025
34	RIAN PAJRIANTO	Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025
35	ROBY HIDAYAT	Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025
36	RUDI SYAHPUTRA	Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025
37	SENDE TUA HARAHAHAP	Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025
38	YOGI PRAMANA PUTRA	Pengadministrasi Perkantoran	Pelatihan E-Learning Microsoft Excel dan Power Point Level Advance Batch II	24 November s.d 14 Desember 2025

2.5 Pengelola Persuratan dan Kearsipan

Pengelolaan persuratan di suatu organisasi merupakan proses yang melibatkan pengaturan, penyimpanan, dan distribusi surat masuk maupun surat keluar dengan tujuan untuk mendukung kelancaran administrasi dan komunikasi dalam organisasi. Pengelolaan surat ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui surat bisa diterima dan ditindaklanjuti dengan efisien dan tepat waktu. Berikut rekapitulasi data bulanan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta nota dinas di lingkungan Balmon Pekanbaru tahun 2025.

Tabel 3.28 Pengelolaan surat masuk, surat keluar dan nota dinas selama tahun 2025

NO	BULAN	SURAT MASUK	SURAT KELUAR	NOTA DINAS	JUMLAH
1	JANUARI	48	14	20	82
2	FEBRUARI	44	6	22	72
3	MARET	62	10	24	96
4	APRIL	46	19	12	77
5	MEI	69	47	32	148
6	JUNI	51	23	33	107
7	JULI	73	48	48	169
8	AGUSTUS	51	30	40	121
9	SEPTEMBER	69	35	60	164
10	OKTOBER	87	48	66	201
11	NOVEMBER	64	33	79	176
12	DESEMBER	64	26	62	152
	JUMLAH	728	339	498	1565

Pada tahun 2025, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru telah mengajukan usul pemusnahan arsip inaktif sebagai bagian dari strategi pengelolaan kearsipan yang berkesinambungan. Usul ini disusun berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian terhadap arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna administrasi, hukum, maupun historis, sehingga keberadaannya tidak lagi relevan bagi kepentingan organisasi.

Proses pengajuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta tertib administrasi. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dalam menjaga kualitas tata kelola arsip, mengurangi beban penyimpanan, serta memastikan bahwa hanya arsip yang bernilai guna yang tetap dipelihara.

Selain itu, pengajuan usul pemusnahan arsip inaktif ini juga menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem kearsipan yang dimiliki oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru. Dengan adanya pemusnahan arsip yang sudah tidak relevan, ruang penyimpanan dapat dioptimalkan untuk mendukung efisiensi kerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Organisasi menegaskan bahwa setiap tahapan pemusnahan dilakukan secara terukur, mulai dari verifikasi, pencatatan, hingga pelaporan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum. Melalui langkah ini, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru tidak hanya menata arsip secara fisik, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih disiplin, efektif, dan berorientasi pada masa depan. Adapun daftar arsip inaktif yang menjadi bagian dari usul pemusnahan arsip antara lain:

Tabel 3.29 Daftar Arsip Inaktif selama tahun 2025

NO	KATEGORI	JUMLAH ARSIP
1	KEUANGAN	2803
2	HUKUM	1014
3	SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS	852
4	PERENCANAAN	663
5	UNIT PENGADAAN	212
6	UMUM	199
7	KEPEGAWAIAN	153
8	APLIKASI INFORMATIKA	64
9	PENGAWASAN	42
10	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	38
11	PENYELENGGARAAN POS DAN	13
12	DATA DAN SARANA INFORMATIKA	12
13	INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	7

14	KELEMBAGAAN INTERNASIONAL	5
15	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	5
16	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2
TOTAL		6084

ANALISA

Capaian kinerja nilai kinerja anggaran (NKA) Balmon Pekanbaru pada tahun 2025 memperoleh hasil dibawah target. Dari target 86,95 capaian yang diraih adalah 84,58 atau sekitar 97,27% dari target yang ditetapkan. Ketidakterhasilan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a) Nilai Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)

Pada Tabel IKPA Desember diatas dijelaskan bahwa yang nilai capaian akhirnya lebih rendah dari bobot yang diberikan adalah :

- Deviasi hal III DIPA : Dari bobot nilai 15 Balmon SFR Kelas I Pekanbaru hanya memperoleh nilai akhir 11,67, hal ini bisa dijelaskan karena hal III Dipa yang sudah disusun di awal bulan Juli 2025 untuk TW 3 tidak bisa terlaksana karena Dipa SOTK baru terbit di tanggal 15 Juli 2025, yang awalnya di perkirakan awal bulan Juli 2025 dan izin menggunakan PNBPN terbit di bulan Agustus 2025 sesuai surat Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Pelaksana Anggaran Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu nomor S-277/PB.2/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Persetujuan Penggunaan MP PNBPN Tahap I Tahun 2025 pada satker lingkup Kementerian Komunikasi dan Digital, sehingga penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan di hal III DIPA tidak dapat terlaksana sesuai rencana.
- Penyerapan anggaran : sesuai dengan realisasi anggaran di data realisasi yang terdapat pada IKPA, realisasi Balmon SFR Kelas I Pekanbaru sebesar 88,62%. Realisasi yang tercatat dalam aplikasi omspan adalah realisasi berbanding dengan pagu seluruhnya, sedangkan pada pagu tersebut terdapat anggaran yang masih di blokir sebesar Rp. 545.333.000,- jika anggaran blokir di keluarkan maka realisasi Balmon SFR Kelas Pekanbaru menjadi 94,42%. Seharusnya bisa mencapai 99% jika revisi relaksasi selesai di awal Oktober 2025. Kenyataannya revisi relaksasi selesai di tanggal 28 November 2025.
- Belanja kontraktual : Untuk belanja kontraktual Balmon SFR Kelas I Pekanbaru memperoleh nilai akhir 4 dari bobot 10. Dari 11 kontraktual yang didaftarkan hanya 4 kontrak yang kontraknya dimulai di TW 3 dan 7 di daftarkan di awal bulan Desember 2025. Hal ini dikarenakan dipa revisi relaksasi selesai di tanggal 28 November 2025. Dimana ada 7 kontrak belanja modal yang di peroleh karena hasil relaksasi pagu blokir.

b) Nilai Perencanaan Anggaran

Nilai Perencana Anggaran yang diperoleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru sebesar 37,5% hal ini dikarenakan dengan adanya restrukturisasi pada Kementerian Komunikasi dan Digital maka Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital tidak bisa memperoleh nilai efisiensi maksimal 25% pada Nilai Kinerja Anggaran dikarenakan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital tidak dapat melakukan tagging SBKK/SBKU karena isu restrukturisasi. Hal ini sudah di konfirmasi oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Bapak Wayan Toni Supriyanto ke Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu melalui surat B-962/DJID.1/PR.04.07/12/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Permohonan Dispensasi Tagging SBKK pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital TA 2025 Jakarta. Dan surat Direktur Jenderal Infrastruktur Digital tersebut sudah di jawab oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu melalui surat Nomor: S-9/AG/AG.9/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Permohonan Dispensasi Tagging . SBKK pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital TA 2025, pada surat tersebut dinyatakan dispensasi yang dimohonkan tidak dapat dikabulkan karena SBKK pada unit Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tidak dapat diberlakukan sebagai SBKK pada unit Ditjen Infrastruktur Digital mengingat adanya perbedaan kodifikasi pada masing-masing SBKK. Hal yang sama juga diberlakukan pada SBKK kementerian/lembaga lain yang mengalami perubahan kodifikasi

bagian anggaran dan/atau unit eselon I sebagai dampak perubahan kabinet pemerintahan.

Oleh sebab tersebut diatas maka Nilai Perencana Anggaran Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dan seluruh satker UPT Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital maksimal memperoleh nilai 37,5%.



Nilai kinerja anggaran merupakan penilaian untuk seluruh realisasi yang dilaksanakan. Dalam hal ini seluruh anggaran yang tidak diperuntukan untuk mencapai target indikator kinerja lainnya dimasukkan dalam anggaran untuk pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Tahun 2025. Adapun besaran anggarannya yaitu Rp. 6.304.710.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.150.312.456,- (97,55%). Dengan anggaran tersebut Balmon SFR Kelas I Pekanbaru belum dapat mencapai target yang ditetapkan dengan beberapa faktor yang sudah diuraikan sebelumnya.

REKOMENDASI

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat dikatakan bahwa keadaan yang dihadapi di tahun 2025 adalah keadaan yang diluar kebiasaan.

Tetapi kedepannya tetap harus diperhatikan adalah dalam hal realisasi anggaran dan hal III DIPA, pemantauan rutin serta koordinasi antar pihak terkait dalam pengelolaan anggaran perlu lebih ditingkatkan, sehingga kedepannya realisasi anggaran yang memiliki bobot 20% penilaian IKPA dapat meraih nilai maksimal begitupun dengan penilaian untuk hal III DIPA kedepannya bisa mendapat nilai maksimal 15%. Belanja kontraktual di tahun 2026 juga tetap harus menjadi perhatian, jika memungkinkan di TW 1 semua belanja kontraktual sudah didaftarkan ke KPPN agar mendapat nilai maksimal 10%.

TINDAK LANJUT

Nilai Kinerja Anggaran berfungsi sebagai tools untuk mengukur dan menilai efektivitas serta efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Melalui penilaian ini, dapat diketahui sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan digunakan sesuai dengan perencanaan, efektif dalam mencapai tujuan, dan efisien dalam penggunaan sumber daya.

EFISIENSI

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru telah sepenuhnya menggunakan aplikasi SAKTI. Secara keseluruhan, SAKTI berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan melalui integrasi proses, otomatisasi, dan peningkatan transparansi, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru.



DAMPAK

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki peran strategis dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio, pengawasan perangkat telekomunikasi, serta peningkatan kualitas layanan komunikasi di Indonesia. Salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan adalah Nilai Kinerja Anggaran, yang mencerminkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam pemanfaatan anggaran negara untuk mendukung tugas dan fungsi Ditjen SDPPI. Kinerja anggaran yang optimal memastikan bahwa alokasi dana untuk pengawasan spektrum, pemantauan interferensi, dan sosialisasi regulasi dapat berjalan secara maksimal. Hal ini berkontribusi pada kelancaran operasional Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, sehingga penegakan aturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan frekuensi dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Dengan alokasi anggaran yang tepat, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dapat mengembangkan teknologi pemantauan frekuensi yang lebih modern, termasuk peningkatan kapasitas perangkat dan sistem yang digunakan dalam pengawasan spektrum. Hal ini meningkatkan ketelitian dan kecepatan dalam mendeteksi pelanggaran serta gangguan spektrum.

Nilai kinerja anggaran mencerminkan komitmen terhadap digitalisasi layanan, termasuk implementasi sistem perizinan berbasis elektronik seperti ISR (Izin Stasiun Radio) yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Hal ini meningkatkan kepuasan masyarakat dan pelaku industri telekomunikasi terhadap pelayanan Ditjen Infradigi. Evaluasi nilai kinerja anggaran memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan oleh Ditjen Infrastruktur Digital menghasilkan dampak yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan.

Dengan adanya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, kepercayaan publik terhadap institusi meningkat, serta efisiensi belanja negara dapat lebih terjaga. Kinerja anggaran yang baik mendukung investasi dalam pengembangan teknologi baru, optimalisasi layanan telekomunikasi, serta perluasan akses komunikasi ke daerah terpencil. Hal ini memungkinkan industri telekomunikasi berkembang lebih pesat dan mendukung ekosistem digital nasional yang lebih inklusif.

Dengan demikian, Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital memiliki dampak luas terhadap efisiensi pengelolaan spektrum, peningkatan layanan publik, penguatan sistem pengawasan, serta pengembangan sektor telekomunikasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : Salah satu nilai budaya ASN yang selalu diutamakan oleh Balmon SFR Kelas I Pekanbaru dalam pelaksanaan anggaran adalah berorientasi pelayanan. Dalam pelaksanaan anggaran, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru sesuai ketentuan lebih memprioritaskan belanja produk dalam negeri (TKDN) yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Akuntabel : Dalam pelaksanaan anggaran, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru selalu mengedepankan asas akuntabilitas, seluruh laporan pertanggungjawaban keuangan yang direalisasikan dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Harmonis : Salah satu pendukung utama bagi Balmon Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sinergitas dan harmonisasi antar elemen terkait. Tidak hanya di lingkup internal, harmonisasi pihak Balmon Pekanbaru dengan pihak eksternal juga selalu dijaga agar dapat mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Loyal : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pihak Balmon Pekanbaru senantiasa menjaga nama baik organisasi, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar dan kondusif.

Adaptif : Beradaptasi dengan segala kondisi menjadi salah satu nilai yang selalu dijunjung oleh Balmon Pekanbaru sehingga kendala yang berpotensi menghalangi pelaksanaan tugas dapat diminimalisir.

Kolaboratif : Kolaborasi tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu fondasi utama keberhasilan Balmon Pekanbaru dalam mencapai atau melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Kolaborasi dengan pihak internal maupun eksternal menjadi salah satu hal penting yang menjadi sebuah keniscayaan bagi Balmon Pekanbaru.



Indikator Kinerja 2.2

Persentase (%) Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

LATAR BELAKANG

Indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) disusun sebagai alat ukur strategis dalam menilai tingkat akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan UAKPA merupakan representasi formal atas seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam satu periode anggaran.

Pelaporan keuangan yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang memberikan gambaran nyata mengenai kinerja keuangan, efektivitas penggunaan anggaran, serta tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Melalui indikator ini, kualitas penyajian laporan keuangan dapat diukur secara objektif, terstruktur, dan berkesinambungan, sehingga mampu mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

CAPAIAN KINERJA

Tabulasi data capaian disusun untuk menyajikan informasi kinerja indikator secara komprehensif dan berkesinambungan, meliputi capaian kinerja pada tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun berjalan, serta target yang telah ditetapkan. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tren peningkatan kualitas pelaporan keuangan dari waktu ke waktu.

Melalui tabulasi data, dapat dilakukan perbandingan yang objektif antara target dan realisasi nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA, sehingga tingkat pencapaian kinerja dapat diukur secara kuantitatif.

Capaian kinerja terhadap nilai kualitas pelaporan keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 97. Sehingga persentase capaian kinerja adalah 103,09%. Berikut ini merupakan capaian bulanan kualitas pelaporan keuangan UAKPA Balmon Pekanbaru tahun anggaran 2025.

Tabel 3.30 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuas Pengguna Anggara (UAKPA)	98 %	100 %	97 %	100 %



Gambar 3.10 Capaian Bulanan Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

ANALISA

Capaian nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA tahun anggaran 2025 di Balmon Pekanbaru berhasil melampaui target. Dari penetapan target sebesar 97, Balmon Pekanbaru berhasil mencapai realisasi 100%. Ada beberapa faktor pendukung yang membuat capaian Balmon Pekanbaru berhasil melampaui target, antara lain:

- Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang dilakukan tepat waktu.
- Adanya pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan secara berkala Bersama KPPN sehingga dapat menyelesaikan perbedaan atau kesalahan yang mungkin terjadi.
- Telah dilaksanakannya pengendalian internal atas laporan keuangan yang salah satu tujuannya adalah meminimalisir kesalahan.

Keberhasilan pencapaian target indikator didukung oleh penerapan berbagai strategi dan inovasi yang terintegrasi. Salah satu strategi utama adalah optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan SAKTI memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan tepat waktu.

Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dilakukan melalui pembelajaran berkelanjutan, pendampingan teknis, serta pembaruan pemahaman terhadap regulasi keuangan yang dinamis.

Strategi lain yang berperan penting adalah pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan secara berkala dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) guna memastikan kesesuaian data dan meminimalkan potensi kesalahan pencatatan.

Nilai kualitas pelaporan keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) diperoleh dari laporan yang disusun secara akuntabel. Nilai kualitas pelaporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas. Sehingga dalam pencapaian target ini tidak memerlukan anggaran khusus.



DAMPAK

Sebagai bagian dari sistem tata kelola keuangan negara, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun mencerminkan akurasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas penyusunan laporan keuangan serta dampaknya terhadap perencanaan dan pengelolaan anggaran secara lebih profesional dan akuntabel.

Pelaporan keuangan yang berkualitas memastikan bahwa setiap transaksi dan penggunaan anggaran terdokumentasi dengan baik, sehingga pengambilan keputusan berbasis keuangan dapat dilakukan secara lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil. Kualitas pelaporan keuangan yang tinggi mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip transparansi, memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk menilai efektivitas pemanfaatan anggaran serta mengidentifikasi potensi efisiensi dalam perencanaan keuangan.

Dengan laporan keuangan yang valid dan berkualitas, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif. Hal ini memungkinkan identifikasi dini terhadap penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana, sehingga langkah korektif dapat segera diambil. Pelaporan keuangan yang berkualitas mendukung proses audit yang lebih transparan dan sistematis, memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memenuhi persyaratan hukum dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. Data yang tersaji dalam laporan keuangan berkualitas menjadi dasar bagi perencanaan anggaran di periode berikutnya, membantu dalam alokasi dana yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.

Dengan demikian, Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA berkontribusi terhadap keakuratan pencatatan, transparansi, penguatan pengawasan, kelancaran audit, serta efektivitas perencanaan keuangan, memastikan pengelolaan anggaran yang lebih Professional dan berkelanjutan.

REKOMENDASI

Kendala yang sering terjadi dalam pelaporan keuangan UAKPA adalah dari sisi aplikasi yaitu sering terjadinya error atau proses maintenance pada aplikasi SAKTI terkadang membuat proses penerbitan SHR menjadi terlambat. Penerbitan SHR yang tepat waktu dapat membantu penyusunan laporan keuangan yang lebih cepat dan sesuai jadwal.

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut nilai laporan keuangan UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) merujuk pada langkah-langkah yang diambil setelah laporan keuangan tersebut disusun dan diaudit untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku, serta untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah di lingkungan Balmon Pekanbaru.

EFISIENSI

Efisiensi pelaporan keuangan UAKPA Balmon Pekanbaru dapat dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti SAKTI (termasuk pelaporan BMN, Persediaan), standarisasi prosedur, pelatihan SDM, pengelolaan data yang baik, serta koordinasi dan dukungan dengan pihak terkait. Semua langkah ini tidak hanya akan mempercepat proses pelaporan tetapi juga meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun, memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah khususnya Balmon SFR Kelas I Pekanbaru.

IMPLEMENTASI NILAI BUDAYA BERAKHLAK

Berorientasi Pelayanan : Pelaporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Balmon Pekanbaru diselenggarakan dengan menjunjung tinggi nilai akuntabel, bersih, transparan dan mengutamakan kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat dan stakeholder terkait.

Akuntabel : Nilai Laporan Keuangan UAKPA dilaksanakan oleh Balmon Pekanbaru dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku

Kompeten : Tidak dapat dipungkiri bahwa SDM yang berkompeten merupakan salah satu penunjang utama dalam pelaporan keuangan disebuah organisasi, tak terkecuali di Balmon Pekanbaru sehingga laporan keuangan yang disusun menjadi sebuah laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.



Harmonis : Hamonisasi diantara SDM Balmon Pekanbaru baik di lingkup internal maupun eksternal merupakan sebuah kondisi yang membuat suasana kerja menjadi kondusif sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya di bidang pelaporan keuangan dapat berjalan optimal, efektif dan efisien.

Loyal : Menjaga nama baik, baik pribadi maupun institusional menjadi sebuah kewajiban bagi seorang ASN maupun lembaga pemerintah. Hal ini juga telah diterapkan oleh Balmon Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya tak terkecuali dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan UAKPA.

Adaptif : Kemampuan beradaptasi dalam segala kondisi termasuk perkembangan regulasi, perkembangan teknologi harus disikapi sebagai sebuah peluang dan bukan sebaliknya. Hal ini juga telah tertanam dalam sikap dan nilai-nilai yang diterapkan oleh Balmon Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kolaboratif : Kolaborasi antar pihak terkait menjadi sebuah keniscayaan dalam mensukseskan capaian Balmon Pekanbaru dalam kinerja nilai Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa pengguna anggaran (UAKPA).



BAB IV

PENUTUP



PENUTUP

Laporan Kinerja Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Tahun 2025 disusun sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan amanah, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Dalam rangka memenuhi target kinerja Tahun 2025, Balmon SFR Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui 2 sasaran kinerja yang dijabarkan ke dalam 15 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

01

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Secara umum, pelaksanaan program kerja dan kegiatan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.

02

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Dari 15 (lima belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

03

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Kegiatan monitoring, penertiban, pengukuran, serta pembinaan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi telah dilaksanakan secara optimal sehingga mendukung terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

04

PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA STAKEHOLDER

Koordinasi dan kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi, lembaga penyiaran, instansi pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya terus ditingkatkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

05

EVALUASI DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Berbagai capaian keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2025 menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya sehingga capaian kinerja dapat lebih optimal.

Keberhasilan yang telah dicapai selama Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Sementara itu, terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dengan tetap mengedepankan profesionalisme, integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Demikian Laporan Kinerja Balmon SFR Kelas I Pekanbaru Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan serta diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Balmon SFR Kelas I Pekanbaru.





LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio



Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio





Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi



Tindak Lanjut Hasil Penertiban (TLHP)



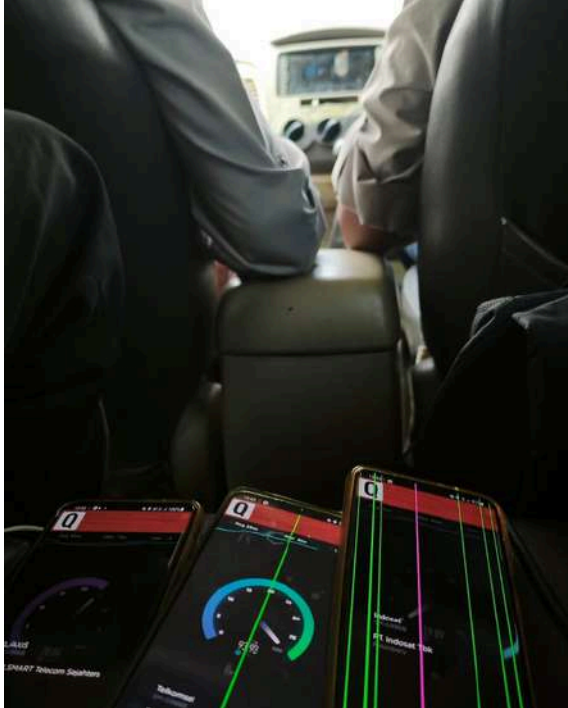


Inspeksi Validasi Izin Stasiun Radio Metode Open Shelter



Pemeriksaan Stasiun Radio



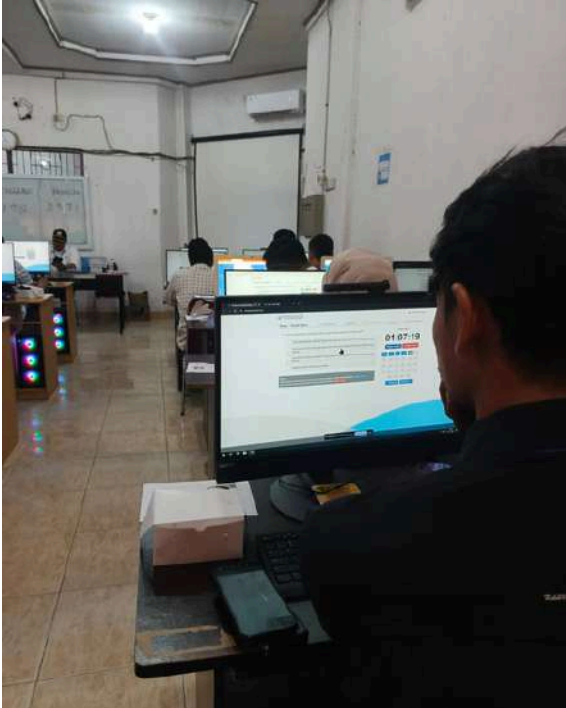


Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi



Survey Kepuasan Masyarakat





Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR)



Verifikasi Data ISR





Maritime on the Spot (MoTS)



Pelaksanaan Lelang 2025



Evaluasi Kinerja ASN

